

POLITIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan
***Shrimp Estate* (Kawasan Budidaya Perikanan**
Terintegrasi) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan,
Kabupaten Kebumen

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Sholikhah

1906016094

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:


Nama : Sholikhah
NIM : 1906016094
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan *Shrimp Estate* (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegalretno, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua 'laikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Mei 2023

Pembimbing I



Muhammad Mahsun, M.A

SKRIPSI

**POLITIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN *SHRIMP*
ESTATE (KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN TERINTEGRASI) DI DESA
TEGALRETN0, KEC. PETANAHAN, KAB. KEBUMEN**

Disusun Oleh:

Sholikhah

1906016094

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 16 Juni 2023 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

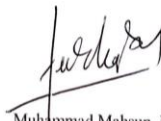
Ketua



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

NIP. 196805051995031002

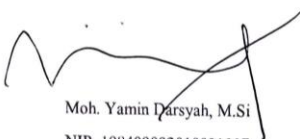
Sekretaris



Muhammad Mahsun, M.A

NIP. 198511182016011901


Penguji 1



Moh. Yamin Darsyah, M.Si

NIP. 198409092019031007

Pembimbing 1



Muhammad Mahsun, M.A

NIP. 198511182016011901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2023



Sholikhah

NIM. 1906016094

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan *Shrimp Estate* (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman jahiliyyah ke zaman yang terang benderang ini sehingga ilmunya dapat diperoleh dengan mudah.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dalam penelitian. Meskipun demikian, atas usaha dan kerja keras serta pihak-pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan dorongan maka skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih tiada batasnya kepada :

1. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Drs. Nur Syamsudin, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
4. Muhammad Mahsun, M.A selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pada penulis selama berproses di perguruan tinggi ini.
6. Bapak Musriyanto selaku Kepala Sie Budidaya Perikanan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
7. Bapak Maskar Jayadi selaku Penanggung Jawab Operasional Budidaya Udang Berbasis Kawasan Kabupaten Kebumen.
8. Bapak Edy Purwoko selaku Pimpinan Pemerintahan Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

9. Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Tegaltretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.
10. Bapak Sudarno dan Ibu Rodiyah selaku orang tua tercinta dan terkasih dari penulis. Terimakasih telah memberikan segalanya untuk penulis yakni berupa dukungan secara material, moral, dan do'a yang selalu dipanjatkan pada Allah SWT. Terimakasih telah menjadi *support system* terbaik untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak-kakak tercinta dari penulis yaitu Nur Hidayati dan Purwati yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun moral.
12. Kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan seta do'anya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Teman-teman di dalam *group* Rebahan Kingdom yakni Tri Wulan Ningsih, Mutia Muharamah, Sherly Apriliani, Salma Inayatul Maula, dan Nurhaliza Masyithoh yang telah memberikan *support*, canda dan tawanya pada penulis sehingga membangkitkan rasa semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Keluarga besar IMAKE (Ikatan Mahasiswa Kebumen) Rayon UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi keluarga dan tempat untuk pulang di tanah rantau.

15. Teman-teman angkatan 19 di IMAKE Rayon UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi seperti saudara tanpa adanya kartu keluarga. Terimakasih atas dukungan dan candaan yang diberikan untuk penulis.
16. Kepada teman-teman penulis yaitu Silfi Auliya An-Nisa, Salsabilla Firdausiyyah, Ivan Afik Zain, Bayu Trijaya Poetra Pratama, Bayu Rafi Firmasyah, Eky Pradipta, Muhammad Abdul Azis, dan Muhammad Ahlan Kalasuba yang selalu ada untuk penulis dan telah memberikan *support* dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Keluarga KKN Mandiri Misi Khusus Kelompok 35 UIN Walisongo Semarang yang menjadi bagian dari kisah perjalanan penulis selama berproses di perguruan tinggi ini.
18. Teman-teman satu angkatan 2019 program studi Ilmu Politik yang telah memberikan pembelajaran selama berproses dan memberikan dukungan kepada penulis.
19. Segenap informan yang telah bersedia membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
20. Segenap pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian, ucapan terimakasih yang penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Semoga segala amal, bantuan dan kebaikan dari berbagai pihak di atas dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal dan melimpah. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 16 Mei 2023

Penulis



Sholikhah

NIM. 1906016094

PERSEMBAHAN

Segenap usaha dan beriringan ucapan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, atas karunia-Nya ini penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi. Penulis mendedikasikan skripsi ini teruntuk :

1. Kedua orang tua tercinta dan terkasih dari penulis yaitu Bapak Sudarno dan Ibu Rodiyah yang selama ini telah mendidik penulis dan memberikan nasihat, dukungan, motivasi, serta tak luput dengan do'a yang selalu dipanjatkan pada Allah SWT. Terimakasih atas kasih sayang tiada henti sampai saat ini.
2. Dua kakak tercinta dan terkasih penulis yaitu Nur Hidayati dan Purwati yang telah memberikan *support* dalam keadaan apapun baik secara material maupun moral serta memberikan arahan pada penulis.
3. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Tri Wulan Ningsih, Mutia Muharamah, Sherly Apriliani, Salma Inayatul Maula, dan Nurhaliza Masyithoh yang telah menjadi keluarga di tanah rantau. Terimakasih atas canda dan tawa yang senantiasa diberikan.

5. Kawan-kawan penulis yaitu Silfi Auliya An-Nisa, Salsabila Firdausiyah, Bayu Trijaya Poetra Pratama, Bayu Rafi Firmasyah, Muhammad Abdul Azis, dan Muhammad Ahlan Kalasuba telah kebersamai penulis selama berproses di UIN Walisongo.
6. Saudara Ivan Afik Zain yang telah kebersamai penulis hingga di titik ini. Terimakasih telah berkontribusi dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran baik material maupun moral serta sabar dalam menghadapi penulis. Terimakasih telah menjadi *partner* diskusi penulis sehingga dapat memecahkan masalah di setiap ada kebimbangan dan keraguan.

MOTTO

Allah SWT tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru. Akan tetapi Allah SWT berjanji bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana dalam ayat Al-Qu'ran surah Al-Insyirah : 5-6 yang berbunyi :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.

(Umar bin Khattab)

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat kerap kali dikaji secara sosiologis dan didefinisikan dengan sudut pandang yang berbeda. Definisi pemberdayaan yakni usaha perjuangan masyarakat untuk menuju kemandirian dengan mengembangkan *skill*, pengetahuan, dan sebagainya. Penelitian ini berbeda karena mengkaji pemberdayaan dalam ranah politik dengan temuan unik yakni pembangunan *shrimp estate* di Desa Tegalretno sebagai pemberdayaan masyarakat yang menjadi polemik karena lahan yang digunakan untuk pembangunan adalah lahan pemerintah namun menjadi lahan hak guna pakai masyarakat Desa Tegalretno sehingga mereka khawatir kehilangan mata pencaharian. Selain itu, masih rendahnya pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat sekitar sehingga mereka khawatir bahwa tenaga lokal yang digunakan bukan dari warga desa tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini menjawab masalah yakni pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan *shrimp estate* dan kontestasi politik para *stakeholder* pada proses pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Mansour Fakih dan teori *Critical Discourse Analysis* (CDA) dari Norman Fairclough. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dalam penelitian yakni data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat temuan yakni pertama, pembangunan *shrimp estate* telah melibatkan masyarakat diantaranya sosialisasi, penyerapan tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan. Pembangunan *shrimp estate* dapat dikatakan berhasil, namun pemberdayaannya belum berjalan sepenuhnya dan memiliki catatan yang harus diselesaikan. Kedua, pembangunan *shrimp estate* yang melibatkan aktor politik di dalamnya menjadi bias pada elit kelas atas karena pembangunan tersebut bukanlah ide dari masyarakat. Selain itu, aktor politik berkontestasi untuk menjadi dekat dengan pemberdayaan sehingga masyarakat menerima program tersebut di tengah kontra yang terjadi. Hal ini menjadi perang wacana antara *stakeholder* dan masyarakat. Dilihat dari CDA, maka terdapat ketidakadilan yang terjadi dan wacana muncul karena beberapa faktor seperti sistem kapitalisme, neoliberal, dan sebagainya.

Kata kunci : *Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Kawasan Shrimp Estate, Stakeholder, Kontestasi Politik*

ABSTRACT

Community empowerment is often studied sociologically and defined from different perspectives. The definition of empowerment is the community's struggle for independence by developing skills, knowledge, and so on. This research is different because it examines empowerment in the political realm with a unique finding, namely development shrimp estate in Tegalretno Village as community empowerment which became a polemic because the land used for development was government land but became land use rights for the people of Tegalretno Village so they were worried about losing their livelihoods. In addition, there is still a low level of training and assistance for the local community so they are worried that the local workers used are not from the village. Therefore, this study is to answer community empowerment in regional development shrimp estate and political contestation stakeholders in the community empowerment process.

This study uses the theory of community empowerment according to Mansour Fakih and theory Critical Discourse Analysis (CDA) from Norman Fairclough. The research method uses a type of qualitative research based on field research with a case study approach. The data obtained in this research are primary data and secondary data. As for data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. While the data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the research conducted, there are findings namely first, development shrimp estate has involved the community including outreach, the absorption of local workers and providing training. Development shrimp estate

can be said to be successful, but the empowerment has not been fully implemented and has records that must be completed. Second, development shrimp estate which involves political actors in it is biased towards the upper class elite because this development is not the idea of society. In addition, political actors compete to be close to empowerment so that the community accepts the program amidst the cons that occur. This became a discourse war between stakeholder and society. Judging from the CDA, there are injustices that occur and discourse arises due to several factors such as the capitalist system, neoliberalism, and so on.

Keywords : *Community Empowerment, Development of Shrimp Estate, Stakeholders, Political Contestation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Kepenulisan	30

BAB II KERANGKA TEORI	36
A. Teori Pemberdayaan Masyarakat	37
1. Melacak Sejarah Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	37
2. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Transformasi Sosial	42
B. Teori CDA (Critical Discourse Analysis)	49
1. Konsep CDA (<i>Critical Discourse Analysis</i>) ..	49
2. Fungsi CDA (<i>Critical Discourse Analysis</i>) Bagi Masyarakat.....	53
3. Paradigmatik CDA (Critical Discourse Analysis)	54
4. Teori CDA (<i>Critical Discourse Analysis</i>) Norman Fairclough.....	58
5. Model Analisa <i>Critical Discourse Analysis</i> (CDA) Fairclough.....	62
6. Cara Kerja Model Analisis <i>Critical Discourse Analysis</i> (CDA) Fairclough	70
 BAB III LANDSKAP DESA TEGALRETNO DAN KAWASAN <i>SHRIMP ESTATE</i>	 74
A. Lanskap Desa Tegalretno	74
1. Sejarah Desa	74
2. Kondisi Geografis.....	76
3. Kondisi Demografis.....	78
4. Struktur Sosial Ekonomi.....	82

5. Struktur Sosial Budaya	84
6. Struktur Sosial Politik.....	87
B. Lanskap Kawasan <i>Shrimp Estate</i>	89
1. Konsep <i>Shrimp Estate</i>	89
2. Lokasi Budidaya Udang Berbasis Kawasan Kabupaten Kebumen	93

**BAB IV PRAKTIK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA TEGALRETNO DALAM
PEMBANGUNAN *SHRIMP ESTATE*99**

A. Proses Pembangunan Kawasan <i>Shrimp Estate</i>	100
B. Pelibatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan <i>Shrimp Estate</i>	110
C. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan <i>Shrimp Estate</i> Sebagai Transformasi Sosial.....	117
1. Transformasi Sosial dan Ekonomi.....	119
2. Transformasi Pengetahuan.....	123

**BAB V KONTESTASI POLITIK *STAKEHOLDER*
PADA PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
.....129**

A. Aktor Politik dan Kekuasaan Dibalik Wacana Pembangunan <i>Shrimp Estate</i>	130
B. Kontestasi Para <i>Stakeholder</i> dan Kepentingan Dalam Pembangunan Kawasan <i>Shrimp Estate</i>	136
1. Konstruksi Pemahaman Wacana Pemberdayaan Masyarakat Oleh Aktor Politik.....	137

2. Praktik Sosial kultural Sebagai Kemunculan Wacana Pemberdayaan Masyarakat	150
---	-----

BAB VI PENUTUP155

A. Kesimpulan	155
---------------------	-----

B. Saran.....	159
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA161

LAMPIRAN.....170

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....192

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Desa Tegalretno Tahun 2022.....	79
Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	80
Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	81
Tabel 4. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Analisis CDA Fairclough.....	62
Gambar 2. Proses Analisis CDA Fairclough.....	71
Gambar 3. Peta Desa Tegalretno.....	78
Gambar 4. Logo atau Selamat Datang Budidaya Udang Berbasis Kawasan	91
Gambar 5. Kantor Utama Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK)	95
Gambar 6. Tandon yang ada di Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK)	96
Gambar 7. Kincir Air di Kolam <i>Shrimp Estate</i>	96
Gambar 8. IPAL yang ada di BUBK.....	97
Gambar 9. Kolam Tambak Udang atau Petak Pemeliharaan	97
Gambar 10. Bangunan Pasca Panen di BUBK.....	98
Gambar 11. Kawasan Pesisir Desa Tegalretno	101
Gambar 12. Pembangunan Kawasan <i>Shrimp Estate</i> di Desa Tegalretno	105
Gambar 13. Grafik Tenaga Kerja Lokal dalam Pembangunan Kawasan <i>Shrimp Estate</i>	114

Gambar 14. Wawancara dengan Kepala Sie Perikanan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen	170
Gambar 15. Wawancara dengan Pengelola Budidaya Udang Berbasis Kawasan	170
Gambar 16. Wawancara dengan PT. Adhikarya	171
Gambar 17. Wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Petanahan	171
Gambar 18. Wawancara dengan Kepala Desa Tegalretno	172
Gambar 19. Wawancara dengan Kelompok Nelayan Desa Tegalretno	172
Gambar 20. Wawancara dengan Masyarakat Terdampak.	173
Gambar 21. Wawancara dengan Pekerja di <i>Shrimp Estate</i>	173
Gambar 22. Wawancara dengan Masyarakat Desa Tegalretno	174

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian	170
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Pada Pemerintah Desa Tegalretno	175
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Pada Pemerintah Kecamatan Petanahan	176
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Pada Pimpinan Budidaya Udang Berbasis Kawasan	177
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan.....	178
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Pada PT. Adhikarya	179
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Pada Ketua Nelayan Desa Tegalretno	180
Lampiran 8. Surat Tanggapan Persetujuan Penelitian dari BUBK (Budidaya Udang Berbasis Kawasan)	181
Lampiran 9. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol untuk Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan	182
Lampiran 10. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	183

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah pemberdayaan masyarakat atau *empowerment* kerap kali dikaji secara sosiologis. Konsep tersebut pun didefinisikan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang memahami arti pemberdayaan sebagai upaya menolong orang yang tidak berdaya menjadi berdaya secara mandiri oleh pihak luar (Tohari, 2019). Kelompok lemah dan *marginal* seperti buruh tani, masyarakat miskin, orang desa, masyarakat primitif, dan lain sebagainya diberdayakan oleh pemerintah, LSM lokal, perusahaan, dan institusi lain yang mempunyai kuasa sehingga mereka mengerahkan strategi, cara, alat-alat, sumber daya, pengetahuan, dan modal guna membuat kelompok lemah menjadi mampu dan sejajar dengan kelompok kuat. Pendapat lain mengatakan bahwa pemberdayaan sebagai proses menswadayakan, memandirikan, mengembangkan, memperkuat posisi tawar menawar kelompok lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Mujianto, 2019).

Wacana tersebut perlu diletakkan kembali posisi pemberdayaan masyarakat pada ruang lingkup politik. Pemberdayaan masyarakat diinterpretasikan sebagai usaha perjuangan masyarakat untuk menuju kemandirian dengan mengembangkan *skill*, pengetahuan, dan sebagainya. Dalam hal ini, sebuah kelompok yang terpinggirkan atau tertindas atau tak berdaya melakukan berbagai cara sebisa mereka untuk menjadi berdaya sesuai arahan kelompok yang memiliki daya, kuasa, atau kekuatan. Dari gambaran tersebut, dapat dilihat bahwasanya baik kelompok marginal maupun kelompok dominasi ingin sama-sama menjadi pewujud keberdayaan. Hal ini menjadikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai kontestasi politik antara kelompok marginal (masyarakat desa) dengan kelompok dominasi atau kelompok yang memiliki kekuatan (pemerintah, institusi lainnya) agar masyarakat memiliki kemandirian dan dapat memilih tujuan hidupnya masing-masing (Tohari, 2019).

Pemberdayaan ini menjadi istilah baru dari gagalnya paradigma pembangunan yang lama. Selama ini, pembangunan menempatkan masyarakat sebagai objek atau penerima segala program pemerintah. Akan tetapi, hadirnya paradigma pembangunan yang baru yang terkonsep dalam pemberdayaan, berorientasi pada masyarakat serta institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Artinya, pemberdayaan sebagai

pembangunan yang desentralistik, partisipatoris, dan demokratis. Dalam hal ini, masyarakat akan menjadi subjek atau pelaku (*people centered*) yang memulai, mengelola, serta menikmati pembangunan. Sementara pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan ruang untuk menumbuhkan kemandirian, prakarsa, dan partisipatif masyarakat lokal. Pemberdayaan tentu mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan maupun mengontrol penerapan keputusan tersebut. Oleh sebab itu, konteks politik dalam pemberdayaan masyarakat adalah mentransformasikan politik dengan aksi nyata yang menghadirkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, dalam prosesnya terdapat pertarungan politik *stakeholders* dengan masyarakat desa itu sendiri (Faizal, 2015).

Studi tentang pemberdayaan masyarakat ini telah diteliti dan dikaji oleh para sarjana terdahulu dalam perspektif sosiologis. Pada studi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianus Nardin (2019), Afriska Saputri (2019), Novie Istoria Hidayah (2017), Boy Sandi (2018), dan Pitri Nur Hidayah (2017) menemukan hasil yang memfokuskan kajian pemberdayaan dari segi program dan keberlangsungan program tersebut. Secara garis besarnya bahwa berbagai program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah desa telah diterapkan untuk memandirikan

masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat desa. Program pemberdayaan tersebut diantaranya BUMDes, pengembangan desa wisata, program kampung tematik, pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sampah maupun bank sampah. Program tersebut tentunya didukung oleh pemerintah desa selaku fasilitator dengan memberikan bantuan modal, pendampingan, sosialisasi, dan pelatihan pada masyarakat (Nardin, 2019). Hal ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mana mereka bersemangat dan termotivasi sehingga berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan tersebut (Saputri, 2019). Selain itu, adanya program pemberdayaan berimplikasi pada aspek sosial maupun ekonomi masyarakat (Nurhidayah, 2017). Meskipun demikian, masih banyak program pemberdayaan masyarakat yang nyatanya hanya formalitas dan simbolisasi perpolitikan serta terdapat hambatan pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakjelasan keberlanjutan program, minimnya fasilitas, rendahnya kualitas SDM, bahkan program pemberdayaan yang hanya ada saat menjelang pemilihan umum (Rahayu, 2017). Pada akhirnya, program pemberdayaan hanya sebagai realisasi kerja *stakeholder* dan tidak adanya dinamika dari masyarakat untuk program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Secara garis besar, terdapat kesamaan topik kajian peneliti terdahulu yang telah diulas sebelumnya dengan penulis yakni pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam hal ini yang menjadi arah kajian penulis adalah pemberdayaan masyarakat desa dari sudut pandang politik. Dikatakan demikian, karena penulis ingin mendalaminya dan mengambil sudut pandang yang berbeda dimana banyak penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan masyarakat dikaji secara sosiologis. Pada ulasan awal telah disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi arena kontestasi politik antara pemangku kepentingan dengan masyarakat dimana keduanya sama-sama ingin dekat pada pewujud keberdayaan. Fokus kajian ini adalah studi pemberdayaan masyarakat dalam salah satu program yaitu pembangunan *shrimp estate*. Kajian tersebut dilaksanakan di Desa Tegalretno yakni salah satu desa yang letaknya di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Desa tersebut dekat dengan pesisir sehingga masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, penambak udang, dan petani. Desa Tegalretno ini memiliki potensi tambak udang karena letaknya yang strategis dengan pesisir. Oleh sebab itu, desa tersebut menjadi salah satu desa dari ketiga desa yang dijadikan implementasi program pemberdayaan dari pemerintah pusat. Programnya adalah

pembangunan *shrimp estate* (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi).

Kawasan *Shrimp Estate* ini merupakan kawasan tambak udang yang dibangun pertama kali di Indonesia dan bertempat di Kabupaten Kebumen. Pembangunan tersebut adalah hasil kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada bulan Agustus 2021 lalu. Hal itu sebagai bentuk implementasi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan budidaya perikanan untuk meningkatkan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan yang mana sejalan dengan target peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 250% pada tahun 2024 (Luthfiana, 2021).

Shrimp estate ini adalah skema budidaya udang berskala besar dimana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Dalam proses produksi nantinya didukung oleh teknologi agar hasil panen lebih optimal, mencegah penyakit, serta lebih ramah lingkungan yang selaras dengan konsep budidaya terintegrasi. Pembangunan *shrimp estate* ini telah dimulai sejak awal tahun 2022 yang menggunakan 100 ha sepanjang bibir pesisir pantai selatan dan melewati tiga desa yakni Desa Jogosimo, Desa Karanggadung, dan Desa Tegalretno. Pembangunan kawasan *shrimp estate* ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi udang

yang biasanya hanya 2 juta ton kini bisa 40 juta ton sehingga dapat diekspor ke luar negeri (Luthfiana, 2021).

Namun, pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan *shrimp estate* tidaklah berjalan dengan mudah karena terdapat polemik yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah lahan yang digunakan dalam pembangunan berdekatan dengan lahan pemerintah yang menjadi hak pakai masyarakat sekitar desa tersebut untuk menambak udang. Selain itu, terdapat kebun milik pemerintah namun masyarakat dapat menggunakannya sebagai *penderes* kelapa dan menjadi mata pencaharian mereka. Pemerintah desa telah menyelenggarakan sosialisasi pembangunan *shrimp estate* sekaligus memecahkan permasalahan lahan sebagai bentuk proses pelibatan masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak hadir karena khawatir dan belum mau menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah. Masyarakat takut kehilangan mata pencahariannya sebagai penambak udang akibat dampak dari pembangunan *shrimp estate*. Selain itu, masyarakat juga meminta kepada pemerintah untuk mengganti tanah masyarakat yang digunakan dalam pembangunan kawasan *shrimp estate*. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat sekitar terutama penambak udang serta

masyarakat sekitar kawasan *shrimp estate*. Hal tersebut dikhawatirkan bahwasanya tenaga lokal yang nantinya digunakan bukan dari warga desa Tegalretno mengingat kawasan *shrimp estate* akan menjadi industri dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Oleh karena itu, studi ini dilakukan dengan memfokuskan analisa pada dua arena kajian yakni pertama, bagaimana proses pemberdayaan yang terjadi di tengah-tengah polemik adanya program pembangunan *shrimp estate*. Dalam hal ini, pemerintah pusat yang mencanangkan program pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan *shrimp estate* di Desa Tegalretno menjadikan masyarakat desa tersebut terberdaya atau diberdayakan karena dinilai belum mampu meningkatkan kemandiriannya. Mereka harus mengikuti program tersebut karena nantinya dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar juga negara. Kedua, bagaimana kontestasi politik antara *stakeholder* dan masyarakat dimana pemerintah menginginkan pembangunan ini sebagai bentuk pemberdayaan yang nantinya menjadikan masyarakat mandiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tegalretno. Dilain pihak, masyarakat yang terkena imbas pembangunan *shrimp estate* tidak mau menyerahkan lahannya karena khawatir kehilangan mata pencaharian.

Dengan demikian, wacana pemberdayaan masyarakat yang bertujuan memandirikan dan memperbaiki hidup ke arah yang lebih baik dikaitkan dengan polemik pemberdayaan di atas melalui pembangunan *shrimp estate* menjadi kajian yang menarik bagi penulis termuat dalam judul “Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan *Shrimp Estate* (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegalretno, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen”. Topik tersebut perlu dikaji karena memiliki arti penting dalam bidang politik khususnya pemberdayaan masyarakat yang selama ini hanya dikaji secara sosiologis sehingga perlu diletakkan kembali dalam ranah politik. Selain itu, adanya kajian ini mampu memberikan pemahaman bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima program tetapi juga subjek dari program sehingga harus terlibat dalam pembangunan kawasan *shrimp estate* di Desa Tegalretno.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan kawasan *shrimp estate* di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen?

2. Bagaimana kontestasi politik para *stakeholder* pada proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan *shrimp estate* di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan kawasan *shrimp estate* di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk menganalisa bagaimana kontestasi politik para *stakeholder* pada proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan *shrimp estate* di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, manfaat yang diperoleh secara teoretis yaitu sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan konseptual dan teori pada kajian Ilmu Politik.
- b. Menambah dan memperkaya literatur pada bidang *empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks politik.

Sementara, manfaat secara praktisnya yang didapatkan dari penelitian yakni sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau rekomendasi atas permasalahan pada program pemberdayaan melalui pembangunan *shrimp estate*.
- b. Bagi masyarakat, dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi bidang *empowerment* atau pemberdayaan dalam proses pembangunan kawasan *shrimp estate* di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.
- c. Bagi peneliti lain, tentu dapat dijadikan rujukan atau referensi penelitian yang akan datang serta sebagai penyempurna penelitian sebelumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan skripsi ini, sebelum penulis melakukan studi penelitian, penulis menggali informasi dari penelitian terdahulu sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis atau biasa disebut *literature review*. Upaya mengkaji penelitian terdahulu ditujukan agar dapat melihat sudut pandang kajian yang berbeda sehingga penulis dapat memposisikan hasil penelitiannya. Topik mengenai pemberdayaan masyarakat telah banyak dikaji oleh para sarjana sebelumnya. Topik tersebut akan dikaji dalam dua tema yakni pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan yang berbasis pemberdayaan.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Isu pemberdayaan masyarakat telah banyak dikaji para sarjana yang berfokus pada perpesktif sosiologis. Kajiannya berupa bagaimana program-program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah desa untuk masyarakat maupun kelompok tertentu dapat berjalan. Oleh sebab itu, masyarakat hanya mengikuti program dan jika tidak berjalan maka tidak ada keberlanjutan dari program tersebut. Hal ini dapat dilihat pada studi berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di TPST 3R-Desa Mulyo Agung*” oleh Boy Shandi Sahputra dan Nanang Bagus Srihardjono (2018). Pengelolaan sampah menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat yang berada di Desa Mulyo Agung dan dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat desa tersebut. Studinya mengungkap bahwa program tersebut berjalan baik karena adanya dukungan modal dan kegiatan pelatihan dari pemerintah desa dirasa cukup untuk memberdayakan masyarakat Desa Mulyo Agung. Terlebih antusias dari warga untuk mengikuti program tersebut dan dinilai dapat meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Oleh sebab itu, masyarakat desa merasa puas dengan kinerja pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat (Srihardjono, 2018).

Program pemberdayaan semacam diatas mengenai pengelolaan sampah namun dengan cara yang berbeda adalah pendirian bank sampah di Desa Palbapang juga menjadi metode untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi pemberdayaan melalui bank sampah dilakukan oleh Pitri Nur Hidayah (2017) tentang “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul*”. Bank sampah ini menjadi salah satu program pemerintah desa karena melihat sampah belum dikelola dengan baik. Kegiatannya pun hanya berupa sosialisasi, penabungan bank sampah, membuat kerajinan, pemilihan sampah, dan sebagainya. Pemberdayaan yang dikelola oleh pengurus ini terkendala karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dan pemerintah desa yang tidak memperhatikan program pemberdayaan tersebut. Terlebih, bank sampah ini hanya dikelola kelompok kecil sehingga tidak berjalan maksimal dan keberlanjutan program tidak cukup jelas (Nurhidayah, 2017).

Biasanya program pemberdayaan sebagai kebijakan *stakeholder* diperuntukkan pada masyarakat desa atau kelompok kecil di desa guna memandirikan masyarakat. Salah satunya adalah program BUMDes di Desa Pesanggrahan yang dikaji Yulianus Nardin (2019) berjudul “*Kebijakan*

Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDes". Peneliti berargumen bahwasanya pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan di desa harus menetapkan kebijakan pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pendirian BUMDes sebagai program pemberdayaan di Desa Pesanggrahan dengan menerapkan lima strategi pemberdayaan berupa mengembangkan sumber daya manusia, memberikan modal, mengembangkan kelembagaan, pengembangan usaha produktif, serta menyediakan informasi tepat guna (Nardin, 2019). Tak hanya BUMDes, adanya Kampung Tematik Jajan Pasar di Kota Semarang juga sebagai program pemberdayaan dari *stakeholder* desa yang dikaji Afriska Yoga Saputri dengan judul "*Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur)*" (2019). Pada program tersebut terdapat pelatihan maupun sosialisasi mengenai perubahan pembuatan jajan pasar, dan sebagainya. Namun, baik program BUMDes atau kampung tematik jajan pasar masih mengalami hambatan dengan kurang fasilitas,

sumber daya manusia yang belum memadai, dan lain-lain (Saputri, 2019).

Pemerintah desa juga mencanangkan pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi desa melalui pengembangan desa wisata di Desa Jatimulyo, Yogyakarta oleh Novie Istoria dan Sugi Rahayu (2017) berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Dalam studinya tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pengembangan desa wisata di Desa Jatimulyo diantaranya pemberian modal dari PNPM Mandiri Pariwisata, pembangunan fasilitas, melakukan pendampingan, serta menguatkan kemitraan antara pemerintah Desa Jatimulyo dengan Dinas Pariwisata Kulon Progo, perguruan tinggi, dan sebagainya. Program tersebut didukung karena adanya potensi wisata yang banyak, respon positif, dan bantuan modal. Sayangnya, kualitas SDM yang masih rendah, belum adanya peraturan maupun kebijakan tentang Desa Wisata Jatimulyo, serta ketidakjelasan pencatatan kepariwisataan masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa untuk mencari solusinya (Rahayu, 2017).

2. Partisipasi dalam Pembangunan yang Berbasis Pemberdayaan

Pada program pemberdayaan baik itu kegiatan maupun pembangunan tentu melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Kajiannya berfokus bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan yang berbasis pemberdayaan. Salah satunya, kajian dari Patriane Marinda, dkk (2019) berjudul “*Upaya Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Kampung Glitung Kota Malang*”. Studinya ini mengungkapkan bahwa Kampung Glitung yang menerapkan program *go green* sebagai implementasi pembangunan berkelanjutan mengalami kendala terkait pengelolaannya. Partisipasi masyarakat dinilai masih minim karena pihak pengelola tidak memberikan kewenangan pada masyarakat biasa dan hanya melibatkan Suku Dalu sehingga masyarakat bersikap acuh terhadap program tersebut (Patriane Marinda, 2019). Hal serupa juga terjadi pada program pemberdayaan di Kampung Adainasnosen yang dikaji Musdalifah dan Rifdan (2022) berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi di Kampung Adainasnosen*”. Dikatakan demikian karena masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan

pemberdayaan serta pemerintah hanya menjalankan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rifdan, 2022).

Tak hanya rendahnya partisipasi, program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masih dipandang sebagai formalitas dalam perpolitikan menjelang pemilihan umum. Hal ini dikaji oleh oleh Sandra Hasba dan Syahrul (2018) mengenai “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan : Kasus Kelurahan Bungguosu, Konawe*”. Peneliti berpendapat bahwa pada Desa Bungguosu, partisipasi dalam pembangunannya belum menggerakkan masyarakat untuk berpikir jangka panjang mengenai pembangunan desa. Masyarakat masih berpikir bahwa program pembangunan ini karena mendekati momentum pemilihan kepala daerah (Syahrul, 2018). Meskipun demikian, partisipasi pembangunan tetap terlihat tinggi di daerah lainnya seperti kajian dari Achmad Fatchul Jauhari (2018) berjudul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Kampung Pelangi di Kota Semarang*”. Argumennya menunjukkan bahwa partisipasi di Kampung Pelangi cukup tinggi dimana masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan keberlanjutan program pemberdayaan. Selain itu, masyarakat menghadiri rapat sosialisasi, memberikan saran,

berkontribusi tenaga maupun dana, dan lain-lain (Astuti, 2018). Pendapat serupa dari Gusni Vitri dan Hazmal Herman (2018) tentang “*Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Pemberdayaan di Provinsi Sumatera Barat*”. Studinya mengungkapkan bahwa masyarakat berperan dalam pembangunan jalan, sarana air minum, dan sanitasi. Masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari tahap persiapan (penentuan lokasi, membentuk LKM dan KSM), perencanaan (menyusun proposal), melaksanakan pembangunan, sampai tahap *pasca* pembangunan. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut terdapat hambatan seperti SDM yang terbatas, konsultan kurang memahami program, dan sebagainya (Herman, 2018).

Berbagai penemuan studi penelitian dari para sarjana terdahulu yang telah direview oleh penulis dapat diketahui persamaan maupun perbedaan dengan topik penelitian yang dikaji penulis. Dari temuan jurnal di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa para sarjana terdahulu lebih banyak mengkaji pemberdayaan secara sosiologis dimana terdapat beberapa program pemberdayaan maupun pembangunan seperti BUMDes, desa wisata, kampung tematik, dan sebagainya yang dicanangkan pemerintah desa untuk masyarakat guna

meningkatkan kemandirian. Dalam program pemberdayaan, masyarakat pun berperan dan terlibat aktif untuk mengikutinya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring serta evaluasi dari program tersebut. Kajian tersebut lebih banyak masyarakat masih menjadi penerima manfaat dari program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah. Hal tersebut tentu berbeda dengan kajian yang penulis lakukan mengenai *empowerment*.

Studi penelitian diatas memiliki kesamaan dengan kajian penulis yakni mengenai *empowerment* atau pemberdayaan masyarakat. Namun, terdapat pembeda dengan kajian penelitian yang dilakukan penulis yang mana meletakkan posisi pemberdayaan masyarakat dalam konteks politik dimana terdapat kontestasi politik para *stakeholder* di Desa Tegalretno dengan masyarakat yang diberdayakan khususnya penambah udang akibat program pemberdayaan dalam pembangunan *shrimp estate* (Kawasan Budidaya Perikanan Teintegrasi). Dalam hal ini, terdapat usaha perjuangan masyarakat Tegalretno untuk tetap mempertahankan lahannya agar tidak terkena dampak dari proses pembangunan *shrimp estate*. Meskipun demikian pemerintah desa tetap bersikukuh dan bersinergi dengan *stakeholder* lainnya untuk tetap menjalankan program tersebut guna meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Upaya

pelibatan masyarakat telah dilakukan meskipun partisipasinya masih sangat rendah. Dari polemik yang terjadi dimana program pemberdayaan sebagai arena kontestasi politik menjadi hal unik dan pembeda dari kajian-kajian terdahulu dari sarjana sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian terdapat dua jenis penelitian yakni penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan berarti peneliti mengumpulkan data maupun informasi dilakukan secara langsung di lapangan, sementara penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui literatur seperti buku, jurnal, dokumen, pemikiran tokoh, dan sebagainya. Dalam hal ini, kajian penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Maksudnya adalah peneliti melakukan studinya dengan terjun langsung pada objek yang diteliti. Seorang peneliti akan berinteraksi dan berpartisipasi secara langsung dalam sebuah kelompok masyarakat untuk memahami serta mendalami fenomena yang tengah ditelitinya. Penelitian lapangan ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan jelas karena diperoleh secara

langsung dari narasumber maupun informan selaku objek penelitiannya.

Studi penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian kualitatif dimana memiliki makna bahwa data yang diuraikan berbentuk kata-kata atau penjelasan dan gambar bukan angka-angka. Seorang ahli yakni Bogdan dan Taylor mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang *outputnya* berupa data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang-orang serta perilaku yang diamati. Sementara, penelitian deskriptif yaitu bentuk penelitian dengan menunjukkan deksripsi atau gambaran dari fenomena yang ada baik alamiah maupun rekayasa manusia (Moleong, 2007). Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti tindakan, perilaku, persepsi, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan secara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan metode ilmiah (Moleong, 2007).

Pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan tersebut untuk mempelajari, menerangkan, serta menginterpretasi suatu kasus dalam konteks

alamiah tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang sifatnya rinci, komprehensif, intensif, dan mendalam serta ditujukan untuk menelaah sebuah kasus atau fenomena tertentu (Hidayah, 2019). Pendekatan studi kasus berpusat pada satu objek yang diangkat dan dikaji menjadi kasus secara mendalam untuk diteliti realitas dibalik fenomena. Dalam hal ini, perlunya analisis yang tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan fenomena tersebut sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat akurat.

Pada studi ini, penulis mengambil jenis penelitian kualitatif deskriptif berbasis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Penulis mengkaji fenomena pembangunan kawasan *shrimp estate* yang ada di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen sebagai politik pemberdayaan masyarakat desa dan terjun secara langsung di desa tersebut. Alasan kasus ini diangkat karena pembangunan kawasan *shrimp estate* akan menjadi kawasan tambak udang terbesar di Indonesia tentunya yang akan berdampak pada masyarakat khususnya warga Desa Tegalretno. Hal tersebut sebagai politik pemberdayaan masyarakat dimana didalamnya terdapat polemik dan usaha masyarakat

memperjuangkan kemandirian tersebut. Oleh sebab itu, fenomena tersebut ditelaah secara mendalam dan dideskripsikan berupa uraian atau kata-kata.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J. Moleong berpendapat bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif, sumber data utamanya adalah kata-kata maupun tindakan, sedangkan data tambahannya berupa dokumen, dan sebagainya (Moleong, 2007). Sumber data adalah data subjek darimana data itu diperoleh. Sumber dan jenis data secara garis besar dibagi menjadi dua macam yakni data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama dengan teknik pengambilan data seperti interview, observasi, dan sebagainya. Pada studi penelitian, penulis menggunakan data dari hasil wawancara dari informan atau narasumber serta observasi yang dilaksanakan di Budidaya Udang Berbasis Kawasan Desa Tegalretno.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber tidak langsung yang

mana berupa dokumentasi dan arsip resmi. Dalam studi ini, penulis menggunakan data sekunder berupa buku, skripsi, thesis, jurnal, *website* desa, dokumen, dan sebagainya. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menunjang hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data relevan yang didapatkan dalam penelitian tentu diuji keabsahan datanya dengan menggunakan triangulasi data agar data tersebut valid. Triangulasi dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini penjelasannya :

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Salah satu pendapat dari Zainal Arifin yang dikutip dalam bukunya Kristanto yakni observasi didahului dengan pengamatan kemudian melakukan pencatatan secara sistematis, objektif, rasional, dan logis terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi sebenarnya (Kawasati, 2019). Tujuan empiris dari observasi adalah deskripsi dimana digunakan untuk memberikan dan menjelaskan gejala-gejala yang terjadi. Dari gejala tersebut diinterpretasikan secara teoritis dan rinci sehingga mendapatkan gambaran

akan penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

Dari berbagai macam observasi, peneliti menggunakan observasi partisipasi yakni teknik pengamatan secara langsung dilapangan dengan melibatkan dirinya dengan kelompok yang diteliti baik sebagai pengamat maupun partisipasi dengan belajar pada kelompok tersebut. Dalam hal ini, peneliti yang sedang melakukan observasi turut andil pada bagian kehidupan masyarakat yang diobservasi. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh dan mendalam tentang topik penelitian yang tengah dikaji. Peneliti menyelidiki perilaku individu dalam kehidupan sosial seperti cara hidup, hubungan dengan masyarakat, dan sebagainya. Pada penelitian ini, penulis terjun langsung di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen sebagai objek observasi penelitian dimana penulis mengobservasi pembangunan kawasan *shrimp estate*, berpartisipasi maupun pengamat pada kegiatan rapat atau sosialisasi pembangunan, serta kegiatan para penambak udang di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi bersama sumber data primer melalui dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Definisi wawancara menurut Lexy J. Moleong yaitu percakapan dengan tujuan tertentu yang mana dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2007). Tujuan dilakukannya wawancara agar seorang peneliti memperoleh data yang banyak dari opini, perasaan, emosi dari informan sehingga dapat dipahami budayanya melalui ekspresi atau bahasa yang diberikan. Pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*) yang bermaksud bahwa pewawancara dan informan melakukan wawancara serta saling bertatap muka dengan menggunakan pedoman maupun tanpa pedoman dimana informan terlibat dalam kehidupan sosial yang lama. Hal ini ditujukan untuk menggali informasi secara detail, rinci, dan mendalam yang berkaitan pada topik penelitian.

Teknik pelaksanaan wawancara yang digunakan yakni secara sistematis dan terstruktur. Maksudnya adalah peneliti memakai pedoman wawancara dengan menyusun beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada informan atau narasumber. Hal ini agar arah pembicaraan tidak melebar dan terarah sehingga apabila jawaban narasumber tidak sesuai konteks dapat dikembalikan seperti semula. Studi penelitian yang diambil penulis menggunakan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara secara sistematis dan terstruktur untuk ditanyakan pada informan seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kecamatan, Pengelola BUBK (Budidaya Udang Berbasis Kawasan Kebumen), Kepala Desa Tegalretno, tokoh masyarakat Desa Tegalretno seperti Ketua Perkumpulan Nelayan, para tokoh agama, dan masyarakat penambak udang yang terlibat dalam kajian politik pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan *shrimp estate*. Para informan atau narasumber tersebut akan diberi pertanyaan seputar pembangunan *shrimp estate*, dampak yang dirasakan masyarakat sekitar dengan adanya pembangunan tersebut,

kontestasi politik para *stakeholder* pada pembangunan kawasan *shrimp estate*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara dalam mengumpulkan data dari dokumen, arsip, yang penting sesuai kebutuhan penelitian untuk ditelaah informasinya guna mendukung penelitian. Jadi, dokumentasi ini tidak hanya berupa pengambilan foto sebagai bukti pada penelitian akan tetapi terdapat dokumen atau arsip guna dianalisa. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen dari Desa Tegalretno berupa data kependudukan untuk menggambarkan desa tersebut serta dari pengelola BUBK seperti anggaran untuk pembangunan *shrimp estate*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dikatakan sebagai upaya menata hasil observasi, wawancara, dan lainnya agar peneliti memahami dan dapat menyajikannya sebagai temuan pada orang lain. Pelaksanaan analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan pasca masuk lapangan. Dalam menganalisis data terdapat tiga alur kegiatan sebagaimana pendapat dari Milles dan Huberman yakni sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengolahan data kasar yang terjadi selama di lapangan. Catatan tersebut dipilah-pilih, disederhanakan, diringkas, dan menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Hasil pengumpulan data di ringkas dalam konsep, kategori, dan tema-tema.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan menyusun dan mendeskripsikan kumpulan-kumpulan informasi sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan (Rijali, 2018). Penyajian data sangatlah beragam, namun dalam penelitian kualitatif disajikan berupa tulisan atau kata-kata bentuk teks naratif. Hal tersebut ditujukan guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan sebagai hasil dari pengumpulan data, penjelasan dalam pembahasan, dan sebagainya harus diverifikasi atau ditinjau kembali baik dari makna maupun kebenaran kesimpulan yang telah disepakati oleh tempat penelitian.

Pada analisis data yang dilakukan oleh penulis tidak jauh berbeda dengan kegiatan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya yakni sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mencatat data atau informasi yang didapat dari sumber data primer maupun sekunder diantaranya wawancara, observasi, buku, jurnal, dan sebagainya.
- b) Melakukan reduksi data dengan menyisihkan dan memilah data yang kasar dan tidak relevan.
- c) Menyajikan data hasil temuan penulis dalam bentuk teks naratif.
- d) Menganalisa hasil temuan, menarik kesimpulan, serta memverifikasi data agar mendapatkan data yang valid.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dikatakan sebagai tata cara atau urutan rencana laporan penelitian yang ditulis secara naratif. Pada sistematika penulisan terdapat rangkaian dan struktur bab dan sub bab pada penyusunan skripsi yang menunjukkan hubungan logis dan sistematis. Hal tersebut bertujuan agar skripsi yang dihasilkan tersusun dengan baik, rapi, dan benar. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi yang telah sesuai pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang terdiri dari enam bab dengan rincian :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Ulasan diatas telah menjelaskan latar belakang mengenai tema yang diangkat penulis yakni politik pemberdayaan masyarakat desa dengan studi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan *shrimp estate* di Desa Tegalretno. Kemudian, penulis merumuskan dua pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun tujuan dan manfaat penelitian dipaparkan dari segi teoretis maupun praktis. Penulis juga mereview penelitian yang telah dilakukan oleh sarjana lain guna menarik sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya atau dikenal dengan istilah tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik atau metode untuk mengumpulkan data dan menjadi bahan analisa.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab kedua memaparkan uraian teoretis yang relevan dengan objek penelitian yang mana penelitian ini akan mengkaji teori *empowerment* atau pemberdayaan masyarakat dan CDA (*Critical Discourse Analysis*). Sebelum merujuk pada teori, penulis mengawalinya dengan sejarah pemberdayaan masyarakat kemudian memaparkan teori pemberdayaan masyarakat dalam bukunya Mansour Fakih mengenai “*Transformasi Sosial*”, serta buku penunjang lainnya yang masih memiliki korelasi dengan teori tersebut. Selain itu, penulis memaparkan teori CDA (*Critical Discourse Analysis*) yang ditulis oleh Haryatmoko dan Norman Fairclough sebagai bahan untuk menganalisa hasil penelitian dengan teori tersebut.

BAB III LANDSKAP DESA TEGALRETNO DAN KAWASAN *SHRIMP ESTATE*

Bab ketiga memuat lanskap secara umum tentang objek yang diteliti. Lanskap tersebut meliputi sejarah desa, kondisi geografis dan demografi, struktur sosial budaya, struktur sosial ekonomi, serta struktur sosial politik. Dalam hal ini, penulis

menggambarkan kondisi Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen serta lanskap pembangunan kawasan *shrimp estate* yang menjadi objek penelitian.

BAB IV PRAKTIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN *SHRIMP ESTATE*

Bab keempat menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang tertera pada bab pertama. Dalam hal ini, akan dijawab pertanyaan pertama mengenai masyarakat yang diberdayakan dari pembangunan kawasan *shrimp estate* di Desa Tegalretno. Argumen atau pendapat dari kelompok yang menambak udang maupun masyarakat Desa Tegalretno sebagai subjek yang diberdayakan dalam pembangunan *shrimp estate* dianalisa dan dinarasikan secara deskriptif. Kemudian, hasil pembahasan tersebut akan dikorelasikan dengan teori yang telah diulas di atas yakni teori pemberdayaan masyarakat.

BAB V KONTESTASI POLITIK *STAKEHOLDER* PADA PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berbeda dengan bab keempat, pada bab kelima ini berisikan jawaban atas rumusan masalah yang kedua yakni kontestasi politik para *stakeholder* pada pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan *shrimp estate*. Dalam hal ini, data yang telah dikumpulkan dari para informan atau narasumber seperti Kepala Desa Tegalretno maupun tokoh masyarakat Desa Tegalretno selaku *stakeholder* yang dekat dengan masyarakat diulas dan dipaparkan guna mengetahui kontestasi politik yang terjadi pada pembangunan *shrimp estate* sebagai program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah. Pada hasil pembahasan tersebut juga akan dikorelasikan dengan teori CDA untuk melihat bagaimana wacana dalam kontestasi politik *stakeholder*.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan adalah hasil inti penelitian yang berupa jawaban teoretis maupun empiris berdasarkan penelitian. Sementara, saran atau rekomendasi yakni masukan atau pandangan peneliti untuk berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar

dapat ditindaklanjuti hasil penelitian tersebut dengan kebijakan atau penelitian lanjutan. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan tentang politik pemberdayaan masyarakat desa studi pelibatan masyarakat Tegalretno dalam pembangunan *shrimp estate*. Sedangkan perihal saran, peneliti memberikan pandangannya pada pemerintah Desa Tegalretno serta masyarakatnya tentang program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan *shrimp estate* di desa tersebut. Namun, tidak hanya kesimpulan maupun saran yang diberikan oleh penulis tetapi juga korelasi antara teori dengan hasil penelitian yang ada.

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bab kedua, penulis memaparkan kerangka teori yang nantinya digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisis atas jawaban pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, terdapat dua teori yakni teori pemberdayaan masyarakat dan teori CDA (*Critical Discourse Analysis*). Teori pemberdayaan masyarakat yang diulas diawali dengan melacak sejarah konsep pemberdayaan masyarakat dimana di dalamnya terdapat arti dari pemberdayaan serta perbedaan sudut pandang mengenai pemberdayaan masyarakat yang memunculkan sebuah paradigma. Kemudian, terdapat teori pemberdayaan masyarakat sebagai transformasi sosial yang merujuk pada tokoh yakni Mansour Fakih dimana ketidakadilan akibat adanya dominasi suatu kelompok perlu dilakukan perubahan untuk menuju tatanan kehidupan yang lebih baik. Teori pemberdayaan masyarakat digunakan untuk menganalisa bagaimana dominasi kelompok kuat terhadap kelompok marginal yang kemudian kelompok marginal ini melakukan perubahan dan melibatkan dirinya pada proses pemberdayaan sebagai subjek atau pelaku (*people centered*).

Penulis juga memaparkan teori CDA (*Critical Discourse Analysis*) yang di dalamnya terdapat beberapa

bagian yaitu konsep CDA (*Critical Discourse Analysis*), fungsi CDA (*Critical Discourse Analysis*) bagi masyarakat, paradigmatik CDA (*Critical Discourse Analysis*), teori CDA (*Critical Discourse Analysis*) Norman Fairclough, model analisis CDA (*Critical Discourse Analysis*) Norman Fairclough, dan cara kerja model analisis CDA (*Critical Discourse Analysis*) Norman Fairclough. Teori CDA yang diulas merujuk pada konsep dari Norman Fairclough dimana dalam menganalisa sebuah wacana menggunakan tiga dimensi yakni teks, praktik diskursus, dan praktik sosial kultural. Penggunaan teori CDA (*Critical Discourse Analysis*) bertujuan untuk melihat bagaimana suatu bahasa sebagai praktik kekuasaan dari para *stakeholder*. Pemaparan kedua teori tersebut secara rinci yakni sebagai berikut :

A. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Melacak Sejarah Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan atau diterjemahkan dalam Bahasa Inggris yakni *empowerment*, sementara *empower* berarti sedang memberdayakan. Merriam Webster dan Oxford English Dictionary memandang bahwa kata *empower* memiliki dua pengertian yaitu : (1) *to give power* atau *authority* yang bermakna memberikan kekuasaan, memberikan kewenangan atau otoritas pada pihak lain, (2) *to give ability* atau *enable* berarti memberikan kemampuan atau

keberdayaan (Hasan & Azis, 2018). *Empowerment* merupakan sebuah konsep yang lahir dari sebagian pemikiran orang Barat. Kemunculan konsep pemberdayaan diperkirakan sejak dekade 70-an dan mengalami perkembangan hingga sekarang. Konsep *empowerment* sendiri lahir bersamaan dengan kemunculan konsep elit, kekuasaan, legitimasi, gerakan populis, dan *civil society*. Pandangan lain mengatakan bahwa konsep pemberdayaan lahir pada paruh abad ke-20 bersama aliran *post-modernisme* yang menekankan sikap dan pendapat dimana berorientasi pada anti sistem, anti determinisme, dan anti struktur kemudian diaplikasikan dalam kekuasaan (Widayanti, 2012).

Empowerment mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang-orang mulai mempertanyakan makna ‘pembangunan’ itu sendiri. Di Eropa, kemunculan pemberdayaan terjadi ketika industrialisasi menciptakan masyarakat yang menguasai faktor produksi dan masyarakat pekerja yang dikuasai. Sementara di negara-negara berkembang, konsep pemberdayaan muncul ketika pembangunan mengakibatkan adanya kesenjangan sosial, degradasi sumber daya alam, alienasi masyarakat, kemiskinan, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh penguasaan

faktor-faktor produksi dari orang yang berkuasa (Hasan & Azis, 2018).

Konsep pemberdayaan muncul akibat gagalnya paradigma pembangunan. Dikatakan demikian, karena pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan pembangunan diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan, menghapus kemiskinan, menghapus kesenjangan, serta memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, isu pembangunan tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Maka dari itu, muncullah *maldevelopmentalisme* atau pembangunan yang salah. Kegagalan pembangunan terjadi karena pendekatannya yang masih bersifat tradisional seperti *top down*, *inductive*, *capital intensive*, *transplantative planning*, *west-based technological transfer*, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemilihan strategi pembangunan yang kurang tepat berimplikasi pada ketergantungan dan keterbelakangan yang terjadi pada negara berkembang. Dengan demikian, *empowerment* berusaha mengisi dan mengikat tuntutan-tuntutan yang gagal pada pembangunan serta menawarkan strategi seperti *bottom up*, *community based*, dan *participative* (Widayanti, 2012).

Konsep *empowerment* atau pemberdayaan masyarakat yang lahir akibat adanya *maldevelopment* atau kegagalan pembangunan memunculkan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi oleh paradigma yang berpengaruh pada teori-teori dimana nantinya akan digunakan untuk menganalisa realita sosial. Teori mencakup empat fungsi dasar diantaranya penjelasan, prediksi, kontrol, serta pengelolaan perubahan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk praktik empat fungsi dasar tersebut yang meliputi penggambaran suatu fenomena atau kejadian, memaparkan sebab-sebab dari fenomena atau kejadian, memperkirakan apa yang terjadi selanjutnya (termasuk apa yang terjadi jika dilakukan intervensi atau tidak melakukan intervensi), dan berusaha mengelola serta mengontrol terhadap perubahan yang terjadi pada segala tingkatan aktivitas masyarakat.

Mansour Fakih berpendapat bahwa banyak hal yang dapat membentuk sebuah teori sehingga dinamakan paradigma. Paradigma memiliki urgensi karena mempengaruhi teori dan realitas sosial. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pandangan atau teori yang sifatnya netral dan objektif melainkan bergantung pada paradigma yang digunakan. Pada konteks *empowerment*,

paradigma berperan untuk membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat sebuah masalah, apa yang dianggap sebagai masalah ketidakberdayaan, apa masalah yang harus dipecahkan serta metode apa yang digunakan untuk memecahkannya. Begitu juga paradigma akan mempengaruhi apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pilih, dan sebagainya. Paradigma akan berpengaruh pada cara pandang seseorang tentang apa yang baik atau buruk, adil atau tidak adil, tepat atau tidak tepat dalam memecahkan suatu masalah melalui program.

Paulus Freire membagi ideologi teori sosial ke dalam 3 jenis kesadaran meliputi *magical consciousness*, *naive consciousness*, dan *critical consciousness*. Pertama, kesadaran magis adalah suatu keadaan dimana tidak adanya kaitan atau hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Dalam hal ini, lebih mengarahkan penyebab masalah dan ketidakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor di luar manusia. Artinya, tidak ada sebab musabab dalam masalah sosial serta tidak mampu memberikan analisa dan kaitan antara sistem dengan struktur pada masalah sosial. Kedua, kesadaran naif dimana melihat aspek manusia sebagai akar penyebab masalah sosial. Sistem dan struktur yang ada sudah benar namun

memerlukan adanya seseorang untuk melakukan perubahan dan mengarahkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan sistem yang benar tersebut. Hal inilah disebut dengan perubahan yang reformatif. Ketiga, kesadaran kritis dimana melihat aspek struktur dan sistem sebagai sumber masalah. Masyarakat mampu mengkritisi ketidakadilan dari sistem dan struktur yang ada, kemudian menganalisa bagaimana seharusnya sistem dan struktur itu bekerja. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki kesempatan dan menciptakan ruang untuk terlibat dalam proses dialog penciptaan struktur yang lebih baik. Kesadaran ini dinamai kesadaran transformatif (Widayanti, 2012).

2. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Transformasi Sosial

Pendefinisian mengenai pemberdayaan masyarakat tidak bersifat tunggal namun beragam pandangan. Menurut Tania Muray Li, pemberdayaan sebagai upaya memperbaiki kehidupan yang lebih baik dimana berbagai program pemberdayaan maupun pembangunan dicanangkan oleh pemangku kepentingan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, memiliki kualitas kehidupan yang baik, menghapus kesenjangan, dan sebagainya. Namun, kehidupan yang lebih baik ini dapat membawa

keberhasilan maupun kegagalan sebagaimana dalam tulisannya yakni satu rencana maupun upaya untuk memperbaiki kehidupan ke arah yang lebih baik guna memakmurkan masyarakat tidak menjamin kemakmuran itu dapat terwujud. Kehendak untuk memperbaiki biasanya dilakukan oleh wakil masyarakat yang melegitimatisi dirinya sebagai orang yang mengetahui bagaimana masyarakat hidup, apa yang yang terbaik dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mengarahkannya (Li, 2012).

Pendapat lain mengenai pemberdayaan masyarakat datang dari JIM Ife yang membagi pandangannya ke dalam beberapa kelompok. Pertama, penganut strukturalis memaknai pemberdayaan sebagai upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, serta eliminasi struktural atau sistem yang opresif. Kedua, kelompok pluralis mengungkapkan pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lainnya. Ketiga, menurut kelompok elitis dimana pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliansi dengan elit-elit tertentu, dan struktur yang elitis. Terakhir, kelompok post-strukturalis

memandang pemberdayaan adalah upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam realitas sosial (Widayanti, 2012).

Dari berbagai pendefinisian pemberdayaan masyarakat diatas, penulis mengulas pemberdayaan masyarakat sebagai transformasi sosial menurut Mansour Fakih untuk menjadi teori dalam menganalisis. Konsep pemberdayaan yang digagas oleh Mansour Fakih dipandang sebagai konsep menuju tatanan kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakadilan yang tidak memanusiakan manusia (dehumanisasi) di tengah tatanan masyarakat. Dehumanisasi ini tidak hanya membawa korban untuk berada dalam kondisi tertindas tetapi juga bagi mereka yang ada di posisi menindas. Senada pada kalimat yang dikutip dalam bukunya Mansour Fakih berjudul *Bebas dari Neoliberalisme* yakni “saat ini kita tengah menyaksikan proses dehumanisasi dan pemiskinan yang terjadi di sekitar kita. Sistem sosial dan budaya yang telah didirikan ternyata adalah suatu sistem yang secara sistematis dapat meruntuhkan hakikat kemanusiaan. Banyak petani terpinggirkan dan tergusur dari sawah tempat mereka bekerja. Kaum miskin kota dan fakir miskin yang tergusur, anak jalanan yang

seharusnya dipelihara oleh negara justru dikejar, ditangkap, serta diperlakukan layaknya kriminal. Kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dijual melalui program privatisasi” (Fakih, 2003). Dengan demikian, dehumanisasi merupakan proses merebut HAM baik dari individu maupun kelompok yang bernuansa eksploitatif di segala aspek kehidupan serta dilanggengkan oleh sistem dan struktur yang ada.

Proses dehumanisasi yang terjadi didukung oleh adanya diskursus dominasi yang ada di dalam masyarakat. Dominasi tentu tidak terlepas dari hegemoni suatu kelompok terhadap kelompok lain. Hegemoni sebagai mekanisme legitimasi diskursus dan melanggengkan dehumanisasi sehingga berimplikasi pada penindasan dan kesengsaraan karena sistem kapitalisme pada kaum miskin. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan tatanan kehidupan yang lebih baik baik dimana tidak mengecilkan negara untuk tidak menjalankan fungsi dan perannya dengan baik sebagai wujud pelampiasan terhadap rezim. Akan tetapi, masyarakat dapat melibatkan dirinya untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan manusia. Upaya memperbaiki tatanan kehidupan bertujuan untuk melakukan

rehumanisasi (memanusiakan kembali manusia) ke arah kehidupan yang lebih baik melalui perubahan. Hal tersebut dinamai dengan transformasi sosial (Rochmah, 2007).

Mansour Fakih mendefinisikan transformasi sosial yakni proses penciptaan hubungan ekonomi, politik, kultural, dan lingkungan yang secara mendasar baru dan lebih baik. Definisi lainnya mengungkapkan bahwa transformasi sosial sebagai perubahan yang menyeluruh dan mendasar menuju terciptanya sistem sosial dan struktur yang adil secara menyeluruh (Fakih, 2004). Kedua definisi tersebut mengandung arti bahwa di dalam struktur perlu ada yang dirubah yakni struktur ekonomi yang sifatnya eksploitatif menjadi struktur ekonomi tanpa eksploitasi, hubungan kultur hegemoni berubah menjadi hubungan struktur politik yang non represif, dan sebagainya.

Transformasi sosial menjadi model alternatif bagi perubahan sosial karena selama ini perubahan sosial hanya bersifat reformatif dengan sekedar mencari penyebab kemiskinan dan menjatuhkan kesalahan kemiskinan pada manusia serta menempatkan rakyat sebagai objek. Model transformasi sosial ini dapat digunakan untuk menciptakan relasi sosial politik yang lebih adil dan bersifat emansipatoris dengan menekankan

pada aspek kelas, gender maupun relasi kekuasaan yang lebih luas sehingga berakibat pada praktek pembangunan nasional. Model tersebut kemudian dijadikan ideologi oleh Mansour Fakih untuk melakukan perubahan cara berpikir masyarakat. Menurut Mansour, penggantian cara pandang menuju alternatif sebagai bentuk melawan hegemoni dan diskursus dominan untuk perubahan yang berkeadilan. Jadi, inti gagasan transformasi sosial adalah bagaimana memberdayakan masyarakat agar sadar dan melek akan ideologi maupun politik sebagai sarana untuk memperjuangkan perubahan sosial.

Transformasi sosial sebagai metode untuk melakukan perubahan transformatif. Dalam sejarah pergerakan sosial, suatu gerakan sosial bertujuan untuk melakukan perubahan. Suatu perlawanan terhadap negara, pemerintah, maupun rezim dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya represif seperti demonstrasi, protes, pemogokan, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan pandangan Mansour Fakih yang menekankan perubahan dengan transformasi sosial dan sifatnya non represif. Pada hakikatnya, transformasi sosial yakni mengubah pola pikir masyarakat dalam menghadapi suatu masalah atau realitas sosial yang ada dengan wacana baru sebagai suatu solusi.

Metode tersebut dianggap aman untuk melawan hegemoni negara. Gagasan transformasi sosial yang diusung oleh Mansour Fakih menekankan pada dua hal yang menjadi alternatif untuk melawan hegemoni sebagai bentuk ketidakadilan yakni dekonstruksi wacana yang memunculkan wacana baru dalam rangka megubah pola pikir atau yang dimaknai dengan *countra discourse* dan menggunakan pendidikan. *Countra discourse* digunakan untuk proses rehumanisasi sementara pendidikan sebagai alat untuk memunculkan kesadaran kritis. Berikut ini penjelasannya :

a. Mengubah Pola Pikir Masyarakat dengan *Countra Discourse*

Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Mansour Fakih guna menentang *discourse* yang dilanggengkan oleh hegemoni adalah *countra discourse*. Dengan kata lain bahwa *countra discourse* adalah *countra hegemony*. *Discourse* dimaknai sebagai sesuatu yang membentuk dan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memandang sesuatu atau hal dalam aspek kehidupan manusia. Kecenderungan tersebut tidak terlepas dari pengaruh dan hegemoni negara. Dikatakan demikian karena *discourse* digunakan untuk menyembunyikan ideologi

tertentu yang ada di dalam suatu makna sehingga seolah-olah *discourse* tidak memiliki ideologi ataupun kepentingan tertentu. Mansour Fakih telah membongkar diskursus dominan yang terjadi di masyarakat seperti kegagalan pembangunan. Pemikirannya menjadi bentuk *countra discourse* terhadap developmentalisme (Rochmah, 2007).

b. Transformasi Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam memunculkan kesadaran kritis. Dalam hal ini, pendidikan merupakan sarana untuk mengubah kesadaran naif dan massif manusia menjadi kesadaran kritis dalam melihat realitas sosial. Pendidikan sebagai alat untuk melawan hegemoni meskipun di satu sisi yang lain pendidikan juga menjadi alat untuk melanggengkan hegemoni itu sendiri (Rochmah, 2007).

B. Teori CDA (*Critical Discourse Analysis*)

1. Konsep CDA (*Critical Discourse Analysis*)

Sebelum mengenal jauh tentang *Critical Discourse Analysis*, maka ketahui terlebih dahulu mengenai wacana atau *discourse*. Wacana tidak hanya dipandang sebagai pemakaian bahasa dalam

tuturan maupun tulisan, tetapi juga sebagai bentuk dari praktik sosial. Terdapat tiga hal yang berkaitan dengan konsep wacana yakni teks, konteks, dan wacana. Teks merupakan bentuk bahasa yang tidak hanya berupa kata-kata maupun kalimat yang tertuang dalam lembaran kertas, tetapi juga seluruh bentuk komunikasi, ekspresi, efek suara, dan lain-lain. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks serta mempengaruhi pemakaian bahasa seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut dapat diproduksi. Wacana dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersamaan (Supriyadi, 2015). Menurut Eriyanto, wacana dapat disebut dengan wacana kritis karena dipandang sebagai objek yang kajiannya memiliki aspek berupa tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Wacana kritis tentu dilatarbelakangi oleh maksud atau tujuan seorang penulis dan untuk mengetahuinya dibutuhkan analisa keseluruhan makna dalam sebuah teks yang disebut analisis wacana kritis (Ratnaningsih, 2019).

Konsep *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau biasa disebut dengan analisis wacana kritis menurut Teun Van Dijk mengungkapkan bahwa “*Critical discourse analysis (CDA) is a type of discourse analytical research that primarily studies the way social power abuse, dominance, and*

inequality are enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the social and political context". Maksudnya adalah bentuk penelitian yang menganalisa diskursus dimana mempelajari *social power abuse*, dominasi, serta ketidaksetaraan yang terbentuk, diproduksi, dan ditentang oleh teks dan pembicaraan dalam ruang lingkup sosial maupun politik. Fokus konsep tersebut adalah struktur wacana yang membuat, melegitimasi, atau menentang hubungan kekuasaan dan dominasi di dalam masyarakat (Ratnaningsih, 2019). Asumsi dasar studi wacana kritis adalah bahasa yang digunakan memiliki bermacam fungsi seperti dapat memengaruhi, memerintah, memanipulasi, menggerakkan kelompok atau membujuk dan bahasa memiliki konsekuensi baik sesuai dengan yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Bahasa juga dapat dikonstruksi dan mengonstruksi sehingga fenomena yang sama bisa digambarkan dengan berbagai metode. Ada berbagai variasi laporan atau cerita dimana ada yang memiliki makna harfiah, lebih banyak konotatif daripada denotatif, ada yang representatif dan ada yang virtual. Bahasa juga menjadi mekanisme kontrol sosial yang kuat dimana orang dapat dikenali dari satu kelompok mana dengan

penggunaan bahasanya. Oleh sebab itu, studi wacana kritis sangat diperlukan.

Kekuasaan (*power*) menjadi pusat kajian dari *critical discourse*. Kekuasaan digunakan untuk mengontrol tindakan maupun pikiran seseorang sehingga dalam penggunaan kekuasaannya membutuhkan *power base* seperti status, popularitas, uang, dan sebagainya. Biasanya *power* dimiliki oleh kelompok dominan yang terintegrasi dalam peraturan, norma, kebiasaan, serta kesepakatan yang dinamakan hegemoni. Kekuasaan tidak hanya digunakan oleh kelompok dominan yang lebih kuat tetapi juga kelompok yang terdominasi juga memiliki *power* sehingga kekuasaan ini dimiliki oleh semua kelompok. *Critical Discourse Analysis* berfokus pada *abuse of power* terutama dominasi yakni adanya *discourse control* yang bertujuan mengontrol tindakan dan keyakinan seseorang. Dalam hal ini, dominasi didefinisikan sebagai penggunaan *power* yang tidak sah (Supriyadi, 2015).

Para peneliti tertarik menggunakan studi wacana kritis untuk mempelajari bagaimana wacana mereproduksi dominasi sosial yakni penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain dan bagaimana kelompok yang didominasi berusaha melakukan

perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan melalui wacana. Studi wacana kritis ini mengedepankan premis bahwa beberapa bentuk teks dan pembicaraan bisa saja tidak adil. Maka studi wacana kritis berusaha untuk membongkar ketidakadilan itu (Haryatmoko, 2016).

2. Fungsi *Critical Discourse Analysis* Bagi Masyarakat

Analisis wacana kritis memiliki fungsi bagi masyarakat yakni memberikan kesadaran nyata atas peran mereka di masyarakat. Pemikiran tersebut bersumber pada ilmu itu “*value-free*” dan penelitian wacana kritis akan berjalan efektif selaras dengan tujuannya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (Supriyadi, 2015):

- a) Penelitian wacana kritis harus menjadi lebih baik daripada penelitian lainnya karena penelitian tersebut bersifat marginal agar dapat diterima.
- b) Fokus utamanya mengenai isu-isu permasalahan sosial maupun politik daripada *trend* dan paradigma.
- c) Secara empiris, analisis wacana kritis masalah sosial sifatnya multidisipliner.
- d) Analisis wacana kritis ini tidak hanya menjelaskan struktur wacana tetapi juga pengertian interaksi sosial dan struktur sosial.

- e) Analisis wacana kritis ini juga lebih berfokus pada struktur wacana yang membuat, melegitimasi, memproduksi, menentang hubungan dominasi atau kekuasaan di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas, Norman Fairclough menyimpulkan bahwa terdapat prinsip-prinsip utama analisis wacana kritis yakni sebagai berikut:

- 1) *Critical discourse analysis* tertuju pada masalah sosial.
- 2) Hubungan kekuasaan itu diskursif.
- 3) Wacana dapat membentuk masyarakat dan budaya.
- 4) Wacana juga mengkaji ideologi.
- 5) Wacana itu historis.
- 6) Terdapat keterkaitan antara teks dan masyarakat itu termediasi.
- 7) Analisa wacana itu interpretatif dan eksplanatoris.
- 8) Wacana dapat dikatakan sebagai suatu bentuk tindakan sosial.

3. Paradigmatik CDA (*Critical Discourse Analysis*)

Studi mengenai bahasa mengalami perkembangan yang signifikan dikalangan sarjana linguistik. Paham strukturalisme memandang bahasa sebagai sistem yang statis dan berfokus

pada aspek formal. Hal tersebut dikritik paham post-strukturalisme yang menilai bahasa dapat berubah-ubah dan dianggap sarat dengan motif kekuasaan serta kepentingan kelompok sosial tertentu sehingga bahasa tidak bersifat netral, bias, dan memihak kelompok tertentu. Oleh sebab itu, realitas yang dikonstruksi oleh bahasa bukan realitas yang sebenarnya tetapi realitas yang dikonstruksi. Pergeseran kedua paham tersebut didasarkan pada paradigma konstruksionisme sosial (Munfarida, 2014).

Kenneth Gergen mengungkapkan empat asumsi yang mendasari teori konstruksi sosial sebagai gerakan konstruksionisme sosial. *Pertama*, pengetahuan yang manusia ketahui itu bersifat relatif dan tidak mutlak karena pengetahuan dapat diperoleh secara sosial atau produk wacana. *Kedua*, menekankan sifat historisitas dan kultural pada pengetahuan sehingga pengetahuan cara memahami dunia dapat berubah sesuai perubahan historis serta kulturalnya. Wacana juga sebagai tindakan sosial dimana berperan untuk memproduksi dunia sosial seperti identitas, pengetahuan, dan relasi sosial yang kemudian dapat menciptakan pola-pola sosial tertentu. *Ketiga*, cara pandang kita terhadap dunia dapat dibentuk oleh proses sosial. Seseorang dapat membedakan pengetahuan yang benar dan yang

salah atas dasar interaksi sosial. *Keempat*, adanya hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial sehingga berimplikasi pada konstruksi pengetahuan sosial yang berbeda begitupun dengan hasil tindakan sosial yang berbeda pula (Munfarida, 2014).

Gambaran teori konstruksionisme sosial di atas berpengaruh pada konstruksi teori *critical discourse analysis*. Dikatakan demikian karena terdapat lima karakter yang ada pada teori CDA (*Critical Discourse Analysis*) yakni sebagai berikut (Munfarida, 2014):

- a. Karakter dari proses-proses dan struktur kultural dan sosial sebagian bersifat linguistik-diskursif. Maksudnya adalah di dalam dunia sosial terdapat proses dan struktur sosial yang diproduksi melalui praktik linguistik diskursif seperti teks yang kemudian merealisasikan transformasi sosial dan kultural. Oleh sebab itu, CDA akan menjelaskan dimensi linguistik diskursif dari fenomena sosial yang di dalamnya terdapat proses, struktur, dan kultural.
- b. Diskursus bersifat *constitutive* dan *constituted* yakni diskursus sebagai praktik sosial yang menciptakan dunia sosial serta eksistensinya diciptakan praktik sosial lainnya. Pada CDA,

bahasa sebagai diskursus dalam bentuk tindakan sosial yang secara historis muncul dalam hubungan yang dialektis pada praktik sosial yang lain.

- c. Perlunya analisa penggunaan bahasa secara empiris dalam konteks sosialnya. Teori CDA akan menganalisis tekstual linguistik terhadap penggunaan bahasa dalam interaksi sosial.
- d. Fungsi ideologis pada diskursus. Diskursus berperan dalam penciptaan relasi kekuatan sosial yang tidak adil di berbagai kelompok yang ada. Penelitian CDA berfokus pada dua hal yaitu praktik diskursif yang menciptakan subjek dan relasi sosial, serta peran dari praktik diskursif untuk melanggengkan kepentingan politik kelompok tertentu.
- e. Teori CDA tidak bersifat netral dan bias terhadap kelompok yang lemah. Pendekatan kritis ini bertujuan untuk mengungkap relasi kekuasaan yang tidak adil dan berpotensi untuk melakukan perubahan agar tercipta tatanan kehidupan yang sejajar. Sudut pandang Fairclough mengenai "*explanator critique*" dan "*critical language awareness*" diutamakan untuk mencapai tujuan diatas yaitu mengungkap relasi kuasa untuk perubahan sosial yang egaliter.

4. Teori *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough

Norman Fairclough memandang *critical discourse analysis* (CDA) yaitu “*the critical discourse analysis is not just analysis discourse, it is part of some form of systematic transdisciplinary analysis of relation between discourse and other element of the social process. It is not just general commentary on discourse, it includes some form of systematic analysis of teks. It is not just decriptive, it is also narrative*”. Maksudnya yaitu analisis wacana kritis menganalisa hubungan antar elemen pada proses sosial. Analisis wacana kritis tidak hanya memberikan komentar semata tetapi melibatkan analisis sistematis teks secara naratif. Dapat disimpulkan bahwa CDA yakni memahami wacana secara mendalam dan dipandang sebagai praktik sosial yang pemroduksiannya mempunyai tujuan dan maksud tertentu (Fairclough, 1989).

Analisis wacana kritis Fairclough dengan bukunya yang berjudul “*Language and Power*” dan “*Critical Discourse Analysis*” berusaha mengkombinasikan antara analisis tekstual dengan ruang lingkup masyarakat luas. Analisa Fairclough ini berpusat pada melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Fairclough menyebutkan pemahamannya mengenai bahasa dalam istilah

wacana atau *discourse*. Konsep tersebut sebagai bentuk dari praktik sosial yang memiliki tiga implikasi yakni pertama, wacana tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedua, wacana merupakan proses sosial dimana wacana terus berkembang sebagaimana masyarakat juga berkembang. Ketiga, wacana berproses sejalan dengan kondisi di dalam masyarakat dimana terdapat hubungan antar satu sama lain atau semacam dialektika kondisi sosial dan wacana begitu pun sebaliknya (Fairclough, 1989).

Pada bukunya tentang “*Language and Power*”, Fairclough juga mengemukakan bahwa hubungan antara wacana dan struktur sosial tidak hanya satu arah. Dikatakan demikian karena wacana ditentukan oleh struktur sosial dan wacana mempengaruhi struktur sosial sehingga dapat terjadi perubahan sosial itu sendiri. Wacana ini memiliki urgensi dalam kekuasaan dan usaha melanggengkan kekuasaan melalui kontrol wacana oleh pihak-pihak berkuasa (Fairclough, 1989). Oleh sebab itu, wacana adalah bentuk praktik sosial dan model analisa Fairclough yakni mengintegrasikan analisa wacana yang dasarnya pada bahasa dan pemikiran sosial serta diintegrasikan pada perubahan sosial (Fauzan, 2013).

Diskursus erat kaitannya dengan kekuasaan dan ideologi. Diskursus pada teori *critical discourse analysis* tidak terlepas dari bahasa atau *language as discourse*. Norman Fairclough menerapkan diskursus pada tiga cara yang berbeda yakni *pertama*, bahasa merupakan bagian dari komunitas sosial tertentu atau bahasa yang digunakan dalam ranah tertentu seperti diskursus politik, dan lain-lain. *Kedua*, bahasa adalah praktik sosial. Fairclough menekankan diskursus tidak hanya menyusun tetapi juga disusun oleh struktur sosial dan relasi kekuasaan. *Ketiga*, diskursus digunakan pada kata benda yang merujuk cara bicara yang memberikan makna pada pengalaman dari perspektif tertentu.

Diskursus berkaitan dengan struktur sosial dan hubungannya bersifat dialektikal seperti yang telah dijelaskan di atas. Penggunaan diskursus dalam pembentukan struktur sosial menyumbang pembentukan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antar kelompok sosial seperti gender, etnis antara mayoritas dan minoritas, dan lain macamnya. Ketidakseimbangan relasi kekuasaan juga dipahami sebagai efek ideologi. Ideologi diartikan sebagai proses produksi makna keseharian yang diterima begitu saja dan menyumbang ketidakadilan tetapi tidak disadari. Teori *critical discourse analysis* ini

bertujuan mengkritisi ketidakadilan yang ada dalam diskursus dan berusaha melakukan perubahan sosial. Oleh sebab itu, CDA selalu berpihak pada kelompok yang lemah.

Bagi Fairclough, diskursus memiliki peran penting dalam mengkonstruksi identitas sosial, relasi sosial, sistem pengetahuan, dan makna. Maka dari itu, diskursus memiliki tiga fungsi yakni fungsi identitas, fungsi relasional, fungsi ideasional. Fungsi identitas menjelaskan peran diskursus dalam mengkonstruksi identitas masyarakat. Fungsi relasional yakni keberadaan diskursus yang berfungsi untuk menciptakan relasi-relasi sosial di masyarakat dimana disesuaikan dengan identitas sosial. Sementara fungsi ideasional yakni peran diskursus dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keyakinan yang menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk memaknai atau mengartikan identitas sosial dan relasi sosial (Munfarida, 2014).

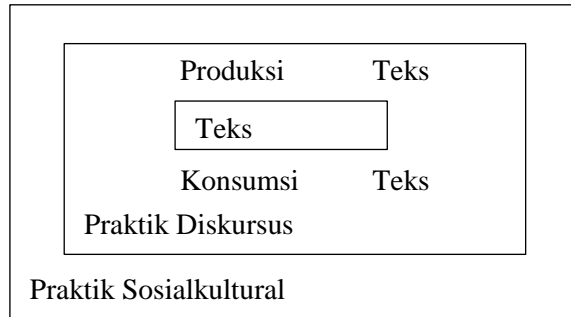
Fokus dari *critical discourse analysis* adalah bahasa yang di dalamnya terdapat percakapan (*talk*) dan tulis (*writing*). Fairclough menyebutnya dengan teks tulis dan teks lisan. Teks tulis adalah teks yang sering dijumpai seperti koran, majalah, dan sebagainya sementara teks lisan diartikan sebagai rekaman tertulis dari apa yang dikatakan. Target analisa Fairclough adalah

teks tulis dan teks lisan, namun tidak hanya teks semata tetapi diskursus yang membentuk teks dan bagaimana diskursus tersebut dapat berhubungan dengan diskursus lainnya. Terdapat dua dimensi yang menjadi titik penting dalam *critical discourse analysis* yakni *the communicative event* dimana penggunaan bahasanya seperti film, video, wawancara dan *the order of discourse* (tatanan diskursus) yakni bentuk dari semua tipe diskursus yang terdiri dari genre dan diskursus yang biasanya digunakan dalam institusi sosial (Fitrianita, 2013).

5. Model Analisa *Critical Discourse Analysis* (CDA) Fairclough

Model analisis *critical discourse analysis* yang ditawarkan oleh Norman Fairclough memiliki tiga dimensi yakni teks yang berupa ucapan, tulisan, *image visual*, atau kombinasi ketiganya, praktik diskursus, dan praktik sosial. Berikut ini gambar dan pemaparannya :

*Gambar 1. Model Analisis CDA
Fairclough*



a. Dimensi Teks

Teks harus dianalisa melalui pendekatan linguistik yang di dalamnya terdapat bentuk formal seperti kosa kata, tata bahasa, dan struktur tekstual. Masing-masing bentuk formal akan dianalisa dengan menarik nilai-nilai di dalamnya melalui nilai pengalaman, nilai relasional, dan nilai ekspresif.

1) Kosa kata

- a) Nilai pengalaman menunjuk pada ideologis yang digunakan oleh produksi teks dalam menjelaskan dunia sosial. Aspek nilai pengalaman ini penting untuk mengungkap perbedaan ideologi yang direpresentasikan teks yang mana tertuang pada kata-kata. Nilai

pengalaman yang mempresentasikan teks dalam bentuk kosa kata dilakukan untuk mengidentifikasi relasi makna dalam teks dan tipe diskursus yang menjadi dasarnya. Nilai pengalaman ini juga dapat diperoleh dari menganalisa bentuk penggunaan kosa kata tertentu yang berarti pemilihan produsen teks terhadap aspek tertentu dari realitas dan penggunaan klasifikasi yang menunjukkan pembagian realitas berdasar pada ideologis tertentu untuk memahami realitas (Munfarida, 2014).

- b) Nilai relasional yakni pemilihan kata formal dan informal. Pilihan kata formal yang biasanya menggunakan kosa kata asing maupun kosa kata ilmiah dapat menciptakan kesan kekuasaan maupun status yang dimiliki seseorang. Sedangkan pilihan kata informal biasanya digunakan sehari-hari dan bernuansa solidaritas,

kesantunan, dan kasih sayang (Suciati, 2018).

- c) Nilai ekspresif pada kosa kata meliputi evaluasi positif dan evaluasi negatif. Evaluasi tersebut sering muncul secara implisit pada kosa kata. Nilai ekspresif mengacu pada pola klasifikasi yang menunjukkan perbedaan ideologis (Suciati, 2018).
- 2) Tata bahasa atau Gramatika
- a) Nilai pengalaman berkaitan dengan cara bentuk tata bahasa menandai peristiwa atau relasi sosial, hewan atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, cara kemunculannya, dan sebagainya. Dalam nilai pengalaman, nominalisasi juga merupakan salah satu bentuk nilai tersebut. Nominalisasi adalah proses tata bahasa dalam pembentukan nomina dari jenis kata yang lain biasanya verba atau ajektif. Bagi Fairclough, nominalisasi mengandung ideologis tertentu. Selain itu, kalimat aktif dan pasif sebagai penghubung antara

frasa verba dan frasa nomina yang diekspresikan dalam bahasa. Nilai pengalaman lainnya adalah kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat negatif memiliki fungsi untuk melawan pernyataan atau pendapat lawan bicaranya yang dianggap keliru. Fairclough menyatakan bahwa negasi mempunyai nilai pengalaman sebagai dasar dalam membedakan apa yang bukan kasus dan apa yang benar-benar merupakan kasus dalam realitas (Fairclough, 1989).

- b) Nilai relasional berhubungan dengan cara bagaimana tata bahasa mengkodekan relasi hubungan sosial timbal balik yang diperankan penghasil teks. Pada tata bahasa terdapat tiga bentuk kalimat meliputi deklaratif, interogatif, dan imperatif. Ketiganya mempunyai implikasi makna yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat modalitas yang berkaitan dengan otoritas seorang pembicara. Modalitas mengandung dua dimensi

tergantung arah orientasi otoritas tersebut. *Pertama*, modalitas relasional yang bermakna otoritas partisipan dalam relasi dengan yang lain. *Kedua*, modalitas ekspresif yang menunjuk pada evaluasi kebenaran dari pembicara. Nilai yang lainnya adalah penggunaan kata ganti yang menunjukkan relasi sosial dimana dibangun dalam teks (Munfarida, 2014).

- c) Nilai ekspresif pada tata bahasa dilihat dari modalitas ekspresif. Modalitas tersebut berkaitan dengan otoritas penutur yang berkenaan dengan kemungkinan kebenaran atau kemungkinan dalam realitas. Bagi Fairclough, kepentingan ideologis dalam tuntutan terhadap pengetahuan dibentuk melalui modalitas (Suciati, 2018).
- 3) Struktur tekstual

Sebuah teks tentu memiliki stuktur yang membentuknya dari unsur-unsur yang ditampilkan dengan urutan yang dapat diramalkan. Salah satu contohnya adalah pidato kampanye yang dibentuk

dari latar belakang didirikannya partai, calon yang diusung dari partai tersebut, program kerja, dan harapan apabila masyarakat memilih partai tersebut. Unsur-unsur yang muncul tidak selalu logis dan muncul lebih dari satu tempat dalam teks. Urutan di dalam teks berkaitan dengan linearisasi yaitu bagaimana penghasil teks mengurutkan kata tunggal menjadi kalimat dan mengurutkan kalimat menjadi teks yang lebih besar. Apa yang disampaikan di awal teks pidato kampanye akan berpengaruh pada penafsiran teks selanjutnya (Faiclough, 1989).

b. Dimensi Praktik Diskursus

Praktik diskursus adalah dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Pada dasarnya, teks berita yang dihasilkan lewat produksi itu berbeda seperti bagaimana pola kerja, bagan kerja, dan rutinitas dalam menghasilkan teks. Teks diproduksi dalam cara yang spesifik dengan rutinitas dan pola kerja yang terstruktur. Selain produksi teks, konsumsi teks bisa berbeda dengan konteks sosial yang berbeda pula. Konsumsi dihasilkan saat seseorang atau

masyarakat mengonsumsi teks. Sedangkan dalam distribusi teks tergantung pada pola dan jenis teks serta institusi yang melekat pada teks tersebut.

Praktik wacana ini menghubungkan antara teks dan praktik sosial. Hal tersebut berkaitan dengan aspek sosio kognitif yang memproduksi dan memaknai teks. Praktik wacana atau praktik diskursus ini di satu sisi dibentuk dan membentuk praktik sosial sementara sisi lainnya yakni teks yang diproduksi akan dimaknai berdasar pada elemen tekstual. Analisa pada praktik diskursus tidak hanya berupa eksplanasi tentang menginterpretasi dan memproduksi teks semata tetapi menghubungkan peristiwa wacana pada tatanan wacana yang kemudian dimasukkan pada interdiskursivitas. Fokus kajian dari analisa praktik diskursus ini adalah bagaimana produksi dan konsumsi teks (Sumarti, 2010).

c. Dimensi Praktik Sosialkultural

Dimensi praktik sosialkultural berhubungan dengan konteks di luar konteks. Maksud konteks tersebut seperti konteks situasi, konteks dari praktik institusi, dan sebagainya. Praktik sosialkultural

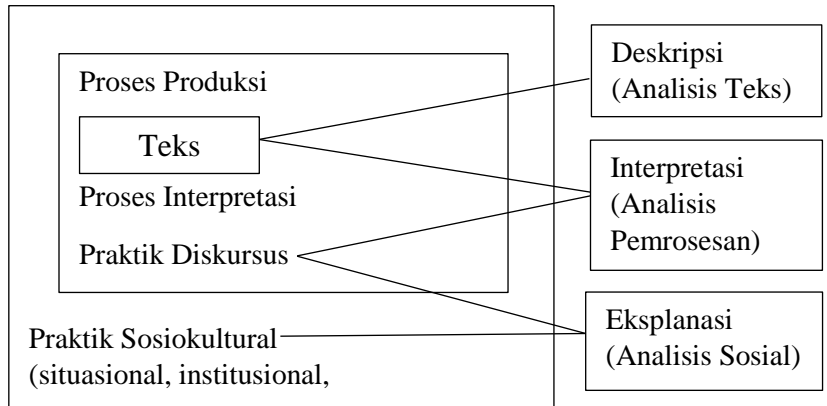
menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Analisis praktik tersebut berdasar pada asumsi bahwa konteks sosial diluar wacana mempengaruhi kemunculan wacana. Fairclough memulai kajiannya dari hubungan antara wacana dan hegemoni serta memandang kontrol terhadap praktik kewacanaan sebagai perjuangan terhadap kelebihan dibalik tatanan wacana (Sumarti, 2010). Dimensi praktik sosialkultural menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat memaknai dan menyebarkan ideologi yang dominan pada masyarakat.

6. Cara Kerja Model Analisis *Critical Discourse Analysis* (CDA) Fairclough

Fairclough berusaha menghubungkan antara analisis teks pada level mikro dengan konteks sosial yang lebih besar. Pada tahap analisis, ketiga dimensi di atas dilakukan secara bersama-sama. Analisis teks bertujuan untuk mengungkap makna dengan menganalisis bahasa secara kritis. Praktik diskursus menghubungkan teks dengan konteks sosial budaya. Pada tingkatan praktik diskursus diperlukan wawancara mendalam dan penelitian. Fairclough membagi tiga tahapan untuk menganalisis wacana

yakni deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi yang digambarkan dalam kerangka berikut ini :

Gambar 2. Proses Analisis CDA Fairclough



Pada wilayah teks, deksripsi ditujukan untuk menganalisa teks guna mendapat gambaran bagaimana teks dideskripsikan. Fairclough menekankan pentingnya memperdalam dengan investigasi pada proses produksi teks yang meliputi konteks sosialkultural yang melatarbelakangi teks tersebut (Fairclough, 1995). Kemudian, teks tersebut diinterpretasi guna menganalisa proses dan bagaimana teks dikonsumsi dan diinterpretasikan oleh pembaca. Fairclough membagi prosedur interpretasi ke dalam dua jenis yakni interpretasi pada teks dan interpretasi situasi kontekstualnya.

Dalam menginterpretasi teks terdapat empat tahap yakni *pertama, surface of utterance*

(permukaan ungkapan) yang berkaitan dengan proses dimana penafsir mengubah tanda di dalam teks menjadi kata-kata atau kalimat dengan memanfaatkan tata bahasa dan kosa kata. *Kedua, meaning of utterance* (makna ungkapan) yakni memberikan makna pada ungkapan dalam teks melalui alat semantik dan pragmatik. *Ketiga, local coherence* (kohesi lokal) yang mengutamakan penetapan hubungan-hubungan makna diantara berbagai ungkapan sehingga menghasilkan penafsiran yang koheren. Dalam menemukan kohesi lokal, penafsir menggunakan bahasa tentang kohesi dan pragmatik. *Keempat, text structure* dan *point* yang berkaitan dengan koherensi teks secara global. Penggunaan representasi dari pola tertentu pada tipe diskursus maka penafsir dapat menentukan tipe diskursus yang dianalisis dan tatanan wacananya. Adapun *point* dari teks adalah rangkuman dari teks tersebut. Sedangkan interpretasi situasi kontekstual dibagi menjadi dua yakni *pertama*, konteks situasional yang ditelusuri dengan menganalisa tatanan sosial yang sifatnya institusional dan masyarakat yang mencakup produksi teks, *kedua*, konteks interaksional yang dilihat dari sejarah interaksional berbagai diskursus sehingga dapat diketahui diskursus mana yang berhubungan dengan diskursus dalam teks dan asumsinya yang

menentukan apa diterima dan mana yang ditolak (Fairclough, 1989).

Lebih lanjut dari interpretasi adalah eksplanasi yang dapat menggambarkan diskursus sebagai bagian dari praktik sosial serta menunjukkan determinasi diskursus terhadap struktur sosial dan efek reproduktifnya terhadap struktur tersebut. Struktur sosial yang menjadi analisa adalah relasi kekuasaan. Adapun proses dan praktik sosial yang menjadi fokusnya yakni proses dan praktik perjuangan sosial. Maka dari itu, eksplanasi sebagai persoalan guna melihat diskursus sebagai bagian dari pertarungan sosial dari relasi kekuasaan. Fairclough menekankan dua hal yang dianalisa ialah determinan dan efek. Determinan yakni relasi kekuasaan yang menentukan diskursus dalam proses perjuangan sosial, sedangkan efek menunjuk pada efek yang dihasilkan dari diskursus. Baik determinan maupun efek harus dilihat dari tiga organisasi sosial yakni level sosial, institusional, dan situasional (Fairclough, 1989).

BAB III

LANDSKAP DESA TEGALRETNO DAN KAWASAN *SHRIMP ESTATE*

Pada bab ini, penulis memaparkan gambaran objek penelitian yakni Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dan kawasan *shrimp estate*. Bagian pertama menjelaskan mengenai sejarah desa, kondisi geografis dan demografis, struktur sosial ekonomi, struktur sosial budaya, dan struktur sosial politik Desa Tegalretno, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen yang diperoleh dari penelusuran data primer maupun data sekunder. Sedangkan, bagian kedua menggambarkan kawasan *shrimp estate* yang lokasinya terletak di Desa Tegalretno meliputi konsep kawasan *shrimp estate* sendiri, lokasi dan bangunan kawasan *shrimp estate*, dan sebagainya. Untuk lebih rincinya, lanskap Desa Tegalretno dan kawasan *shrip estate* yakni sebagai berikut :

A. Lanskap Desa Tegalretno

1. Sejarah Desa

Berdasarkan hasil penelusuran, pada awal mulanya kisaran zaman Belanda Desa Tegalretno dibagi menjadi dua desa yakni Desa Ubil yang terletak di sebelah barat dan Desa Baling di sebelah timur. Semenjak keluarnya Peraturan Pemerintah Belanda pada tahun 1922, kedua desa tersebut

kemudian digabung menjadi satu desa yang dinamakan Desa Tegalretno. Istilah Tegalretno sendiri diambil oleh tokoh masyarakat yang bernama Sura Semita dimana pada saat itu beliau menjabat sebagai kepala desa. Kata Tegalretno berasal dari dua kata yakni “Tegal” yang berarti lahan dan “Retno” yang artinya intan. Jadi, Desa Tegalretno memiliki makna yaitu tegalan atau lahan yang berharga (Lukman, 2023).

Pada masa Belanda maupun Jepang, pemerintahan di Desa Tegalretno berganti-ganti yang diawali oleh Sura Semita tahun 1900-1992 sebagai kepala desa pertama dan sistem pemilihannya dilakukan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat melalui *sistem dodokan*. Sistem tersebut artinya sistem pemilihan dengan cara memilih langsung jongkok atau *ndodok* di depan calon kepala desa dan dialah yang menjadi kepala desa. Dari kepemimpinan Sura Semita belum mendapat hasil yang maksimal. Kemudian, diganti dengan oleh Cakra Wardaya pada tahun 1922-1933. Pada masa pemerintahannya, dikenallah istilah *congkog*, *carik*, *pulisi*, *bayan* atau kepala dusun. Lalu, berakhirnya masa jabatan Cakra Wardaya, maka kepala desa di Desa Tegalretno dipimpin secara bergantian hingga sekarang dengan kondisi sosial politik yang teratur

dan tertata dimana terdapat pusat pemerintahan, infrastruktur yang baik, dan sebagainya (Lukman, 2023).

2. Kondisi Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak antara 7°27' - 7°50' Lintang Selatan dan 109°22' - 109°59' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kebumen mempunyai batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 460 desa. Adapun luas wilayah Kabupaten Kebumen sendiri sebesar 1.281,12 km². Stasiun Meterologi Sempor memperkirakan suhu udara rata-rata di Kebumen pada tahun 2020 berkisar antara 24,7°C hingga 27,8°C. Sementara curah hujan selama tahun 2018 sebesar 3.122 mm³ serta hari hujan sebanyak 149 hari (Badan Pusat Statistik Kab. Kebumen, 2022).

Petanian yaitu salah satu kecamatan yang terletak di sebelah utara Kabupaten Kebumen.

Bentang wilayah Kecamatan Petanahan adalah wilayah daratan. Kecamatan Petanahan terletak antara 7,44520 Lintang Selatan dan 109,3530 Bujur Timur dengan luas wilayah 43,3 km² serta terdiri 21 desa. Petanahan memiliki batas-batas wilayah dengan kecamatan lainnya yakni sebelah utara Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Adimulyo, sebelah barat Kecamatan Puring, sebelah selatan Samudera Hindia, serta sebelah timur Kecamatan Klirong. Dari luas wilayah Kecamatan Petanahan tersebut, diantaranya 55,61% adalah lahan sawah sementara sisanya lahan bukan pertanian (Badan Pusat Statistik Kab. Kebumen, 2022).

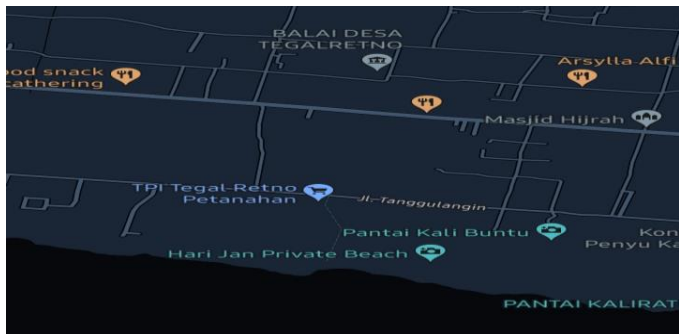
Desa Tegalretno adalah objek penelitian penulis dimana desa tersebut merupakan salah satu wilayah dari 21 desa di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Menurut letak geografisnya, Desa Tegalretno berada di 7.77121 Lintang Selatan dan 109.602595 Bujur Timur. Adapun luas wilayah desa tersebut adalah 3.23 km² dengan jarak tempuh ke kecamatan 4,7 km dan jarak tempuh ke kabupaten/kota yakni 19,7 km. Posisi perbatasan Desa Tegalretno diantaranya sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong.

Secara topografi, Desa Tegalretno adalah wilayah daratan dan terletak pada ketinggian 36 meter di atas permukaan laut serta masuk dalam jenis pesisir atau pantai (Lukman, Profil Umum Desa Tegalretno, 2019). Berikut ini peta Desa Tegalretno :

Gambar 3. Peta Desa Tegalretno



Sumber : <https://tegalretno.kec-petanahan.kebumenkab.go.id>

3. Kondisi Demografis

Masyarakat Desa Tegalretno berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2022 berjumlah 2.430 jiwa dimana sebanyak 1.242 jiwa penduduk laki-laki dan 1.188 jiwa penduduk perempuan.

Adapun kepadatan penduduk Desa Tegareno pada tahun 2021 mencapai 756.04 jiwa/km² dan rasio jenis kelaminnya sebesar 97,1%. Desa Tegareno, secara administratif memiliki 10 RT (Rukun Tetangga) dan 4 RW (Rukun Warga). Desa tersebut juga merupakan desa berkembang yang dapat dilihat dari status indeks desa membangun dengan nilai 0.6924 (Badan Pusat Statistik Kab. Kebumen, 2022). Berikut adalah proyeksi jumlah penduduk yang ada di Desa Tegareno :

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Desa Tegareno 2022

No.	Jumlah Penduduk	
1.	Laki-laki	1.242 jiwa
2.	Perempuan	1.188 jiwa
Total		2.430 jiwa

Sumber : Dokumentasi Arsip Kependudukan Desa Tegareno

Dari data di atas, jumlah penduduk Desa Tegareno kemudian diklasifikasi lagi menjadi jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat Desa Tegareno tergolong masyarakat usia produktif. Maksudnya adalah masyarakat yang rentang

umurnya 15 tahun hingga 64 tahun dan mampu menghasilkan barang ataupun jasa. Pada rentang umur tersebut banyak orang yang menyelesaikan pendidikan formal, mencari dan membangun *karier*, membangun keluarga, terlibat aktif dalam pembangunan maupun organisasi, dan sebagainya. Di Desa Tegalretno penduduk usia produktifnya cukup besar yakni 1.719 jiwa sementara usia non produktif dimana rentang umurnya berada pada 65 tahun ke atas sebesar 138 jiwa. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Tegalretno dapat membangun dan memberikan kontribusi untuk desa yang lebih baik dan maju. Berikut ini proyeksi jumlah penduduk berdasarkan umur :

*Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
Desa Tegalretno 2022*

No.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	< 1 tahun	37 jiwa
2.	1 – 4 tahun	146 jiwa
3.	5 – 14 tahun	390 jiwa
4.	15 – 39 tahun	906 jiwa
5.	40 - 64 tahun	813 jiwa
6.	65 tahun keatas	138 jiwa
Total		2.430 jiwa

Sumber : Dokumentasi Arsip Kependudukan Desa
Tegalretno

Melihat dari data di atas dan observasi, usia produktif masyarakat Desa Tegalretno rata-rata berada pada tingkatan lulusan SD dan SMP yakni sebesar 441 jiwa (tamat sekolah dasar) dan 651 jiwa (tamat sekolah menengah pertama). Sementara, masyarakat yang tingkat lulusannya lebih tinggi jauh lebih sedikit yakni lulusan diploma sebesar 7 jiwa dan lulusan sarjana 48 jiwa. Artinya bahwa masih minimnya pendidikan di Desa Tegalretno sendiri sehingga tingkat melek pengetahuan dapat dikatakan rendah. Berikut ini proyeksi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan :

*Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Desa Tegalretno 2022*

No.	Kelompok Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah atau belum tamat SD	688 jiwa
2.	Tamat SD	441 jiwa
3.	Tamat SMP	651 jiwa
4.	Tamat SMA	595 jiwa
5.	Tamat Diploma	7 jiwa

6.	Tamat Sarjana	48 jiwa
Total		2.430 jiwa

Sumber : Dokumentasi Arsip Kependudukan Desa Tegalretno

Dari proyeksi kependudukan Desa Tegalretno di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya belum secara penuh membangun dan terlibat di desa. Dikatakan demikian, karena banyaknya usia produktif yang rata-rata merupakan lulusan tingkatan SD dan SMP sehingga belum meleak pengetahuan maupun teknologi yang mampu mengembangkan desa menuju desa yang maju.

4. Struktur Sosial Ekonomi

Desa Tegalretno merupakan wilayah yang letaknya berupa daratan dan pantai. Masyarakat desa tersebut memanfaatkan wilayah daratan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, palawija, jagung, dan sebagainya serta *menderes* kelapa di dekat pesisir pantai. Pada daerah pantai biasanya masyarakat Desa Tegalretno menjaring ikan di laut dan menambak udang di kolam. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat Desa Tegalretno bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Hal tersebut dapat dilihat dari data proyeksi penduduk berdasarkan tingkat pekerjaan dimana jumlah penduduk bekerja sebagai petani

sebesar 993 jiwa dan nelayan sebesar 120 jiwa. Berikut ini proyeksi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pekerjaan Desa Tegalretno:

Tabel 4. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Desa Tegalretno 2022

No.	Kelompok Tingkat Pekerjaan	Jumlah
1.	Tidak Bekerja atau belum bekerja	521 jiwa
2.	Petani atau Pekebun	993 jiwa
3.	Nelayan	120 jiwa
4.	Pedagang	98 jiwa
5.	Wiraswasta	72 jiwa
6.	Pegawai Negeri Sipil	22 jiwa
7.	Buruh Harian Lepas	107 jiwa
8.	Ibu Rumah Tangga	489 jiwa
9.	Perangkat Desa	8 jiwa
Total		2.430 jiwa

Sumber : Dokumentasi Arsip Kependudukan Desa Tegalretno

Di Desa Tegalretno, para nelayan tergabung dalam sebuah kelompok bernama Mina Barokah dimana ada yang mencari ikan dan ada yang mengelola kolam udang milik pemerintah. Masyarakat Desa Tegalretno memiliki rata-rata

pendapatan yakni sebesar Rp. 700.000,00 perbulan. Dalam menunjang perekonomian terdapat sarana ataupun fasilitas ekonomi seperti TPI Tegalretno, pasar, warung makan, toko, SPBU Tegalretno, dan sebagainya.

5. Struktur Sosial Budaya

Masyarakat Desa Tegalretno sebagian besar menganut agama Islam. Hal tersebut dilihat dari data kependudukan dimana penduduk yang menganut agama Islam sebesar 2.429 jiwa dan agama kristen menjadi minoritas di desa tersebut karena hanya 1 jiwa yang menganut agama tersebut. Dalam mendukung peribadatan, Desa Tegalretno mempunyai tempat peribadatan yakni sekitar 3 masjid dan 8 mushola. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tegalretno juga membuat adanya organisasi masyarakat yang dipilih yakni NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Sebagian besar organisasi masyarakat NU (Nahdlatul Ulama) diikuti oleh masyarakat Desa Tegalretno dan hanya beberapa yang mengikuti Muhammadiyah. Meskipun demikian, masyarakat Desa Tegalretno saling toleransi dan menghargai apapun organisasi masyarakat yang diikutinya. Desa Tegalretno juga berkehidupan dengan aman dan tenang karena tidak ada kelompok radikal ataupun

aliran yang dapat memecah belah persatuan di desa tersebut (Hikmah, 2023).

Selain agama, masyarakat Desa Tegalretno juga masih melaksanakan tradisi maupun adat-istiadat jawa yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang yakni seperti sedekah laut, *nyadran*, merti bumi, dan lain sebagainya. Sedekah laut merupakan salah satu tradisi yang populer di kalangan masyarakat pesisir seperti di Desa Tegalretno. Tradisi tersebut merupakan upacara *slametan* dengan melarung sesaji sebagai bentuk perwujudan syukur para nelayan maupun masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Hal ini dimaksudkan sebagai permohonan agar para nelayan diberi keselamatan pada saat mencari nafkah.

Desa Tegalretno merupakan desa yang secara geografis berada di wilayah pesisir dan beberapa masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan masih menyelenggarakan tradisi sedekah laut. Tradisi tersebut diselenggarakan setiap satu tahun sekali di Desa Tegalretno tepatnya di Pantai Tegalretno. Biasanya tradisi tersebut dilaksanakan pada bulan *syuro* tepatnya pada malam jum'at kliwon tergantung pada kesepakatan antara para nelayan dan tokoh sesepuh Desa Tegalretno. Adapun rangkaian kegiatan dalam tradisi sedekah

laut ini yakni memberikan santunan kepada anak yatim dan lansia sebelum pelaksanaan ritual sedekah laut, inti acara sedekah laut, dan hiburan untuk masyarakat Desa Tegalretno.

Pada saat pelaksanaan tradisi sedekah laut, masyarakat Tegalretno dan para nelayan yang tergabung dalam kelompok Mina Barokah melarung sesaji ke tengah laut menggunakan kapal dan melakukan ritual doa bersama. Biasanya sesaji pada tradisi sedekah laut berisikan tumpeng, lepet, ketupat, pisang raja, pisang emas, jagung, kelapa muda, dan umberampenya. Sesaji tersebut ditempatkan pada wadah yang berbentuk rumah joglo kemudian dilarung ke tengah laut. Sesaji memiliki makna tersendiri yakni suatu bentuk perjuangan masyarakat Tegalretno yang ihklas ingin bersedekah sebagai wujud rasa syukur dan mengharap semoga Tuhan melihat kebaikan mereka serta berharap mendapat keberkahan ataupun nilai tambah. Tak hanya itu, sesaji adalah bentuk memberi barang-barang yang pantas, barang yang dianggap *aji* (berharga) bagi mereka, atau barang yang memiliki nilai lebih yang dipersembahkan kepada Sang Pencipta dan Sang Dewi Laut (penjaga laut yang mereka yakini. Setelah sesaji yang berbentuk rumah joglo telah dilarung, para nelayan,

sesepuh Desa Tegalretno, dan masyarakat melakukan ritual doa bersama.

Tradisi sedekah laut yang dilaksanakan di pantai Tegalretno ini bermaksud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang telah dilimpahkan serta sebagai *nguri-nguri* budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kepada generasi selanjutnya. Tak hanya itu, kegiatan sedekah laut juga sebagai mempromosikan objek wisata yakni Laguna Kalibuntu yang dapat dijadikan media pembelajaran bagi pelajar sehingga ramai yang datang. Dengan adanya tradisi tersebut maka akan semakin banyak yang mengetahui keberadaan objek wisata Laguna serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tegalretno.

6. Struktur Sosial Politik

Desa merupakan unit terkecil dari sebuah pemerintahan. Dalam melaksanakan roda pemerintahan desa terdapat penyelenggara pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa Tegalretno sebagai penyelenggara pemerintahan desa mempunyai visi yakni “Terwujudnya Desa Tegalretno mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang

sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, demokratis, dan peduli terhadap lingkungan”.

Desa Tegalretno dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Bapak Supriyanto. Kepala desa ini telah menjabat 2 periode yakni pada tahun 2013-2019 dan 2019 hingga saat ini. Dalam pemilihan kepala desa diselenggarakan secara demokratis dimana rakyat dapat memberikan suara secara langsung di tempat pemungutan suara. Pada pemilihan kepala desa tahun 2013, Bapak Supriyanto mendapat lawan yakni seorang mantan kepala desa sebelumnya. Namun, karena masyarakat menginginkan pergantian kepala desa yang lain maka Bapak Supriyanto memenangkan suara. Kemudian, pada tahun 2019, Bapak Supriyanto mencalonkan kembali dirinya dan mendapat lawan perangkat desanya sendiri yakni seorang kadus (kepala dusun) bernama Surtijan. Pengalaman dan latar belakang menjadi kepala desa di periode sebelumnya atau disebut petahana membuat Bapak Supriyanto menang kembali dalam pemilihan tersebut (Hikmah, 2023).

Sementara, pada pemilihan presiden tahun 2019, masyarakat Desa Tegalretno mayoritas memilih Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebesar 84,11% suara dan lawannya hanya mendapat 15, 89% suara. Masyarakat Desa

Tegalretno pada pemilu 2019, pemilihan anggota DPR RI maupun DPRD Kabupaten/Kota lebih memilih calon anggota yang partai politiknya adalah PKB. Adapun yang lainnya yakni Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Garuda, PKS, dan sebagainya menjadi minoritas suara di desa tersebut. Mayoritas masyarakat yang memilih partai PKB dikarenakan latar belakang dari organisasi masyarakat Desa Tegalretno yang mengikuti NU (Nahdlatul Ulama).

B. Lanskap Kawasan *Shrimp Estate*

1. Konsep *Shrimp Estate*

Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi atau disebut dengan *shrimp estate* merupakan salah satu program terobosan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimana udang menjadi komoditas unggulan ekspor. *Shrimp estate* adalah skema budidaya udang berskala besar yang mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan dan dibangun secara modern. Dalam proses produksi, *shrimp estate* akan memanfaatkan teknologi agar hasil panennya lebih optimal, mencegah penyakit, serta ramah lingkungan selaras dengan konsep budidaya terintegrasi. Konsep tersebut seperti pendekatan konsep hulu hingga hilir, korporasi perikanan budidaya berbasis kawasan dan *zero waste*, hilirisasi produk

perikanan budidaya, akuakultur modern 4.0, dan pengolahan kawasan budidaya tambak udang secara terintegrasi. Adanya pembangunan *shrimp estate* ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tambak menjadi 40 Ton/Ha/Siklus serta *sustainability* tambak melalui penerapan budidaya yang adaptif dan ramah lingkungan dalam satu kawasan (Indah, 2021).

Pembangunan budidaya udang berbasis kawasan ini merupakan lahan kosong dan tambak *existing* tradisional dengan produktivitas 0,6 ton/ha/tahun. Tambak tradisional sebelumnya belum memiliki hal-hal yang menunjang produktivitas udang seperti bentuk yang tidak beraturan, tidak adanya tandon dan instalasi pengolahan air limbah, serta belum ada mekanisasi. Pembangunan budidaya udang berbasis kawasan atau *shrimp estate* dibangun di atas lahan seluas 100 hektare, namun realisasi yang terjadi pada tahun 2022 baru 60 hektare dengan menerapkan konsep tambak ramah lingkungan. Tambak udang berbasis kawasan di Kebumen ini akan memproduksi 40 ton/ha/siklus dan meningkatkan teknologi seperti penerapan tandon, saluran inlet dan outlet terpisah, penerapan IPAL, peningkatan padat tebar, pengatur petak pemeliharaan, mekanisasi yang menggunakan kincir 100 unit per

ha, pompa, serta manajemen kesehatan ikan dan udang (Maskar, 2023). Berikut ini gambar selamat datang di tambak udang berbasis kawasan di Kebumen :

Gambar 4. Logo atau Selamat Datang Budidaya Udang Berbasis Kawasan



Sumber: Dokumentasi Pribadi Januari 2023

Pemilihan model pengembangan kawasan budidaya perikanan terintegrasi atau *shrimp estate* untuk diimplementasikan di Kebumen tentu memiliki beberapa alasan yakni sebagai berikut:

- a. Keberlanjutan produksi 40 Ton/Ha/Siklus.
- b. Desain dan tata letak mengantisipasi dampak perubahan iklim berupa potensi gelombang tinggi dan kenaikan muka laut.
- c. Menerapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mampu menimalisir potensi pencemaran karbon dari air buangan tambak.

- d. Penggunaan plastik HDPE yang mampu meminimalisir potensi emisi carbon ketika tidak beroperasi.
- e. Menerapkan teknologi modern dan ramah lingkungan.
- f. Menerapkan bioserkuriti yang ketat dan konsisten serta penerapan manajemen kesehatan ikan pada setiap proses produksi.
- g. Menerapkan keseimbangan ekologi dengan mempertahankan fungsi mangrove.

Program budidaya udang berskala besar ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Dikatakan demikian karena komoditas udang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2020 dimana nilai ekspor udang sebesar 239,23 ribu ton. Selain itu, pada tahun 2019 Indonesia berada di urutan kelima esportir udang dunia. Oleh sebab itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimplementasikan program inovasi terbaru yakni *shrimp estate* dan menargetkan peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 250% pada tahun 2004. Tak hanya itu, KKP mengharapkan apabila model kawasan *shrimp estate* ini berhasil maka dapat dikembangkan di wilayah lain dengan

model yang sama dengan mengembangkan potensi budidaya di masing-masing wilayah.

2. Lokasi Budidaya Udang Berbasis Kawasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan program kawasan budidaya perikanan terintegrasi atau *shrimp estate* telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan menentukan lokasi pengembangan tersebut di Kabupaten Kebumen, Jawa tengah. Wilayah Kebumen menjadi pilihan untuk implementasi model tersebut karena memiliki potensi untuk mengembangkan budidaya udang vaname dan sesuai dengan kriteria teknis budidaya udang melalui model pengembangan kawasan budidaya terintegrasi sehingga ditargetkan menjadi pelopor budidaya udang yang modern di Indonesia dengan hasil produktivitas dan kualitas yang tinggi. Selain itu, Kebumen memiliki potensi lahan yang luas dan siap dikembangkan serta status lahan yang *clean* dan *clear*. Faktor lainnya berupa akses menuju infrastruktur pendukung yang mudah dan tersedia, serta dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah serta masyarakat. Adapun titik lokasi yang menjadi pengimplementasian model *shrimp estate* yakni Desa Tegalretno, Karanggadung, dan Desa Jogosimo (Ditjen Perikanan Budidaya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021).

Penentuan lokasi yang dipilih dalam pembangunan kawasan *shrimp estate* tentu memperhatikan kemudahan teknis yakni keuangan yang layak dan meminimalisir resiko yang terjadi. Adapun persyaratan lokasi yang dipakai untuk pembangunan kawasan *shrimp estate* ialah tersedianya sumber air yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas air dan tanah juga menjadi hal penentu dan syarat pembangunan *shrimp estate* yakni tanah yang terletak di daerah pantai dengan struktur liat atau liat berpasir harus mampu dipadatkan agar tanah tidak mudah pecah dan dapat menahan air. Tak hanya itu, lokasi pembangunan *shrimp estate* harus terhindar dari banjir dan limbah pencemaran. Syarat lainnya adalah tersedianya sarana transportasi maupun komunikasi yang nantinya dapat mempermudah terjadinya jual beli atau pengiriman (Indah, 2021).

Budidaya Udang Berbasis Kawasan atau *shrimp estate* ini telah diresmikan oleh presiden Republik Indonesia yakni Ir. H. Joko Widodo dan *stakeholder* lainnya pada tanggal 9 Maret 2023. Kawasan tersebut memiliki beberapa sarana prasarana yang letaknya satu kawasan dengan tambak udang tersebut. Sarana prasarana tersebut diantaranya :

- a. Kantor utama yang di dalamnya terdapat ruang pimpinan, bagian administrasi, dan sebagainya. Berikut ini gambarnya :

Gambar 5. Kantor Utama Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK)



Sumber : Dokumentasi Pribadi Januari 2023

- b. Tandon klaster seluas 880 m² dengan jumlah sebanyak 16 kolam yang berfungsi sebagai petakan kolam treatment air budidaya sebelum didistribusikan ke petak kolam pemeliharaan.

Gambar 6. Tandon yang ada di Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK)



Sumber : Dokumentasi BUBK

- c. Kincir air pada tambak udang memiliki peran penting yakni sebagai pemasok oksigen di perairan tambak udang.

Gambar 7. Kincir air di kolam shrimp estate



Sumber : Dokumentasi Pribadi Januari 2023

- d. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah berfungsi untuk mengolah air buangan yang berasal dari kegiatan pembesaran udang.

Gambar 8. IPAL yang ada di BUBK



Sumber : Dokumentasi BUBK

- e. Petak pemeliharaan sebagai kolam tambak udang

Gambar 9. Kolam tambak udang atau petak pemeliharaan



Sumber : Dokumentasi BUBK

f. Bangunan pasca panen

Gambar 10. Bangunan pasca panen di BUBK



Sumber : Dokumentasi Pribadi Januari 2023

- g. Gudang pakan sebagai tempat penyimpanan makanan atau pakan untuk udang vaname
- h. Rumah genset sebanyak enam unit yang digunakan untuk tempat penyimpanan dan operasional mesin genset
- i. Laboratorium yang ada di kawasan *shrimp estate* seluas 616 m² terbagi menjadi dengan kisaran yang sama dan bertujuan untuk pengamatan serta pengujian kesehatan udang dan kualitas lingkungan.

BAB IV

PRAKTIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN *SHRIMP ESTATE*

Pada bagian ini, penulis mengulas praktik pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen melalui pembangunan kawasan *shrimp estate* (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi). Kawasan *shrimp estate* merupakan program kerjasama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Kawasan tersebut juga sebagai anak induk dari BLUPPB (Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya) Karawang. Pembangunan *shrimp estate* dimulai pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Kemudian, kawasan ini telah diresmikan oleh presiden Indonesia yakni Ir. Joko Widodo pada tanggal 9 Maret 2023 bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Kabupaten Kebumen. Pembangunan kawasan *shrimp estate* dilakukan di atas lahan milik pemerintah daerah dan merupakan daerah potensial.

Sebelum adanya pembangunan kawasan *shrimp estate*, lahan tersebut digunakan oleh masyarakat setempat sebagai mata pencaharian mereka yakni penambak udang, *penderes* kelapa, dan nelayan. Namun, seiring adanya

pelaksanakan pembangunan terdapat kontra yang disampaikan masyarakat pada *stakeholder* karena mereka merasa terimbas dan lahannya digunakan. Hal tersebut sebagai bentuk masyarakat yang diberdayakan dengan adanya pembangunan *shrimp estate*. Dalam hal ini, penulis mengulas proses pembangunan kawasan *shrimp estate* dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan *shrimp estate*. Selain itu, pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan pihak pengelola kawasan *shrimp estate* untuk tenaga lokal sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian, pemberdayaan melalui *shrimp estate* direlevansikan atau dikaitkan dengan teori pemberdayaan masyarakat sebagai transformasi sosial.

A. Proses Pembangunan Kawasan *Shrimp Estate*

Desa Tegalretno merupakan wilayah pesisir yang mempunyai potensi cukup beragam. Pada desa tersebut terdapat pantai Tegalretno yang dapat dikunjungi oleh masyarakat lokal namun belum dikelola dengan baik sehingga masyarakat yang berwisata di pantai tersebut tidak dikenai biaya masuk. Selain itu, adanya bangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tegalretno sebagai tempat perdagangan ikan antara nelayan, pedagang, maupun masyarakat sekitar. Di daerah yang berdekatan dengan pantai Tegalretno juga terdapat lahan yang digunakan masyarakat sekitar yakni kolam tambak udang, area pertanian seperti kelapa, jagung, padi, dan sebagainya sebagai mata pencaharian. Lahan tersebut

merupakan lahan milik pemerintah yang dapat dipakai masyarakat sekitar untuk bekerja disana. Berikut gambar Desa Tegalretno bagian selatan sebelum adanya pembangunan *shrimp estate* :

Gambar 11. Kawasan Pesisir Desa Tegalretno



Sumber : Arsip Dokumentasi Narasumber Mas Arif

Kawasan di atas merupakan sumber pendapatan masyarakat Desa Tegalretno dimana lahan tersebut pada mulanya sebagai hibah dari pemerintah daerah untuk masyarakat agar digunakan sebagai mata pencaharian. Salah satu masyarakat Desa Tegalretno yang penulis wawancarai bernama Bapak Muzaki menggunakan lahan tersebut untuk bekerja sebagai penambak udang. Berdasarkan hasil wawancara, bapak Muzaki mengatakan bahwa :

“Lahan di daerah pantai itu ya lahan kosong milik pemerintah, tetapi masyarakat boleh menggunakannya untuk menambak udang, bertani seperti pepaya, jagung, terus ada

yang *menderes* kelapa. Saya juga sudah lama menggunakannya” (Muzaki, 2023).

Meskipun demikian, mereka juga harus izin dan memiliki sertifikat hak guna pakai dimana terdapat retribusi yakni sebesar 1.500 per meter terkhusus kolam penambak udang. Selain itu, lahan tersebut juga digunakan untuk *menderes* kelapa yang sudah ditanami oleh salah satu masyarakat Desa Tegalretno. Hasil dari *menderes* kelapa dijadikan gula merah dan menjualnya di pasar.

Pada tahun 2021, kawasan pesisir sebagai lahan potensial di Desa Tegalretno dijadikan objek pembangunan kawasan *shrimp estate* (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Pembangunan kawasan tersebut berawal dari kunjungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni Sakti Wahyu Trenggono ke Kabupaten Kebumen. Pada saat itu, kedatangan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk memonitoring bantuan dari Kementerian untuk masyarakat desa. Hal ini dikarenakan terdapat desa yang menerima sarana dan prasarana budidaya udang pada bulan Maret tahun 2021. Dalam kunjungan Kementerian ke Kebumen tentu didampingi oleh *stakeholder* lainnya seperti Bupati Kabupaten Kebumen, Forkopimda, Danramil, Kapolres,

dan lain sebagainya. Selain memonitoring, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melihat langsung tambak-tambak tradisional yang ada di masyarakat desa tersebut.

Setelah melihat langsung tambak yang ada, tercetuslah ide atau inovasi dari Bupati Kabupaten Kebumen agar ada tambak modern di Kabupaten Kebumen. Hal ini dikarenakan potensi budidaya tambak udang yang ada di Kabupaten Kebumen sangat besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat potensi tersebut di Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, akan tetapi setelah dilihat melalui pantauan penglihatan udara ternyata potensi tersebut sampai Desa Tegalretno dan Desa Karanggadung. Melihat potensi tersebut, pada akhirnya dalam jangka waktu satu bulan tim khusus datang untuk melihat potensi dari timur hingga barat. Dari hasil pantauan, dijelaskan terkait tanah Pemerintah Daerah sekitar puluhan hektar dari Tanggulangin sampai Klirong yang kemudian disajikan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga mendapatkan lampu hijau atau persetujuan.

Proses perencanaan pembangunan kawasan *shrimp estate* diperdalam lebih lanjut mulai dari tahap persiapan rencana anggaran sampai persiapan kerjasama sehingga pada bulan Mei, Juni, Juli mulai dipercepat untuk persiapannya dari tahap pengerjaan mencari titik

koordinatnya yang mendatangkan langsung konsultan-konsultan ke Desa Tegalretno. Kemudian datang juga tim khusus untuk membicarakan kerjasama serta membuat naskah kerjasama sehingga pada tanggal 12 Agustus tahun 2021 diresmikan penandatanganan MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangkan konsultan perencana, konsultan desain, dan sebagainya serta menetapkan desain yang sah terkait pembangunan kawasan *shrimp estate*. Pasca MoU, Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen bersama *stakeholder* lainnya mensosialisasikan ke masyarakat tentang bagaimana rencana tambak udang di Desa Tegalretno dan melibatkan para petambak yang ada, petani, pekebun. Hal tersebut juga dilakukan di Desa Jogosimo dan Desa Karanggadung.

Pada saat pembangunan *shrimp estate*, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggandeng PT. Adhikarya sebagai kontraktornya. PT tersebut melakukan kesepakatan dengan kementerian karena sudah memenangkan *tender*. Artinya, PT. Adhikarya yang melaksanakan pembangunan *shrimp estate* di Desa Tegalretno. Dalam pembangunan tersebut, PT. Adhikarya juga melibatkan tenaga lokal sebagai tenaga kerja lapangan dengan jumlah yang tidak pasti sesuai kebutuhan (Fahmi, 2023).

Pembangunan *kawasan shrimp estate* ini direncanakan sekitar 100 hektar dan melewati tiga desa yakni Desa Karanggadung, Desa Tegalretno, dan Desa Jogosimo. Adapun rencana lahan yang akan digunakan yaitu Desa Karanggadung berkisar 35,05 Ha dengan status sertifikat hak pakai milik Pemda, Desa Tegalretno berkisar 52,20 Ha dengan status sertifikat hak pengelolaan, dan Desa Jogosimo berkisar 12,75 Ha dengan status sertifikat hak pakai milik Pemda. Pembangunan *kawasan shrimp estate* pun dimulai pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2023 yang dilaksanakan oleh PT. Adhikarya sebagai kontraktornya. Namun, dalam pelaksanaannya baru sekitar 60% lahan potensial tersebut digunakan untuk pembangunan *shrimp estate*. Berikut ini gambar proses pembangunan *shrimp estate* :

Gambar 12. Pembangunan Kawasan Shrimp Estate di Desa Tegalretno



Sumber : Arsip Dokumentasi Narasumber Mas Arif

Pada saat proses pembangunan berlangsung, masyarakat Desa Tegalretno tidak dilibatkan secara langsung dalam perencanaan pembangunan kawasan tersebut. Artinya, masyarakat hanya mengikuti sosialisasi terkait pembangunan kawasan *shrimp estate*. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan program pemerintah dan masyarakat yang memiliki kolam tambak udang hanya diminta untuk mengosongkan kolamnya. Selain itu, masyarakat hanya bernegosiasi terhadap pemerintah atas lahan tambak udang yang mereka miliki untuk diganti rugi karena mereka khawatir lahannya terimbas oleh pembangunan. Namun, pemerintah tidak akan mengganti rugi lahan tersebut dan meyakinkan masyarakat bahwa tambak udang miliknya tidak akan terkena pembangunan kawasan *shrimp estate*. Pada saat pembangunan berjalan, PT Adhikarya membongkar TPI Tegalretno secara diam-diam dimana tempat tersebut sebagai fasilitas perdagangan para nelayan dan masyarakat sekitar Desa Tegalretno. Hal tersebut senada dengan pendapat dari Bapak Muzaki yang mengatakan bahwa :

“Saat pembangunan PT itu kan membongkar TPI, saya tidak tahu. Saat saya menengok kawasan pesisir itu udah ada orang yang membongkar genting TPI. Trus saya tanya pada Ketua Kelompok Nelayan dan mereka juga tidak tahu” (Muzaki, 2023).

Maka dari itu, pembongkaran TPI tanpa diketahui masyarakat Desa Tegalretno membuat para nelayan mengalami kesulitan dalam berniaga ikan. Pada saat TPI ini dibongkar, para nelayan disarankan untuk berdagang di kecamatan sebelah tepatnya di TPI Tanggulangin, Klirong. Beberapa nelayan ada yang menjual di TPI tersebut akan tetapi sebagian besar masyarakat enggan disana dikarenakan letaknya yang terlalu jauh. Oleh sebab itu, mereka memilih untuk menjajakan hasil tangkapan ikan di depan rumah.

Pembongkaran TPI akibat adanya pembangunan *shrimp estate* telah diusulkan oleh nelayan Desa Tegalretno pada pemerintah dan akan diganti sesuai dengan peta rencana pembangunan. Namun, tempat TPI yang akan dibangun telah tergerus oleh muara sehingga sampai saat ini belum adanya penggantian TPI Tegalretno. Selain itu, pembangunan kawasan *shrimp estate* menyebabkan sulitnya akses nelayan untuk keluar masuk. Hal tersebut sebagaimana yang diungkap Bapak Ahmad Daezin selaku Kelompok Nelayan dan berkata :

“Kemarin TPI dibongkar trus mau dibuatkan lagi ya pada awal mulanya tidak ada problem namun sekarang adanya *shrimp estate* juga membuat akses nelayan juga sukar untuk menaruh perahunya ditambah kemarin musim paceklik dan mendapat informasi dari teman yang pergi

berlayar itu hanya mendapat uang Rp. 300.000,00 dan itu tidak cukup untuk bahan bakarnya” (Daezin, 2023).

Meskipun pembangunan *shrimp estate* terus berjalan, tetapi kelompok nelayan menginginkan adanya TPI yang dibangun kembali dan jalan untuk keluar masuk. Hal ini dikarenakan aktivitas para nelayan yang di laut sehingga membutuhkan akses untuk mempermudah nelayan. Dikatakan demikian, pada awal mula di peta pembangunan *shrimp estate* itu terdapat jalan dan bangunan TPI, namun saat mendapatkan informasi dari nelayan lain bahwasanya gumpuk pasir yang dahulu dilewati kini telah diratakan.

Proses pembangunan *shrimp estate* juga berimplikasi pada para *penderes* kelapa di atas lahan hak guna pakai. Para *penderes* kelapa mendapatkan sumber pendapatan dari hasil *menderes* air nira kelapa yang kemudian dimanfaatkan untuk membuat gula aren dan dijual di pasar. Salah satu masyarakat Desa Tegalretno sebagai *penderes* kelapa yang terimbas pembangunan kawasan *shrimp estate* adalah Bapak Sumartin. Beliau memiliki 100 pohon kelapa yang berada di pesisir Desa Tegalretno yang kini sebagai tempat pembangunan *shrimp estate*. Pembangunan tersebut telah menebang pohon miliknya hampir keseluruhan dan mengakibatkan berhentinya produksi

gula aren. Hal ini disampaikan oleh Ibu Marhati selaku istri Bapak Sumartin yang berpendapat bahwa :

“Ya kemarin pas ada pembangunan tambak udang di selatan itu menebang hampir seluruh pohon kelapa. Jadi bapak udah tidak menderes kelapa semenjak pembangunan itu. Trus saya juga sudah tidak pernah buat gula lagi. Kemarin itu ada sisa pohon sekitar 5 yang belum ditebang tapi bapak juga was was mau *menderes* kelapa lagi atau tidak takutnya ya ditebang” (Maharti, 2023).

Penebangan pohon kelapa membuat para *penderes* kelapa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan berimplikasi pada pemberhentian produksi gula. Melihat hal tersebut, rencananya akan ada ganti rugi terkhusus Desa Tegalretno namun sampai saat ini belum ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah.

Proses pembangunan kawasan *shrimp estate* di Desa Tegalretno telah memberdayakan dan berdampak pada masyarakat sekitar. Dalam hal ini masyarakat mengalami kerugian sehingga menimbulkan kontra di tengah masyarakat Desa Tegalretno. Beberapa masyarakat ada yang melakukan demonstrasi dan memasang tulisan di kawasan pesisir selatan Desa Tegalretno. Selain itu, terdapat masyarakat yang telah melakukan penghijauan di dekat muara namun digusur atau diratakan oleh pembangunan kawasan *shrimp estate*. Meskipun demikian, pada akhirnya masyarakat

Desa Tegalretno menerima adanya pembangunan *shrimp estate* dikarenakan memang lahan yang menjadi hak guna pakai masyarakat dari pemerintah daerah telah habis masa pakai yang tertera pada sertifikat sehingga lahan tersebut kembali menjadi milik pemerintah daerah. Pembangunan kawasan *shrimp estate* pun terus berjalan hingga pembangunan tersebut telah selesai pada awal Januari tahun 2023.

B. Pelibatan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan *Shrimp Estate*

Pada pemberdayaan masyarakat tentu melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengembangan berbagai aktivitas program guna meningkatkan taraf hidup maupun kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kemandirian baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, konsep pembangunan haruslah mengedepankan partisipasi sebagai dasar strategi dalam memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan menjadikan masyarakat sebagai *people centered* (subjek pembangunan) yang harus terlibat aktif pada rangkaian proses pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring. Konsep tersebut sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan yang memandang inisiatif dari rakyat selaku sumber daya utama pada pembangunan.

Namun, konsep lain menyebutkan bahwa partisipasi sebagai *elit capture*. Istilah tersebut dimaknai sebagai situasi pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM, birokrasi, dan aktor lain yang terlibat langsung dalam program partisipatif justru melakukan praktik yang jauh dari prinsip partisipasi sehingga terjadi pengambilan keputusan dan implementasi program yang sepihak guna mendapatkan manfaat secara individu. Adanya *elite capture* ini sebagai implikasi negatif dari hubungan kekuasaan dan upaya mendapatkan manfaat dari proses pembangunan dan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dengan demikian, konsep partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah partisipasi transformatif. Konsep tersebut mengarah pada upaya perubahan dan pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus terlibat langsung dalam pembangunan melalui pemberdayaan dan mengetahui apa yang diputuskan dan manfaat apa yang diambil saat program berjalan atau diimplementasikan (Alfitri, 2011).

Pembangunan kawasan *shrimp estate* yang melewati tiga desa yakni Desa Karanggadung, Desa Tegalretno, dan Desa Jogosimo tentu melibatkan banyak pihak dimana salah satunya adalah masyarakat sebagai *people centered*. Sebelum proses pembangunan kawasan *shrimp estate* terdapat sosialisasi perencanaan pembangunan dimana melibatkan *stakeholder* seperti

Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kecamatan Petanahan, Kepala Desa, dan tentunya masyarakat seperti penambak udang, *penderes* kelapa, dan sebagainya. Pada sosialisasi yang dimulai pada 13 Agustus tahun 2021 di Balai Desa Tegalretno, para *stakeholder* memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perencanaan pembangunan kawasan *shrimp estate* terkhusus lahan yang akan digunakan dalam pembangunan. Dalam sosialisasi tersebut, para *stakeholder* menyampaikan beberapa poin penting yakni pertama, terkait lahan yang digunakan dalam pembangunan kawasan *shrimp estate* sekitar 100 Ha dengan status milik pemerintah daerah sehingga masyarakat yang memiliki kolam tambak udang khususnya di Desa Tegalretno akan dilewati dan dikosongkan. Kedua, bahwasanya masyarakat harus mendukung adanya program kawasan *shrimp estate* ini karena nantinya akan menyejahterakan masyarakat dan tentu melibatkan tenaga kerja lokal.

Namun, proses sosialisasi tersebut hanya melibatkan beberapa pihak semata. Dikatakan demikian, salah satu masyarakat Desa Tegalretno bernama Bapak Muzaki yang memiliki kolam tambak udang tidak dilibatkan dan berpendapat bahwa :

“inginnya ya sebelum pembangunan diajak diskusi tapi saya tidak diikutkan malah paling dihindari” (Muzaki, 2023).

Berbeda halnya dengan pendapat dari Bapak Ahmad Daezin selaku perwakilan kelompok nelayan yang terlibat dalam proses sosialisasi pembangunan kawasan *shrimp estate* dan mengatakan bahwa :

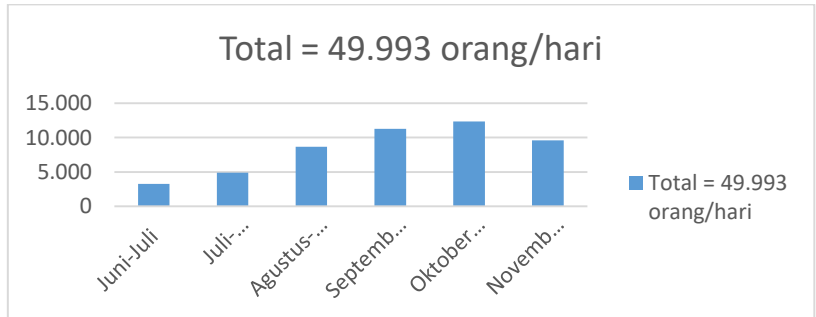
“Ya saya ikut hadir dalam sosialisasi pembangunan *shrimp estate* di Balai Desa Tegalretno. Disana saya juga mengusulkan untuk membangun TPI yang baru dan akses keluar masuk untuk nelayan” (Daezin, 2023).

Tak hanya itu, masyarakat Desa Tegalretno terkhusus petambak udang mengusulkan dan meminta ganti rugi lahan berkisar sejumlah luas lahan yang terdampak akibat pembangunan kawasan *shrimp estate*. Pendapat maupun usulan dari masyarakat Desa Tegalretno terkhusus warga yang terdampak adanya pembangunan kawasan *shrimp estate* dalam sosialisasi adalah bentuk dari keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat secara langsung terlibat aktif dan menyampaikan pendapatnya mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat akibat pembangunan *shrimp estate*.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan *shrimp estate* tidak hanya sebatas pada perencanaan semata, tetapi juga dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat Desa Tegalretno, Desa Karanggadung, dan Desa Jogosimo ikut serta pada pembangunan *shrimp estate* sebagai pekerja lapangan atau tenaga kerja kasar yang

membantu PT. Adhikarya. Berikut ini grafik serapan tenaga kerja lokal selama pembangunan kawasan *shrimp estate* berlangsung :

Gambar 13. Grafik Tenaga Kerja Lokal Dalam Pembangunan Kawasan *Shrimp Estate*



Sumber: Arsip Data dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kab. Kebumen

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap bulannya pembangunan kawasan *shrimp estate* terus menyerap tenaga kerja lokal dari ketiga desa. Namun, tenaga lokal yang diserap untuk pembangunan kawasan *shrimp estate* adalah para pekerja lapangan atau pekerja kasar. Hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan di Desa Tegalretno sendiri yang masih rendah dimana tingkat pendidikannya berada pada tamatan SD maupun SMP. Tak hanya dalam pembangunan semata, kawasan *shrimp estate* saat ini juga telah menyerap tenaga kerja lokal untuk menjadi karyawan di Budidaya Udang Berbasis Kawasan sekitar 115 orang terkhusus Desa

Tegalretno sebanyak 40 orang. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan ini cukup aktif.

Pada pemberdayaan masyarakat terdapat pelatihan yang bertujuan untuk mengasah *softskill* yang dimiliki oleh individu. Saat pembangunan kawasan *shrimp estate* masih berjalan, Pemerintah Desa Tegalretno dan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kebumen telah menggandeng BBPBAP (Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau) di Jepara. Kerjasama tersebut dalam rangka pelatihan para tenaga kerja lokal sebelum masuk dan menjadi karyawan Budidaya Udang Berbasis Kawasan. Pelatihan tersebut berlangsung selama 5 hari dan dibagi dalam 2 gelombang. Adapun peserta yang berpartisipasi dalam pelatihan ini cukup banyak yakni sekitar 75 orang per gelombang. Dalam pelatihan tersebut banyak ilmu yang berharga dan nantinya dapat diaplikasikan di Budidaya Udang Berbasis Kawasan atau *shrimp estate*. Hal tersebut senada dengan ungakapan dari Bapak Arul selaku pekerja di *shrimp estate* dan mengikuti pelatihan di Jepara yang mengatakan bahwa :

“Ya saya ikut pelatihan di BBPBAP (Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau) dimana itu yang tertua di Indonesia. Kita seminggu disana dan kita belajar dari yang pertama teori dahulu tentang bagaimana mengurus kolam, bagaimana mengurus

udang. Udang kan hidup ya *mba* jadi tidak sembaranganlah dan dituntut untuk siap menjaga. Seminggu disana itu dua harinya teori terus berikutnya di lapangan. Disitu kita mengukur air untuk salinitas air, keasinan air, dan macam sebagainya. Belajar tentang pembersihan kolam udang, memberi pakan udang, dan ya banyak *mba* karena disana lengkap” (Rasyid, 2023).

Adanya pelatihan di Jepara ini memberikan pengetahuan untuk para tenaga kerja lokal di *shrimp estate*. Hal tersebut dikarenakan metode atau tata cara dalam mengelola udang tidak jauh berbeda seperti di Jepara.

Berdasarkan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kawasan *shrimp estate* di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dapat dikatakan telah melibatkan masyarakat sekitar mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, hingga menyerap tenaga kerja lokal di *shrimp estate*. Oleh karenanya, *elit capture* pada pembangunan *shrimp estate* ini tidak tergambar. Hal tersebut ditandai dengan adanya keterlibatan oleh seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan dimana usulan maupun pendapat yang disampaikan oleh masyarakat pada *stakeholder* juga diterima dan baru beberapa telah direalisasikan. Dengan demikian, pembangunan *shrimp estate* ini menggunakan partisipasi transformatif

dimana terdapat perubahan melalui pemberdayaan sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan, apa yang diputuskan, dan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

C. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan *Shrimp Estate* Sebagai Transformasi Sosial

Berdasarkan pemaparan uraian teori yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab dua bahwasanya pemberdayaan masyarakat muncul akibat kegagalan dari paradigma pembangunan yang mana tidak mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan seperti penciptaan lapangan kerja, menghapus kesenjangan, menghapus kemiskinan, dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat adalah memberikan daya, kekuatan pada pihak lain dengan tujuan untuk memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentu memiliki prinsip-prinsip diantaranya kesetaraan, partisipasi, kemandirian, berkelanjutan, ekologi dan gender. Pada pembangunan *shrimp estate*, apabila dilihat dari prinsip tersebut maka hanya memenuhi prinsip partisipasi, keberlanjutan, dan ekologi. Hal ini ditandai pada prinsip partisipasi yakni pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal dan diberikan pelatihan oleh *stakeholder*. Kemudian, pada prinsip keberlanjutan yakni adanya rencana memperluas pembangunan kawasan *shrimp estate* menjadi 100 ha yang semula masih 60 ha serta akan membuat pabrik udang di area

tersebut. Pada prinsip ekologi yakni upaya penanaman pohon cemara sewu di sekitar kawasan *shrimp estate* agar tidak terjadi abrasi serta adanya saluran IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebagai teknologi yang memproses air limbah udang sebelum dilakukan pembuangan agar tidak mencemari laut. Sementara prinsip lainnya yakni kesetaraan, kemandirian, dan gender masih belum terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan memandirikan untuk kehidupan yang lebih baik harus memerlukan transformasi sosial. Transformasi sosial dapat dikatakan sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru. Dalam perubahan sosial yang menjadi agenda utama dari setiap gerakan sosial terdapat sebuah pilihan yakni perubahan yang sekedar reformatif atau perubahan yang transformatif. Perubahan sosial reformatif menekankan pada upaya mendorong masyarakat miskin untuk mengejar ketertinggalan dan keterbelakangannya dari masyarakat maju. Sementara perubahan yang transformatif lebih menekankan pada perubahan yang dilakukan mendasar yakni sistem dan struktur. Transformasi sosial memiliki bentuk yang beragam dan penulis memaparkan bentuk transformasi sosial ekonomi dan transformasi pengetahuan pada masyarakat Desa Tegalretno melalui pembangunan kawasan *shrimp estate* sebagai pemberdayaan masyarakat. Berikut uraiannya :

1. Transformasi Sosial dan Ekonomi

Desa Tegalretno merupakan wilayah pesisir selatan yang mempunyai beragam potensi. Potensi tersebut diantaranya pertanian, wisata, budidaya udang, dan sebagainya. Berbagai potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat pesisir untuk memperoleh pendapatan. Salah satu potensi Desa Tegalretno yaitu tambak udang tradisional yang dikelola oleh beberapa warga di atas lahan hak guna pakai menjadi sumber penghasilan masyarakat sekitar. Tambak udang tersebut pada awal mulanya menggunakan cara-cara tradisional yang memiliki beberapa permasalahan yakni sebagai berikut :

- a. Pendangkalan dan kerusakan saluran irigasi tambak, sarana prasarana yang terbatas seperti listrik, BBM, jalan produksi, dan sebagainya.
- b. Mengakibatkan penurunan kualitas air dan udang mudah terkena penyakit.
- c. Kesulitan dalam permodalan dan cara mengaksesnya.
- d. Benih bermutu bebas penyakit sangat terbatas.
- e. Penguasaan teknologi udang berkelanjutan oleh masyarakat belum secara penuh dikuasai serta adanya pendampingan teknologi yang minim.
- f. Hulu hilir yang belum dikelola dengan baik.
- g. Manajemen usaha yang belum dikuasai.

Pernmasalahan tersebut dinilai tidak sesuai dengan target produksi yang ingin dicapai karena hanya mampu memproduksi udang sekitar 0,6 ton/tahun/Ha serta tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu, perlunya strategi baru untuk memberdayakan masyarakat dengan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Berangkat dari kelemahan yang ada pada tambak tradisional di Desa Tegalretno diperlukannya program pemberdayaan yang mensejahterahkan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan kawasan *shrimp estate* atau Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan yang mana pembangunan tersebut sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kawasan *shrimp estate* dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah sekitar 100 Ha. Kawasan tersebut menggunakan konsep pembangunan dari hulu hingga hilir dan menjadikannya dalam satu kawasan yang meliputi kantor utama, laboratorium, gudang pakan, dan sebagainya dengan teknologi ramah lingkungan seperti IPAL, tandon, saluran intake. Munculnya inovasi konsep *shrimp estate* ini dilihat dari adanya potensi lahan yang ada di

kawasan pesisir selatan dari Desa Karanggadung, Desa Tegalretno, dan Desa Jogosimo.

Adanya pembangunan kawasan *shrimp estate* telah berupaya mentransformasikan pada bidang sosial-ekonomi dimana terjadi sedikit perubahan pada tingkatan aktivitas masyarakat di Desa Tegalretno. Dikatakan demikian karena masyarakat penambak udang yang biasanya melakukan kegiatan di kolam tambak udang sendiri, kini terlibat menjadi karyawan pada kawasan *shrimp estate* baik saat pembangunan maupun implementasi program. Masyarakat yang bekerja disana diantaranya sebagai satpam, pemberi pakan udang, maupun buruh di PT. Adhikarya selaku kontraktor, dan lain-lain. Hal tersebut ditandai dengan jumlah pekerja di *shrimp estate* sekitar 40 orang yang dibagi pada bagian-bagian tertentu. Pembangunan tersebut juga telah memunculkan warung-warung yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Pada kultur masyarakat, mereka tidak lagi menjadi petambak tradisional melainkan petambak modern yang mampu memanfaatkan potensi yang ada dengan penguasaan teknologi yang dimilikinya. Selain itu, adanya perubahan pendapatan dari masyarakat Desa Tegalretno yang semula berkisar Rp. 700.000,00 kini sudah setara dengan UMR

Kabupaten Kebumen yakni Rp. 2.035.890.00 Hal tersebut sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Arul yakni :

“Ya saya bekerja di bagian pemberi pakan udang di BUBK dan sebelum ada pembangunan saya bantu-bantu di tambak tradisional. Alhamdulillah ya terjadi peningkatan pendapatan karena di BUBK itu digaji UMR” (Rasyid, 2023).

Melihat perubahan di atas pada pembangunan kawasan *shrimp estate* dapat disimpulkan bahwa praktik pemberdayaan belum berjalan sepenuhnya dan belum mentransformasikan secara keseluruhan hanya beberapa saja yang berubah setelah masyarakat bergabung pada institusi BUBK (Budidaya Udang Berbasis Kawasan) seperti masyarakat yang menjadi petambak udang modern, munculnya warung-warung, dan peningkatan pendapatan. Pada praktik pemberdayaan melalui pembangunan *shrimp estate* masih memiliki kekurangan-kekurangan. Dikatakan demikian, karena masyarakat tidak menjadi pengusaha atau yang mengatur di kawasan *shrimp estate* dan mereka masih sama menjadi petambak udang di institusi BUBK. Kemudian, tidak semua petambak udang tradisional menjadi pekerja di BUBK karena terdapat proses penyeleksian sehingga hanya beberapa petambak dan petani yang terdampak

serta selebihnya adalah anak-anak muda. Apabila ditinjau dari pekerja yang ada di BUBK, masyarakat Desa Tegalretno yang terlibat sebagai tenaga kerja lokal tetap masih sangatlah minim yakni sekitar 20% dan sisanya diserahkan pada elit kelas atas. Hal ini menimbulkan masyarakat masih tergantung pada institusi tersebut. Selain itu, pada proses perencanaan masyarakat hanya menerima sosialisasi semata tanpa adanya partisipasi yang lebih dalam. Masyarakat Desa Tegalretno juga tidak dapat melakukan kemandirian dikarenakan lahan yang mereka perjuangkan tetap dikosongkan dan tidak dipakai sehingga masyarakat bergantung pada adanya kawasan *shrimp estate* ini. Dengan demikian, berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi maka transformasi sosial dan ekonomi di Desa Tegalretno dalam praktik pemberdayaan dapat dikatakan belum terjadi.

2. Transformasi Pengetahuan

Ditinjau dari kultur masyarakat pesisir Desa Tegalretno yang notabene memiliki pendidikan tergolong rendah menjadikan mereka masih menggunakan cara tradisional dalam membudidayakan udang sebagai sumber penghasilan. Kemudian muncullah budidaya udang modern dan berkelanjutan di Desa Tegalretno atau *shrimp estate* yang menimbulkan kontra karena

kekhawatiran dan pengetahuan yang masih minim. Mereka khawatir bahwa lahannya akan digunakan dalam pembangunan *shrimp estate*. Dikatakan demikian karena berkaitan dengan hak milik lahan dimana lahan tersebut merupakan hak milik pemerintah namun masyarakat boleh menggunakannya dengan sertifikat Hak Guna Pakai. Akan tetapi, sertifikat tersebut telah habis masa pakainya pada tahun 2008 dan sudah melakukan perpanjangan pada tahun 2015 namun ditolak sehingga lahan tersebut kembali kepada pemerintah daerah. Masyarakat juga khawatir pembangunan ini mengakibatkan adanya abrasi dan kenaikan muka air laut.

Kekhawatiran dan ketidaktahuan mereka terhadap pembangunan *shrimp estate* yang memberikan dampak positif bagi masyarakat membuat mereka melakukan perlawanan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan sosialisasi terkait rencana pembangunan kawasan *shrimp estate* yang memaparkan poin-poin penting utama diantaranya masyarakat harus mengosongkan lahannya, adapun lahan yang masih dikelola masyarakat untuk membudidayakan udang akan dilewati oleh pemerintah daerah, sarana prasarana yang terimbas pembangunan seperti TPI Tegalretno akan

dibangun kembali, masyarakat terdampak akan menjadi tenaga kerja lokal ataupun mendapatkan ganti rugi, dan lain sebagainya. Adanya sosialisasi inilah, membuat masyarakat menerima pembangunan kawasan *shrimp estate* meskipun saat perencanaan mereka tidak diikutsertakan. Selain itu, selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat pesisir Desa Tegalretno juga dilibatkan dalam pelatihan terkait budidaya udang modern di Jepara. Mereka diberi ilmu terkait merawat kolam, memberi pakan udang, dan lain sebagainya yang tentu bermanfaat di kawasan *shrimp estate* ini. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arul dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen yang mengatakan bahwa :

“Saat sedang pembangunan, saya mengikuti pelatihan di Jepara selama lima hari. Disana saya mendapat ilmu terkait perawatan kolam, kualitas air, pemberian pakan udang, dan sebagainya. Dan itu saya implementasikan di BUBK” (Rasyid, 2023).

“Kita itu ada pembinaan dalam rangka pengambilan sampel-sampel airnya seperti apa dan kita datangkan dari Balai Air Payau Jepara untuk petambak kemudian dari Jogjakarta juga kami datangkan untuk mengambil sampel-sampel. Kemudian nanti

hasil sampelnya di sampaikan kepada para petambak” (Musriyanto, 2023).

Pada praktik pemberdayaan terutama pada bidang pengetahuan juga terjadi sedikit perubahan. Hal ini dilihat dari terbukanya pikiran masyarakat pesisir Desa Tegalretno dimana semula masih minim pengetahuan dan teknologi terkait budidaya udang tradisional dan kini melek akan budidaya udang modern yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Kehadiran Budidaya Udang Berbasis Kawasan sebagai pengelola dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan tidak hanya memberi manfaat pada terserapnya tenaga kerja lokal dan terbukanya lapangan usaha akan tetapi terdapat usaha pemberdayaan ekonomi melalui transformasi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manajemen BUBK kepada masyarakat. Meskipun demikian, transformasi tersebut masih sangatlah minim dikarenakan masyarakat pada dasarnya sudah memiliki *basic* atau dasar terkait penambakan udang dan hanya merubah pada teknologi semata sehingga transformasi pengetahuan yang terjadi tidaklah signifikan.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pemberdayaan melalui pembangunan *shrimp estate* belum berjalan sepenuhnya meskipun

pembangunan telah berhasil. Dikatakan demikian, karena praktik pemberdayaan hanya memenuhi prinsip partisipasi secara garis besar dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan *shrimp estate*. Apabila dilihat dari teori pemberdayaan masyarakat sebagai transformasi sosial menurut Mansour Fakih maka praktik tersebut juga belum sepenuhnya terjadi perubahan. Dikatakan demikian masih adanya kekurangan seperti masyarakat yang masih sama menjadi petambak atau pekerja di kawasan BUBK dan mereka tidak menjadi pengusaha, pemodal, maupun pengatur pada institusi tersebut. Selain itu, masyarakat masih bergantung pada institusi karena fasilitas maupun modal telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan adanya ketergantungan masyarakat pada kelas atas dan masyarakat masih termarjinalkan. Meskipun demikian, tetap ada sedikit perubahan dalam bidang ekonomi yakni terjadinya peningkatan pendapatan.

Sementara pada transformasi pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan pendidikan sehingga memunculkan kesadaran kritis dapat diketahui bahwa transformasi tersebut juga belum berubah secara total. Dikatakan demikian, karena pengetahuan mereka sebelumnya sudah ada terkait pembudidayaan udang dan sekarang masyarakat difasilitasi oleh pemerintah melalui adanya pelatihan dan sosialisasi terkait

pembangunan mengakibatkan perubahan atau transformasi yang terjadi belum signifikan.

BAB V

KONTESTASI POLITIK *STAKEHOLDER* PADA PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada bab yang kelima, penulis akan memaparkan terkait kontestasi politik para *stakeholder* pada pembangunan kawasan *shrimp estate* sebagai pemberdayaan masyarakat Desa Tegalretno. Pembangunan *shrimp estate* yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini berdasarkan potensi produksi budidaya udang di Kabupaten Kebumen. Oleh sebab itu, Kementerian tersebut dalam mewujudkan program prioritasnya yaitu menuju ekonomi biru dengan menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Pembangunan kawasan *shrimp estate* yang dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan, peresmian, serta implementasi program tentu melibatkan banyak pihak atau *stakeholder* dari pemerintah tingkat lokal hingga pemerintah di tingkat pusat. Adanya keterlibatan *stakeholder* dari berbagai pihak tentu memiliki kepentingannya masing-masing dengan kuasa yang dimiliki pada proses pemberdayaan melalui pembangunan *shrimp estate*. Kontestasi kekuasaan tersebutlah yang menjadi wacana dan dianalisis oleh penulis dengan merujuk pada teori analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough.

A. Aktor Politik dan Kekuasaan dibalik Wacana Pembangunan *Shrimp Estate*

Wacana pembangunan *shrimp estate* sebagai pemberdayaan masyarakat di Desa Tegalretno menjadi arena kekuasaan para aktor politik yang terlibat di dalamnya. Aktor politik atau *stakeholder* yang terlibat dalam mengambil keputusan atau kebijakan serta mengimplementasikan program dibagi menjadi tiga yakni pemangku kepentingan utama, penunjang, dan kunci (Anggainsi, 2020). Pertama, pemangku kepentingan utama pihak yang menerima dampak positif atau negatif dari suatu kegiatan. Pada wacana pembangunan *shrimp estate*, masyarakat Desa Tegalretno sebagai pemangku kepentingan utama dimana dampak positif maupun negatif adanya pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kedua, pemangku kepentingan penunjang adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Dalam hal pembangunan *shrimp estate*, para aktor politik seperti pemerintah Desa Tegalretno, Pemerintah Kecamatan Petanahan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kebumen, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagai pemangku kepentingan penunjang yang memfasilitasi masyarakat terkait

sosialisasi pembangunan, perekrutan karyawan, dan pelatihan pada masyarakat. Ketiga, pemangku kepentingan kunci yakni yang berpengaruh secara signifikan terkait masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap suatu kegiatan agar dapat berlangsung lancar. Para aktor diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, dan PT. Adhikarya sebagai pemangku kepentingan kunci yang mengetahui terkait mekanisasi tambak budidaya udang modern.

Aktor politik yang telah disebutkan di atas dalam mengambil keputusan, melaksanakan program, serta mengelola program tentu memiliki kekuasaan yang menjadi faktor krusial. Kekuasaan ini bertujuan untuk mempengaruhi atau membuat sebuah kebijakan atau peraturan sehingga dapat dikatakan sebagai kendali atas keputusan yang dibuat dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Selain kekuasaan, terdapat kepentingan yang berkaitan dengan harapan, manfaat, sumber daya, jalinan hubungan, dan sebagainya. Keduanya, dimiliki *stakeholder* sebagai aktor yang memiliki wewenang pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengimplementasian program.

Wacana pembangunan kawasan *shrimp estate* telah diisukan sejak tahun 2021 dan dikebut pelaksanaan pembangunannya pada tahun 2022. Munculnya wacana tersebut tentu tidak terlepas dari pemberitaan melalui

media massa seperti laman di *website* KKP, berita Kebumen, dan sebagainya. Dalam berita yang penulis kutip dari *website* KKP menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun kawasan *shrimp estate* di Desa Tegalretno dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Kebumen dan akan menggunakan lahan 100 Ha untuk memproduksi budidaya udang dengan target sekitar 40 ton/Ha/tahun. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kebumen memiliki potensi untuk mengembangkan budidaya udang vaname melalui skema kawasan budidaya tambak udang terintegrasi. Adanya kawasan tersebut menjadikan Kebumen sebagai pelopor budidaya udang modern di Indonesia dengan hasil produktivitas dan kualitas yang tinggi karena adanya campur tangan teknologi dan perencanaan bisnis yang matang dalam pelaksanaannya (Luthfiana, 2021).

Wacana pembangunan *shrimp estate* sebagai pemberdayaan dideskripsikan sebagai wacana yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Pembangunan tersebut juga akan menyerap tenaga kerja lokal sehingga masyarakat sekitar akan mendapat manfaat dari pembangunan *shrimp estate*. Namun, dalam proses pembangunan *shrimp estate* diinterpretasikan adanya kontra antara masyarakat dengan aktor politik terkait lahan yang digunakan untuk pembangunan dimana lahan tersebut

milik pemerintah daerah akan tetapi menjadi hak guna pakai masyarakat Desa Tegalretno. Namun, hak guna pakai tersebut telah habis masanya dan belum diperpanjang kembali sehingga menjadi milik pemerintah. Hal ini sebagaimana dalam berita yang penulis kutip dari media TV One News.com bahwasanya masyarakat Desa Tegalretno khawatir lahannya akan terimbas pembangunan *shrimp estate* meskipun lahan sekitar 4,8 hektar itu telah habis masa hak guna pakainya. Kemudian pemerintah Kabupaten Kebumen menanggapi hal tersebut dengan berdiskusi dan meyakinkan masyarakat bahwa lahan yang akan dibangun kawasan *shrimp estate* di luar lahan masyarakat dan telah bersertifikat. Oleh sebab itu, pembangunan kawasan *shrimp estate* tetap berjalan dan masyarakat tidak akan dirugikan (Tim TvOne, 2022).

Dari wacana di atas dapat dikatakan bahwasanya aktor politik memiliki kuasa dalam pembangunan kawasan *shrimp estate* yang sangat penting. Dikatakan demikian karena para aktor tersebut saling bekerja sama untuk kelancaran pembangunan kawasan *shrimp estate*. Hal tersebut ditandai pada peninjauan lokasi, persiapan anggaran, dan sebagainya tanpa adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat Desa Tegalretno hanya mendapat sosialisasi bahwa akan dibangun kawasan tambak udang modern yang mengarah pada

peningkatan produksi dan ekspor. Terlebih, wacana pembangunan tersebut itu bukan ide atau inovasi dari masyarakat Desa Tegalretno sendiri melainkan dari pemerintah Kabupaten Kebumen yang sejalan dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, pembangunan kawasan *shrimp estate* ini belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Desa Tegalretno terkhusus penambah udang. Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan baru pada tahap sosialisasi dan pelibatan tenaga kerja lokal dalam bidang tertentu. Dikatakan demikian karena kawasan *shrimp estate* ini dijalankan oleh pihak Budidaya Udang Berbasis Kawasan yang dinaungi oleh BLUPPB (Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wacana pembangunan kawasan *shrimp estate* sebagai pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari analisis teks menurut Fairclough guna melihat kekuasaan yang dimiliki para aktor politik sehingga dapat mempengaruhi masyarakat. Fairclough membaginya pada tiga macam yakni ideasioal, relasional, dan identitas. Pertama, ideasional merujuk pada representasi dari bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun yang digambarkan dalam teks. Kedua, relasional melihat bagaimana hubungan antar partisipan ditampilkan dan

digambarkan dalam teks. Ketiga identitas yakni bagaimana identitas partisipan ditampilkan dalam sebuah teks. Pada wacana tersebut, pembangunan direpresentasikan sebagai suatu *project* yang besar dan bermanfaat bagi pemerintah sendiri serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, pembangunan tersebut tidak berjalan dengan lancar dikarenakan adanya kontra dari masyarakat terkait lahan yang akan menjadi objek pembangunan. Selain itu, kurang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan hanya mendapat sosialisasi dimana masyarakat harus mengosongkan lahan yang dimilikinya. Kemudian, pemerintah sebagai aktor politik yang memiliki kuasa dapat mempengaruhi dan membujuk masyarakat melalui diskusi bersama masyarakat dan penggunaan bahasa pada kalimat pemerintah Kabupaten Kebumen akan memastikan pembangunan *shrimp estate* tidak akan merugikan masyarakat dan melewati lahan yang dikelola masyarakat serta akan melibatkan tenaga kerja lokal adalah bentuk dominasi dari aktor politik itu sendiri. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Kebumen juga mengatakan bahwa apabila masih ada yang belum menerima bisa menemui pemerintah dan akan dijelaskan dengan berdiskusi. Hal tersebut tentu membuat masyarakat menerima pembangunan kawasan *shrimp estate* dikarenakan kuasa yang dimilikinya

tergolong rendah serta pada akhirnya masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal yang dapat meningkatkan perekonomian.

B. Kontestasi Para *Stakeholder* dan Kepentingan Dalam Pembangunan Kawasan *Shrimp Estate*

Proyek pembangunan kawasan *shrimp estate* yang ada di Desa Tegalretno, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen menjadi arena pertarungan antar aktor politik atas kepentingannya masing-masing. Setelah penandatanganan MoU (kerjasama) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, pembangunan tersebut tetap berjalan meskipun terdapat kontra dari kalangan masyarakat baik petambak, nelayan, pekebun, maupun petani. Kontra tersebut didasari oleh lahan yang kurang jelas kepemilikannya karena lahan tersebut dihibahkan pada masyarakat untuk digunakan sebagai sumber penghasilan namun hak guna pakai tersebut telah habis masanya pada tahun 2015 dan diperpanjang namun sampai saat ini belum dikeluarkan sehingga lahan tersebut menjadi milik pemerintah kembali. Pada terjadinya kontra ini, masyarakat diwakili oleh seorang *lawyer* agar mereka tetap dapat menggunakan lahan tersebut. Sementara pemerintah tetap menjalankan proyek tersebut untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi kontestasi pada pembangunan *shrimp estate* dimana

kawasan tersebut sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, penulis memaparkan terkait bagaimana para aktor politik memaknai pembangunan kawasan *shrimp estate* sebagai pemberdayaan dengan tanggapannya terhadap kontra sehingga tetap melancarkan pembangunan tersebut serta bagaimana kontestasi pada pembangunan tersebut muncul yang dilihat dari aspek sosialkultural Fairclough.

1. Konstruksi Pemahaman Wacana Pemberdayaan Masyarakat Oleh Aktor Politik

Wacana pembangunan kawasan *shrimp estate* adalah program pembangunan nasional milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah direncanakan sejak tahun 2021 dengan menggunakan konsep kawasan perikanan budidaya dimana selaras dengan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan yang berisi :

- 1) Perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan dilakukan dengan menetapkan sebagai kawasan budidaya perikanan.
- 2) Lahan untuk pembudidayaan ikan dapat ditetapkan sebagai kawasan budidaya perikanan memenuhi kriteria paling sedikit;
 - a. Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan

- b. Menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional atau untuk keperluan ekspor.
- 3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 merupakan;
- a. Kawasan diperuntukkan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan
 - b. Zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai *stakeholder* utama membuat program terobosan tahun 2021-2024 dimana salah satunya adalah mengembangkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. Program tersebut menggunakan konsep ekonomi biru dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Dalam konsep tersebut terdapat tiga hal yakni negara menyusun regulasi atau kebijakan untuk memicu pertumbuhan (produktivitas) hingga pertumbuhan ekonomi, produksi udang hasil budidaya menjadi “tulang punggung” ekonomi Indonesia melalui revitalisasi dan *modelling*

Budidaya Udang Berbasis Kawasan, serta melakukan strategi utamanya yaitu peningkatan produktivitas lahan budidaya udang secara efisien, melalui pengelolaan tambak udang teintegrasi hulu hingga hilir dalam satu kawasan yang berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mentargetkan budidaya udang sebesar 80 ton/Ha/tahun dan jumlah produksi 4.000 ton dengan luas lahan sekitar 100 Ha. Hal tersebut senada dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen dimana nantinya Kebumen sebagai sentra baru produksi udang di Jawa Tengah. Sebelum adanya *shrimp estate*, produksi budidaya udang vaname di Kebumen baru mencapai 1.600 ton/tahun dan setelah adanya kawasan *shrimp estate* produksi udang vaname diproyeksikan menambah 6000 ton/tahun dan menjadi 7.600 ton/tahun. Dalam mewujudkan program terobosan dan target produksi udang di tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun kawasan *shrimp estate*. Kawasan *shrimp estate* ini menjadi solusi alternatif untuk budidaya udang berkelanjutan oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dengan melihat adanya potensi lahan yang ada di Kabupaten Kebumen. Selain itu, kawasan tersebut nantinya akan memproduksi

udang lebih banyak untuk di ekspor sehingga menambah pendapatan negara serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagai pemberdayaan.

Atas dasar kepentingan di atas, para aktor politik yang terlibat dalam pembangunan kawasan *shrimp estate* mengkonstruksikan pembangunan tersebut sebagai pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu, dalam melancarkan pembangunan, para aktor politik dengan kuasanya mengatasi dan menanggapi kontra yang terjadi memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat ini diungkap oleh Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Tegalretno terkait penolakan dari masyarakat dan penggantian lahan yang diinginkan masyarakat dan mengatakan bahwa :

“Waktu itu sebenarnya bukan menolak pembangunannya akan tetapi ada sebagian yang menginginkan adanya ganti rugi dari tanah mereka yang 11 bidang ini namun sudah dipindah yang semula terdapat hak guna pakai. Sampai saat ini tidak ada ganti rugi dan tanah tersebut belum digarap kembali yang dulunya memiliki hak guna pakai. Namun hak guna pakai itu berakhir pada tahun 2008. Pada saat itu sudah diurus namun belum keluar kemudian mengajukan pada tahun 2015 tetapi ditolak. Lalu yang

digunakan untuk sekarang yakni sertifikat atas nama kabupaten jadi tidak ada tanah milik warga sedikitpun” (Supriyanto, 2023). Pernyataan dari Kepala Desa Tegalretno senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Edy Purwoko sebagai Pemerintah Kecamatan Petanahan yang berpendapat bahwa pembangunan kawasan *shrimp estate* berjalan lancar tanpa adanya penolakan. Berikut ini penyampaian dari Pimpinan Pemerintah Kecamatan Petanahan yaitu :

“Tidak ada penolakan dari masyarakat dan lancar selama proses pembangunan berlangsung. Itu kan ada 11 orang penolakan yang artinya tanah yang ia kerjakan tidak boleh digunakan dan memang tidak digunakan itu dilewati. Jadi pemerintah daerah hanya mengerjakan yang tidak ada masalah. Nah dia ini pro aktif, ada lawyer, terus dia melakukan penolakan karena khawatir. Menurut saya warga itu gak taat hukum karena itu tanah milik negara dan dia melakukan izin hak guna pakai dan sudah habis pada tahun 2016 dan sedang mengajukan lagi. Nah karena ini mau digunakan pmda kemudian buru-buru mengajukan lagi tetapi masih dalam proses dan sebetulnya ketika negara mau memakai itu gak ada masalah” (Purwoko, 2023).

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Musriyanto selaku Kepala Sie Budidaya Perikanan yang menanggapi bahwa pro dan kontra di tengah masyarakat mengenai pembangunan adalah hal

yang wajar. Hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka akan manfaat yang diperoleh dari pembangunan kawasan *shrimp estate*. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Musriyanto mengungkapkan bahwa :

“Ya saya kira itu wajar ya, namanya setuju dan tidak setuju namanya hal baru itu memang ada yang tidak suka. Tapi sebenarnya ketidaksukaan itu dikarenakan mereka tidak tahu. Ketidaktahuan itu mereka lebih merealisasikan dengan kontra dan mengatakan tidak padahal sebenarnya kalau mereka mau berfikir ya mereka itu sangat diuntungkan dengan adanya pembangunan itu. Ini dikarenakan jelas darisitu ekonomi akan berputar disitu kemudian tenaga kerja akan diambil darisitu kemudian akan ada kos-kosan karena menyangkut tenaga kerja dari luar. Akan tetapi, selama ini dari orang-orang yang tidak setuju karena khawatir tanahnya itu diambil oleh pemerintah daerah padahal aslinya kita memiliki lahan sendiri sekitar 100 Ha bersertifikat dan kita dari awal sudah memastikan tidak akan mengambil tanah dari mereka. Namun karena sudah terprovokasi dan sudah ada pihak yang menunggangi sehingga menjadi berlaru-laru. Padahal di awal sudah kami sosialisasikan juga tidak kurang-kurang bahkan kita sudah menawarkan silahkan yang terdampak membuat kelompok dan kita akan kasih bantuan sapi tapi mereka tidak mau sehingga ya sudahlah kalau tidak

mau ya sudah tetapi pembangunan tetap berjalan karena sudah dipastikan lahan mereka tidak diambil. Karena kita menggunakan lahan pemerintah daerah dengan bukti-bukti sertifikat yang menjadi dasar pembangunan. Itu yang sebenarnya terjadi dikarenakan kekhawatiran mereka saja karena ketika kita sudah mulai proses membangun dan kita pastikan itu tidak di tanah mereka ya mereka diam saja” (Musriyanto, 2023).

Aktor politik lain yakni Bapak Maskar Jayadi selaku pengelola Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) mengenai kontra yang ada di masyarakat itu tidak ada dan terkait masyarakat yang terdampak serta meminta ganti rugi itu sudah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Maskar mengatakan:

“Adanya pembongkaran lokasi TPI Tegalretno merupakan bagian lahan yang telah disepakati dalam MoU. Selanjutnya pihak PEMDA akan membangun ulang TPI di Tegalretno tersebut. Akses jalan bagi nelayan tidak sulit, karena pihak BUBK telah membuatkan jalur khusus bagi nelayan yang tidak mengganggu sistem keamanan area budidaya (*Bio Security*). Penebangan pohon kelapa dan pohon lainnya dilahan BUBK tahun 2022 adalah bagian dari (*Land clearing*) telah diganti rugi oleh pihak KKP dengan biaya yang telah disepakati bersama” (Jayadi, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dari keempat narasumber dapat diketahui bahwa proyek pembangunan *shrimp estate* akan tetap berjalan sesuai rencana dengan kekuasaan yang dimiliki oleh aktor politik untuk mengatasi kontra yang terjadi dan melewati lahan milik masyarakat. Selain itu, para *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan kawasan *shrimp estate* memiliki satu tujuan untuk tetap membangun kawasan tersebut mengingat potensi tambak udang yang cukup besar serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam mendukung pembangunan sebagai pemberdayaan, para aktor politik ini memberikan kesempatan pada tenaga kerja lokal untuk terlibat pada pembangunan dan diberikan pelatihan bagi masyarakat yang telah direkrut dimana nantinya akan bekerja di BUBK ini. Pengelola BUBK dalam melakukan seleksi tenaga kerja lokal yakni melalui prosedur usulan Kepala Desa (Karanggadung, Tegaltretno, Jogosimo) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen yang diteruskan kepada Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang (BLUPPB), disamping itu melalui jalur khusus sesuai instruksi dari pusat

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pernyataan tersebut selaras dengan Kepala Desa Tegalreno yakni Bapak Supriyanto yang mengatakan bahwa :

“Disini perekrutannya Kades diikuti. Ketika ada kebutuhan apapun seperti tenaga kerja ya kita tetep dihubungi dari Dinas Kelautan dan kalo kecamatan saya kurang tahu. Tapi setahu saya tim perekrutan tenaga kerja itu meliputi camat. Jadi sama lah antara kecamatan dan balai desa artinya apabila ada informasi ya disampaikan. Sekarang sudah mulai bekerja baik satpam maupun yang tenaga anak kolamnya. Kemarin juga saya mendampingi pelatihan yang dilakukan dua kali di Jepara” (Supriyanto, 2023).

Hal ini senada dengan Bapak Edy Purwoko selaku Pimpinan Kecamatan Petanahan yang mengatakan bahwa :

“Kemarin sudah melakukan pendaftaran siapa yang mau bekerja disana, dan mendaftar, serta terdapat persyaratan tertentu ya namanya bekerja dimanapun juga ada syarat pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Nah kalau orang pantai kan sekolahnya gak selesai, ijazah kan gak punya, tetapi mereka sudah biasa mengerjakan seperti itu dia tetap direkrut trus akan dilakukan pelatihan dan bahkan sebagian sudah diajak untuk studi banding di Jepara. Nah disana itu ada tambak udang milik pemerintah bahkan utamanya adalah orang-orang terdampak. Artinya terdampak

adalah kemarin dia mengerjakan lahan disitu sebagai *penderes* kelapa dimana lahannya milik pemerintah dia kerjakan disitu namun karena itu mau digunakan maka pohon kelapanya ditebang nah inilah yang diutamakan tetapi kadang mereka gak bebas kalau kerja diatur-atu gitu. Orang pantai kan inginnya bebas dan jika sudah mendapat upah kan berhenti seperti tenaga kerja yang bekerja disitu yakni kalau minggu minta libur makanya tenaga kerja yang ada disini itu tenaga kasar” (Purwoko, 2023).

Stakeholder lainnya adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan sebagai fasilitator pada petambak udang yang akan menjadi tenaga kerja lokal di Budidaya Udang Berbasis Kawasan Kebumen. Pelatihan ini diselenggarakan dengan bekerjasama pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) di Jepara. Bapak Musriyanto mengungkapkan bahwa :

“Kita itu ada pembinaan tetapi memang untuk secara teknisnya belum karena mereka sudah memiliki tenaga teknisnya. Jadi kita membinanya dalam rangka pengambilan sampel-sampel airnya seperti apa dan kita datangkan dari Balai Air Payau Jepara untuk petambak kemudian dari Jogjakarta juga kami datangkan untuk mengambil sampel-sampel. Kemudian nanti hasil sampelnya di sampaikan kepada para petambaknya” (Musriyanto, 2023).

Menurut hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik benang merah bahwa para aktor politik ini membangun pemahaman pemberdayaan pada masyarakat Desa Tegalretno sebagai program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menuju kehidupan yang lebih baik. Selain itu, adanya kawasan *shrimp estate* memberikan citra politik yang baik pada masa pemerintahan Kabupaten Kebumen saat ini dan akan menjadi kebanggaan bagi kabupaten serta menjadi contoh untuk daerah lainnya. Para aktor politik ini saling berkontestasi dalam pembangunan kawasan *shrimp estate* untuk menjadi dekat dengan pemberdayaan pada masyarakat atas kepentingan dan kuasanya masing-masing. Sementara, masyarakat Desa Tegalretno yang dari dahulu sudah menggunakan lahan tersebut bertahun-tahun sebagai sumber mata pencaharian yang semula menolak adanya pembangunan kini berangsur-angsur menerima karena mereka terlibat dalam pembangunan sebagai tenaga kerja lokal.

Proyek pembangunan kawasan *shrimp estate* menjadi dinamika pertarungan kepentingan dan kekuasaan. Proses dialektika pembangunan tersebut telah menyebabkan masyarakat kelas bawah menjadi termarjinalkan sehingga proyek tersebut bukan berasal dari kebutuhan masyarakat

melainkan kepentingan kelas atas yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Kabupaten Kebumen. Marjinalisasi yang terjadi dapat ditandai dimana dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat Desa Tegalretno tidak dilibatkan dan hanya para aktor politik yang saling berkoordinasi sehingga proyek ini bias terhadap kepentingan aktor politik. Proyek pembangunan ini seolah-olah dikonstruksikan sebagai pemberdayaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dimana masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal sehingga akan menutupi kontra yang terjadi pada masyarakat.

Wacana pembangunan kawasan *shrimp estate* sebagai pemberdayaan dilihat dari teori CDA menurut Fairclough diinterpretasikan pada tiga cara yang berbeda yakni bahasa sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu atau bahasa digunakan dalam ranah tertentu, bahasa sebagai praktik sosial, wacana digunakan pada kata benda yang merujuk pada cara bicara yang memberikan makna pada pengalaman dari perspektif tertentu. Pada wacana pemberdayaan masyarakat diterapkanlah ketiga cara tersebut yang dapat dilihat dari bahasa para pemangku kepentingan pada ranah politik dalam melakukan sosialisasi rencana pembangunan kawasan *shrimp estate*. Cara kedua berkaitan

dengan bahasa sebagai praktik sosial dimana pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan tentu dapat mempengaruhi orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Cara ketiga dapat dilihat pada cara bicara para pemangku kepentingan yang menggunakan bahasa formal sehingga memberikan makna bahwa mereka memiliki kuasa di dalamnya.

Pada aspek analisis praktik wacana memusatkan perhatian pada bagaimana pola hubungan antar partisipan. Dalam wacana pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan *shrimp estate* terdapat pola hubungan antara masyarakat atau petambak udang dengan *stakeholder*. Saat sosialisasi rencana pembangunan *shrimp estate* dapat dilihat bahwa pola yang berlangsung cukup demokratis dimana masyarakat menyampaikan aspirasinya berupa pembangunan kembali TPI yang telah dibongkar, akses bagi nelayan untuk keluar-masuk, ganti rugi bagi para petani maupun pekebun yang kehilangan mata pencaharian, dan sebagainya. Namun, pada saat pembangunan dimana masyarakat masih melakukan penolakan terkait hal tersebut mendapat tanggapan dari pemerintah yang mengatakan tidak adanya ganti rugi lahan. Hal lainnya adalah kalimat “ketidaktahuan atau masyarakat tidak berfikir” dan “ketidakpatuhan pada hukum” yang disampaikan

oleh Pimpinan Kecamatan Petanahan dan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis justru terkesan mengucilkan masyarakat. Selain itu, kalimat “tetap menjalankan pembangunan *shrimp estate* dan masyarakat diam saja” mengartikan adanya kuasa yang dimiliki *stakeholder*. Dengan demikian, penggunaan bahasa para aktor politik ini menunjukkan adanya kekuasaan dibandingkan masyarakat kelas bawah. Selain itu, pembangunan *shrimp estate* yang dikonstruksikan sebagai pemberdayaan guna kemandirian masyarakat melalui pelatihan dan pelibatan tenaga kerja lokal membuat pembangunan ini menjadi bias yang menguntungkan bagi aktor politik.

2. Praktik Sosialkultural Sebagai Kemunculan Wacana Pemberdayaan Masyarakat

Kawasan *shrimp estate* dijadikan tambak udang modern pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dengan hasil produktivitas yang meningkat. Wacana tersebut sejalan dengan program terobosan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. Adapun strategi utamanya berupa peningkatan produktivitas lahan budidaya udang

secara efisien melalui pengelolaan tambak udang terintegrasi hulu-hilir dalam satu kawasan yang terukur dan berkelanjutan. Terbukanya pasar udang dunia juga menjadikan kawasan *shrimp estate* ini menjadi inovasi terbaru dari pemerintah dan memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Kebumen. Oleh sebab itu, kawasan tersebut disebut pembangunannya dengan menggunakan teknologi seperti IPAL, saluran intake, tandon dan sebagainya sehingga dapat mempercepat produktivitas udang dan menjadi negara pengekspor dunia.

Apa yang diinginkan pemerintah terhadap kawasan *shrimp estate* ini berbanding terbalik pada kondisi masyarakat Desa Tegalretno yang masih berkembang. Dalam hal ini, para nelayan belum bisa mengajukan bantuan maupun programnya karena APBDes tidak menganggarkan untuk hal tersebut. Selain itu, petambak Desa Tegalretno masih menggunakan metode tradisional dan kemampuannya dalam memproduksi udang masih rendah sehingga belum mencapai target. Dengan demikian, munculnya kawasan *shrimp estate* ini menjadi solusi untuk memberdayakan masyarakat dan memandirikan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan memiliki keuntungan sendiri bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Ideologi kapitalisme juga dapat menjadi latar belakang munculnya wacana pemberdayaan melalui pembangunan. Dikatakan demikian, karena sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan bagi pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan terbaik bagi kepentingan atas sumber-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Dalam hal ini, Budidaya Udang Berbasis Kawasan sebagai pelaku ekonomi utama berhak menguasai sumber daya ekonomi yakni lahan milik pemerintah daerah untuk dijadikan kawasan *shrimp estate* dan nantinya keuntungannya akan masuk sebagai pendapatan negara serta masyarakat Desa Tegalretno selaku pekerja menerima imbalan atau upah berdasarkan cara kerjanya. Adanya kapitalisme ini dipengaruhi oleh persaingan dan pasar bebas sehingga membuat Indonesia harus bersaing dan mengeksport udang melalui peningkatan produktivitas udang yang tinggi dengan dibangunnya kawasan *shrimp estate*.

Pembangunan senantiasa diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi keberhasilan dari pembangunan. Munculnya sistem neoliberal yang mendasarkan ekonomi pada pasar bebas mengakibatkan adanya kesenjangan dimana sistem tersebut bias terhadap kepentingan kelas atas dan

memarjinalkan kelas bawah. Oleh sebab itu, wacana pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kawasan *shrimp estate* sebagai strategi untuk memandirikan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan ulasan di atas, penulis menganalisisnya pada aspek sosialkultural menurut Fairclough, dimana aspek tersebut berhubungan dengan konteks di luar teks. Analisis praktik sosiokultural didasarkan pada konteks sosial yang ada di luar wacana namun mempengaruhi kemunculan wacana. Dalam hal ini, wacana pemberdayaan masyarakat muncul dikarenakan melihat adanya potensi tambak udang di Desa Tegalretno yang masih melakukan pengelolaan secara tradisional. Selain itu, dikarenakan wacana tersebut akan menjadi tambak udang modern pertama di Indonesia sementara masyarakat masih belum memiliki kemampuan pada bidang tersebut maka perlunya pemberdayaan melalui pelatihan pada masyarakat Desa Tegalretno. Kemudian, adanya sistem kapitalisme dan neoliberalisme yang membuka kesempatan pada pihak lain untuk menguasai faktor produksi maupun sumber daya ekonomi membuat kelas atas dapat memberdayakan masyarakat serta sejalan dengan

kepentingan yang diinginkannya. Tak hanya itu, pasar bebas membuat Indonesia terpacu bersaing dengan negara lain sehingga Indonesia harus meningkatkan produktivitasnya melalui pemberdayaan dalam pembangunan kawasan *shrimp estate*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan *Shrimp Estate* di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut :

1. Pembangunan kawasan *shrimp estate* di Desa Tegalretno, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Sebelum adanya pembangunan tersebut, kawasan pesisir Desa Tegalretno dijadikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Kemudian, pada tahun 2021 kawasan tersebut resmi menjadi objek pembangunan *shrimp estate* dengan penandatanganan MoU kedua belah pihak. Saat proses pembangunan berlangsung masyarakat Desa Tegalretno kurang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan hanya mengikuti sosialisasi sehingga pembangunan tersebut dilakukan secara diam-diam dengan membongkar TPI milik warga sekitar. Meskipun

demikian, masyarakat sekitar telah mengusulkan kembali pembangunan TPI pada pemerintah. Proses pembangunan ini menimbulkan beberapa kerugian bagi para *penderes* kelapa dimana mereka kehilangan lahan dan sumber pendapatan yang didapatkan dari hasil *menderes* air nira kelapa dan kemudian dimanfaatkan untuk membuat gula aren serta dijual di pasar. Meskipun pembangunan *shrimp estate* memunculkan kontra di tengah masyarakat, pemerintah telah memberdayakan masyarakat dengan salah satu prinsipnya yaitu partisipasi melalui kegiatan pelatihan dan perekrutan untuk menjadi tenaga kerja lokal selama pembangunan berlangsung hingga pengimplementasian program tersebut. Praktik pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan *shrimp estate* belum sepenuhnya berjalan meskipun pembangunannya dikatakan berhasil. Hal ini ditandai kurang adanya pemenuhan prinsip-prinsip pemberdayaan. Selain itu, praktik tersebut tidak menimbulkan transformasi sosial secara signifikan sehingga sangatlah minim. Hal ini dilihat dari minimnya perubahan pada keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal tetap di BUBK yang semula sebagai petambak tradisional meskipun mereka tidak menjadi pemodal, pengatur, pengusaha, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan

institusi tersebut berpihak pada elit kelas atas sehingga pemodal dan pengatur dimiliki oleh *stakeholder*. Kemudian, pada bidang ekonomi masyarakat Desa Tegalretno mengalami peningkatan pendapatan sesuai dengan UMR Kabupaten Kebumen. Sementara, pada pengetahuan juga minim transformasi dikarenakan masyarakat sudah memiliki *basic* pembudidayaan udang. Dengan demikian, praktik pemberdayaan dalam pembangunan *shrimp estate* masih sangatlah minim dan belum adanya transformasi sosial secara signifikan.

2. Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kawasan *shrimp estate* tentu melibatkan aktor politik di dalamnya. Pemangku utama dipegang oleh masyarakat Desa Tegalretno sementara pemangku kepentingan kunci yakni Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para aktor politik dibalik wacana pembangunan *shrimp estate* memiliki kepentingannya masing-masing dan saling bekerja sama untuk melancarkan pembangunan tersebut. Wacana pembangunan tersebut tidak terlepas dari media berita yang menginformasikan bahwa kawasan *shrimp estate* akan menjadi tambak udang modern pertama di Indonesia dan nantinya akan

menyerap tenaga kerja lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari hal tersebut, apabila dikaitkan dengan analisa teks menurut Fairclough dapat disimpulkan bahwa pembangunan dikuasai oleh elit kelas atas dimana wacana tersebut bukanlah ide dari masyarakat Desa Tegalretno melainkan dari pemerintah Kabupaten Kebumen yang sejalan dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, adanya kontra yang timbul akibat pembangunan membuat pemerintah menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi masyarakat dengan diskusi dan menjanjikan akan melewati lahan milik masyarakat serta pelibatan tenaga kerja lokal. Pada akhirnya, masyarakat menerimanya karena kekuasaan yang dimiliki tergolong rendah. Pembangunan kawasan *shrimp estate* sebagai pemberdayaan masyarakat dipahami secara berbeda antara masyarakat dengan aktor politik. Masyarakat khawatir akan kehilangan mata pencaharian sementara aktor politik memaknai bahwa pembangunan tersebut menguntungkan masyarakat dan masyarakat yang kontra pada hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan akan manfaatnya serta ketidakpatuhan pada hukum. Proyek pembangunan tersebut menjadi dinamika pertarungan kepentingan dan kekuasaan. Hal ini ditandai adanya penggunaan bahasa dari aktor

politik yang menunjukkan kekuasaannya dibandingkan kelas bawah seperti masyarakat tidak berfikir dan ketidakpatuhan pada hukum. Pembangunan *shrimp estate* yang dikonstruksikan sebagai pemberdayaan guna kemandirian masyarakat melalui pelatihan dan pelibatan tenaga kerja lokal membuat pembangunan ini menjadi bias yang menguntungkan bagi aktor politik. Adanya pembangunan kawasan *shrimp estate* sebagai pemberdayaan muncul dikarenakan praktik sosialkultural yang melingkarinya. Dikatakan demikian, karena adanya sistem kapitalisme dan neoliberal yang membuat Indonesia melakukan persaingan dengan negara lain terutama dalam ekspor udang sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka pembangunan kawasan *shrimp estate* menjadi terobosan dan meningkatkan produktivitas udang yang lebih tinggi. Dengan demikian, praktik pemberdayaan melalui pembangunan *shrimp estate* menjadi wacana dominan pada kelas elit atas dibandingkan kelas bawah serta kelas bawah masih termarjinalkan.

B. Saran

1. Pembangunan *shrimp estate* berimplikasi pada pembongkaran TPI untuk nelayan. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus segera membangun fasilitas

bagi nelayan yakni TPI agar mereka tidak terlalu jauh dalam menjual hasil panennya.

2. Pemerintah dan masyarakat seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu berkaitan dengan ganti rugi lahan yang masih menjadi hak guna pakai masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman maupun kontra antara masyarakat dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2011). *Community Development : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggainsi, M. C. (2020). *Community Empowerment : Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*. Malang: UB Press.
- Asri, M. (2019). Dinamika dan Perspektif Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. 2-3.
- Astuti, A. F. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Kampung Pelangi di Kota Semarang. *Journal of Politic and Goverment Studies*, 1-15.
- Badan Pusat Statistik Kab. Kebumen. (2022). *Kabupaten Kebumen Dalam Angka Regency IN Figures 2022*. Kebumen: BPS Kabupaten Kebumen.
- Badan Pusat Statistik Kab. Kebumen. (2022). *Kecamatan Petanahan Dalam Angka 2022 (Petanahan Subdistrict in Figures 2022)*. Kebumen: BPS Kebumen.
- Daezin, B. A. (2023, Maret 2). Wawancara dengan Kelompok Nelayan Desa Tegalretno Terkait Pembangunan Kawasan Shrimp Estate. (Sholikhah, Interviewer)

- Ditjen Perikanan Budidaya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Pembangunan Budidaya Udang Berbasis Kawasan Tahun 2022 di Kabupaten Kebumen-Jawa Tengah 2022*. Retrieved Februari 10, 2023, from <https://kkp.go.id>
- Fahmi, B. (2023, Maret 3). Wawancara dengan Staff PT. Adhikarya Terkait Pembangunan Shrimp Estate. (Sholikhah, Interviewer)
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. New York: Addison Wesley Longman.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis*. London: Longman.
- Faizal. (2015). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 36-45.
- Fakih, M. (2003). *Bebas Dari Neoliberalisme*. Yogyakarta: INSIST.
- Fakih, M. (2004). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan LSM di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, U. (2013). Analisis Wacana Kritis Model Fairclough. *Pendidik*, 209-211.
- Fitrianita, T. (2013). Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis-CDA Norman Fairclough). 1-3.

- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metafologi, dan Penerapan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal)*. Makassar: CV. Nur Lina dan Penerbit Taman Ilmu.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8 No. 1*, 36.
- Herman, G. V. (2018). Peranan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Pemberdayaan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknik Sipil, Vol. 5 No. 2*, 96-105.
- Hidayah, R. P. (2019). *Studi Kasus Metode Penelitian Kualitatif*. STAIN Sorong.
- Hikmah, J. (2023, Maret 2). Struktur sosial politik Desa Tegalretno. (Sholikhah, Interviewer)
- Indah, K. (2021, November 12). *Mengulik Pembangunan Shrimp Estate di Indonesia*. Retrieved Februari 8, 2023, from <https://kab.faperta.ugm.ac.id/2021/11/12/opini-mengulik-pembangunan-shrimp-estate-di-indonesia/>

- Jayadi, B. M. (2023, Maret 17). Wawancara dengan Penanggung Jawab Operasional BUBK (Budidaya Udang Berbasis Kawasan)Terkait Pembangunan Shrimp Estate. (Sholikhah, Interviewer)
- Kawasati, I. R. (2019). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (n.d.). *Pemberdayaan*.
- Li, T. M. (2012). *The Will To Improve : Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Lukman. (2019, Juli 3). *Profil Umum Desa Tegalretno*. Retrieved Januari 8, 2023, from tegalretno.kec-petanahan.kebumenkab.go.id
- Lukman. (2023, Februari 22). *Sejarah Desa Tegalretno*. Retrieved Maret 2, 2023, from <https://tegalretno.kec-petanahan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/96>
- Luthfiana, N. (2021, Agustus 12). *KKP Gandeng Pemkab Kebumen Bangun Shrimp Estate Pertama di Indonesia*. Retrieved Oktober 10, 2022, from <https://kkp.go.id/artikel/33251-kkp-gandeng-pemkab-kebumen-bangun-shrimp-estate-pertama-di-indonesia>

- Maharti, I. (2023, Maret 8). Wawancara dengan Masyarakat Terdampak Terkait Pembangunan Shrimp Estate. (Sholikhah, Interviewer)
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 72-87.
- Maskar. (2023, Maret 2). Konsep Shrimp Estate. (Sholikhah, Interviewer)
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Mujianto, A. P. (2019). *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *Komunika*, 2-8.
- Musriyanto, B. (2023, Maret 20). Wawancara dengan Kepala Sie Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen Terkait Pembangunan Kawasan Shrimp Estate. (Sholikhah, Interviewer)
- Muzaki, B. (2023, Januari 29). Wawancara dengan Masyarakat Terdampak Terkait Pembangunan Kawasan Shrimp Estate. (Sholikhah, Interviewer)

- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 8 No. 3*, 140-145.
- Nurhidayah, P. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul. 2-11.
- Patriane Marinda, A. S. (2019). Upaya Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Kampung Glitung Kota Malang. 1-8.
- Purwoko, B. E. (2023, Januari 5). Wawancara dengan Pimpinan Kecamatan Petanahan Terkait Pembangunan Shrimp Estate. (Sholikhah, Interviewer)
- Rahayu, N. I. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 738-748.
- Rasyid, B. A. (2023, Maret 7). Wawancara dengan Pekerja Terkait Pembangunan Shrimp Estate. (Sholikhah, Interviewer)

- Ratnaningsih, D. (2019). *Analisis Wacana Kritis (Sebuah Teori dan Implementasi)*. Lampung Utara: Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Retno Ambarsari, R. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas. *Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 2 No. 6*, 630-637.
- Rifdan, M. D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi di Kampung Adainasnoson. 100-106.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33*, 94.
- Rochmah, A. M. (2007). *Mansour Fakhri dan Transformasi Sosial (Studi Pemikiran Mansour Fakhri mengenai Transformasi Sosial di Indonesia)*. Yogyakarta.
- Saputri, A. Y. (2019). Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur). *Journal of Politic and Government Studies*, 201-210.
- Srihardjono, B. S. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di TPST 3R-Desa Mulyo Agung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 7 No. 3*, 6-11.

- Suciati, S. (2018). *Pidato Kampanye Politikus Perempuan Indonesia: Analisis Wacana Kritis Fairclough*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sumarti, E. (2010). Analisis Wacana Kritis: Metode Analisis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *Lingua Scientia*, 163-165.
- Supriyadi. (2015). Analisis Wacana Kritis : Konsep dan Fungsinya Bagi Masyarakat. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 97-105.
- Supriyanto, B. (2023, Januari 5). Wawancara dengan Kepala Desa Tegalretno terkait Pembangunan Kawasan Shrimp Estate. (Sholikhah, Interviewer)
- Syahrul, S. H. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan : Kasus Kelurahan Bungguosu, Konawe. 127-142.
- Tim TvOne. (2022, Maret 14). *Pemkab Kebumen Pastikan Proyek Shrimp Estate Tak Rugikan Warga Terdampak*. Retrieved Mei 5, 2023, from <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/3174-pemkab-kebumen-pastikan-proyek-shrimp-estate-tak-rugikan-warga-terdampak>
- Tohari, A. (2019). *Meradilkan Hegemoni Empowerment : Studi Politik Pembentukan Makna*. Yogyakarta.

Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1 No. 1*, 89.

LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi Penelitian

Gambar 14. Wawancara dengan Bapak Musrianto selaku Kepala Sie Perikanan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen



Gambar 15. Wawancara dengan Ibu Cici selaku Sekretaris PJ Operasional BUBK



Gambar 16. Wawancara dengan Bapak Fahmi sebagai Staff PT. Adhikarya selaku Kontraktor Pembangunan *Shrimp Estate*



Gambar 17. Wawancara dengan Bapak Edy Purwoko sebagai Pimpinan Pemerintah Kecamatan Petanahan



Gambar 18. Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Tegalretno



Gambar 19. Wawancara dengan Bapak Ahmad Daezin selaku Sekretaris Kelompok Nelayan Desa Tegalretno



Gambar 20. Wawancara dengan Bapak Muzaki
selaku Masyarakat Desa Tegalretno



Gambar 21. Wawancara dengan Bapak Arul Rasyid
selaku Masyarakat Desa Tegalretno



Gambar 22. Wawancara dengan Ibu Maharti selaku Masyarakat Desa Tegalretno



2. Lampiran Surat Izin Penelitian Pada Pemerintah Desa Tegalretno



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76436986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3057/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022 21 Desember 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian dan Wawancara

Yth.
Pemerintah Desa Tegalretno
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Shrimp Estate (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen*" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Sholikhah
NIM : 1906016094
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kebumen, 22 Agustus 1999
CP/e-mail : 083840416751/sholikhahmansa@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sudarno
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kaliputih Gunung, Rt 02 Rw 04, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya ditucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

3. Lampiran Surat Izin Penelitian Pada Pemerintah Kecamatan Petanahan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3057/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022 21 Desember 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian dan Wawancara

Yth.
Pimpinan Kecamatan Petanahan
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Shrimp Estate (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegaretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen*" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Sholikhah
NIM : 1906016094
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kebumen, 22 Agustus 1999
CP/e-mail : 083840416751/sholikhahmansa@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sudarno
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kaliputih Gunung, Rt 02 Rw 04, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

4. Lampiran Surat Izin Penelitian Pada Pimpinan BUBK (Budidaya Udang Berbasis Kawasan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 552/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

24 Februari 2023

Yth.
Pimpinan Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK)
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Shrimp Estate (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegaretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Sholikhah
NIM : 1906016094
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kebumen, 22 Agustus 1999
CP/e-mail : 083840416751/sholikhahmansa@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sudarno
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kaliputih Gunung, RT 02 RW 04, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

5. Lampiran Surat Izin Penelitian Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 552/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

24 Februari 2023

Yth.
Pimpinan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Shrimp Estate (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Sholikhah
NIM : 1906016094
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kebumen, 22 Agustus 1999
CP/e-mail : 083840416751/sholikhahmansa@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sudarno
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kaliputih Gunung, RT 02 RW 04, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen


Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

6. Lampiran Surat Izin Penelitian Pada PT. Adhikarya

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 552/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023 24 Februari 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Pimpinan PT. Adhikarya
Di tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Shrimp Estate (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegaloretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Sholikhah
NIM : 1906016094
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kebumen, 22 Agustus 1999
CP/e-mail : 083840416751/sholikhahmansa@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sudarno
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kaliputih Gunung, RT 02 RW 04, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen


Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Kasubag Akademik
Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

7. Lampiran Surat Izin Penelitian Pada Ketua Nelayan Desa Tegalretno



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 552/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Wawancara

24 Februari 2023

Yth.
Ketua Nelayan Desa Tegalretno
Di tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Shrimp Estate (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Sholikhah
NIM : 1906016094
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kebumen, 22 Agustus 1999
CP/e-mail : 083840416751/sholikhahmansa@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Sudarno
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kaliputih Gunung, RT 02 RW 04, Kcc. Kutowinangun, Kab. Kebumen

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Kasubag Akademik
Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

8. Lampiran Surat Tanggapan Persetujuan Penelitian dari BUBK (Budidaya Udang Berbasis Kawasan)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG
BUDIDAYA UDANG BERBASIS KAWASAN KEBUMEN
Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 54382
Telp (0811) 2819 5555 Fax (0287) 5601 222
LAMAN bubk.kebumen@gmail.com

Nomor : B.04/BLUPPB-BUBK/TU.210/III/2023 10 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Ijin Penelitian

Yth. Universitas Islam Negeri Walisongo
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang


Berdasarkan surat saudara Nomor 552/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023 tentang permohonan Ijin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi atas nama Sholikhah dengan judul "Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan *Shrimp Estate* (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan penelitian tersebut dengan ketentuan saudara mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

g.n Kepala BLUPPB Karawang
M. Alifurroqil
Budidaya Udang Berbasis Kawasan Kebumen
Gde Budha Adnyana Yasa

Dipindai dengan CamScanner

9. Lampiran Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol untuk Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Arungbinang No.15 Kebumen Telepon / Fax (0287) 384088
Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id
Facebook : kesbangpol IG : @kesbangpolkebumen Twitter : @kesbangpol_kbm

REKOMENDASI
NOMOR : 072 / 049/ 2023

IJIN PENELITIAN

Menunjuk surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO Nomor : 552/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini memberikan REKOMENDASI atas kegiatan penelitian/survei/riset di Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan oleh :


Nama	: Sholikhah
Pekerjaan	: Mahasiswi
NIM/NIP/NRP/NPM	: 1906016094
Alamat	: Kaliputih, Rt.02/Rw.04, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen
Nomor HP	: 083840416751
Penanggung Jawab	: H.A Gunawan, S.Ag, M.H.
Jumlah Peserta	: -
Lokasi	: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Waktu	: 20 Maret 2023 – 20 April 2023
Judul / Tema Penelitian	: Politik Pemberdayaan Masyarakat Desa : Studi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Shrimp Estate (Kawasan Budidaya Perikanan Terintegrasi) di Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan penelitian / survei / riset wajib terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat pemerintah terkait untuk mendapat petunjuk, dengan sebelumnya memberikan copy / salinan / tembusan surat ijin penelitian / survei / riset yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen.
2. Pelaksanaan penelitian/survei/riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Untuk penelitian yang dapat dukungan dana dari sponsor baik dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20 Maret 2023
a.n. BUPATI KEBUMEN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
Ub. Kepala Subbag. Bidang Perencanaan Anggaran dan Keuangan


SUMARWOTO, S.S.T.
KORPRI No. 2601291996031001

10. Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Masyarakat Desa Tegalretno

1. Ketua Kelompok Nelayan

- a. Identitas informan meliputi nama informan, nama kelompok nelayan di Desa Tegalretno, kapan berdirinya, dan anggotanya.
- b. Apa kegiatan atau perkumpulan dalam kelompok nelayan?
- c. Apakah pemerintah desa pernah memberikan kegiatan untuk kelompok nelayan?
- d. Apakah kelompok nelayan pernah mengajukan sebuah program pada pemerintah desa untuk pengembangan kemampuan?
- e. Adanya pembangunan *shrimp estate*, bagaimana tanggapan atau respon dari kelompok nelayan?
- f. Apakah sebelum pembangunan *shrimp estate*, kelompok nelayan terlibat atau berpartisipasi dalam sosialisasi *shrimp estate*?
- g. Apa dampak yang dirasakan oleh kelompok nelayan dengan adanya *shrimp estate*?

- h. Bagaimana respon atau tanggapan kelompok nelayan dengan adanya *shrimp estate*?
- i. Apa harapan atau hal yang diinginkan kelompok nelayan?

2. Masyarakat Terdampak Pembangunan

- a. Identitas informan
- b. Bagaimana asal-usul wilayah pesisir sebelum adanya pembangunan *shrimp estate*?
- c. Bagaimana proses atau awal mula pembangunan *shrimp estate*?
- d. Apakah pemerintah melakukan kesepakatan dengan masyarakat terlebih dahulu sebelum pembangunan *shrimp estate*?
- e. Apa tanggapan atau pendapat masyarakat mengenai pembangunan *shrimp estate*?
- f. Apa masyarakat pernah melakukan demo maupun konflik dan menolak adanya pembangunan *shrimp estate*?
- g. Sebelum melakukan penolakan, apakah ada koordinasi atau pertemuan antar masyarakat untuk membahas pembangunan *shrimp estate*?
- h. Bagaimana pemerintah desa menanggapi adanya penolakan tersebut? Apakah

terdapat kesepakatan dari masyarakat dan pemerintah serta apabila terdapat kesepakatan, apakah pemerintah telah memenuhinya?

- i. Apakah masyarakat dilibatkan dari perencanaan hingga pembangunan shrimp estate?
- j. Sebelum pembangunan, apakah pemerintah desa pernah melakukan pelatihan atau sosialisasi untuk penambak udang?
- k. Bagaimana sosialisasi atau pelatihan dari pemerintah desa yang diselenggarakan untuk penambak udang?
- l. Apakah masyarakat sudah menerima adanya pembangunan *shrimp estate*?

3. Masyarakat Desa Tegalretno yang bekerja di *Shrimp Estate*

- a. Identitas informan
- b. Sebelum bekerja di shrimp estate, informan bekerja dimana?
- c. Bagaimana pemerintah memberikan informasi terkait adanya pembangunan *shrimp estate*?
- d. Bagaimana tanggapan atau respon masyarakat adanya pembangunan *shrimp estate*?

- e. Apakah pemerintah memberikan pelatihan untuk penambak udang?
- f. Apakah terlibat dalam sosialisasi pembangunan *shrimp estate*?
- g. Adanya pembangunan *shrimp estate*, apa dampak yang dirasakan oleh informan?

B. Stakeholder terkait Pembangunan Shrimp Estate

1. Pengelola Budidaya Udang Berbasis Kawasan

- a. Apa itu *shrimp estate*? Dan mengapa dinamakan BUBK atau budidaya udang berbasis kawasan?
- b. Mengapa pemilihan lokasi BUBK ini di tiga desa Kec. Petanahan?
- c. Bagaimana proses koordinasi atau perizinan antara BUBK dengan KKP, pemerintah daerah, pemerintah desa saat akan dibangunnya BUBK ini?
- d. Bagaimana sistem kerja di BUBK sendiri?
- e. Bagaimana proses produksi yang ada di *shrimp estate*? Dan kepada siapa hasil produksi udang didistribusikan?
- f. Dalam proses pembangunan, kendala apa yang terjadi dan menghambat pada pembangunan *shrimp estate* ini? Dan bagaimana solusinya dari kendala tersebut?

- g. Dalam pembangunan BUBK ini, peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdapat kontra seperti adanya pembongkaran TPI, sulitnya akses untuk nelayan, masyarakat terdampak dalam hal ini penderes kelapa. Bagaimana tanggapan BUBK ini terhadap kontra yang terjadi di masyarakat?
- h. Bagaimana penyelesaian terhadap kontra yang ada di masyarakat terkait pembangunan?
- i. Berapa tenaga kerja yang ada di BUBK? Terdiri apa saja bagian atau struktur di dalam BUBK dan dapat dijelaskan secara singkat untuk masing-masing tupoksi bagian tersebut?
- j. Apakah di BUBK melibatkan tenaga kerja lokal? Berapa jumlahnya? Dan mengapa tenaga kerja lokal ditempatkan di bagian tertentu?
- k. Bagaimana proses penyeleksian tenaga kerja lokal di BUBK?
- l. Apakah terdapat pelatihan untuk tenaga kerja lokal sendiri dan bagaimana pelatihannya itu?
- m. Apakah ada proyek lanjutan atau pengembangan dari BUBK ini?

2. Pemerintah Desa Tegalretno

- a. Sebelum adanya pembangunan *shrimp estate*, bagaimana penggunaan tanah yang dekat dengan pantai?
- b. Bagaimana proses awal pembangunan *shrimp estate*?
- c. Mengapa Desa Tegalretno ini dipilih untuk pembangunan *shrimp estate*?
- d. Bagaimana tanggapan dari pemerintahan desa dengan adanya pembangunan *shrimp estate*?
- e. Selama proses pembangunan, apakah masyarakat melakukan penolakan? Bentuknya seperti apa?
- f. Bagaimana pemerintah desa menanggapi hal tersebut?
- g. Apakah selama proses pembangunan, masyarakat telah dilibatkan dan bentuknya seperti apa?
- h. Bagaimana koordinasi antara desa dan masyarakat pada saat masyarakat menolak adanya pembangunan *shrimp estate*?
- i. Apakah dalam pembangunan *shrimp estate*, pemerintah desa mengeluarkan dana?
- j. Apakah pemerintah desa memberikan pelatihan untuk penambah udang?

Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa ke masyarakat dan pemerintah desa ke pihak yang diajak kerjasama?

- k. Bagaimana kelanjutan pembangunan atau koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah?
- l. Apakah sebelum adanya pembangunan *shrimp estate*, pemerintah desa telah melakukan pemberdayaan kepada penambah udang? Bentuknya seperti apa?
- m. Kapan perkiraan pembangunan *shrimp estate* selesai?
- n. Apabila pembangunan *shrimp estate* telah selesai, apakah akan menggunakan tenaga lokal?
- o. Apa harapan pemerintah desa dengan adanya pembangunan *shrimp estate*?

3. Pemerintah Kecamatan Petanahan

- a. Bagaimana proses kesepakatan yang terjadi hingga pembangunan *shrimp estate* didirikan?
- b. Mengapa kedua desa itu dipilih untuk pembangunan *shrimp estate*?
- c. Bagaimana koordinasi antara desa, kecamatan, dan kabupaten untuk pembangunan *shrimp estate*?

- d. Apakah terdapat masyarakat yang melapor pada kecamatan untuk menolak pembangunan *shrimp estate*?
- e. Bagaimana pemerintahan kecamatan menanggapi adanya penolakan pembangunan *shrimp estate*?
- f. Apa peran pemerintahan kecamatan dalam pembangunan *shrimp estate*?
- g. Apa harapan pemerintahan kecamatan dengan adanya pembangunan *shrimp estate*?

4. PT. Adhikarya

- a. Bagaimana awal mula kesepatan antara pemerintah dengan PT untuk membangun *shrimp estate*?
- b. Bagaimana proses perekrutan pegawai yang bekerja di *shrimp estate*? Apakah melibatkan masyarakat desa?
- c. Berapa pekerja disana?
- d. Bagaimana sistem bekerja disini?
- e. Apakah selama pembangunan berlangsung terdapat kendala?
- f. Apakah sering adanya monitoring dari pemerintah?
- g. Bagaimana kelanjutan kedepannya? apakah nantinya akan menggunakan tenaga lokal?

5. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan

- a. Bagaimana proses atau pola komunikasi pada saat akan dibangunnya *shrimp estate*?
- b. Sebelum pembangunan *shrimp estate*, apakah dari Dinas Kelautan dan Perikanan pernah melakukan kegiatan pemberdayaan untuk penambak udang?
- c. Bagaimana tanggapa dari Dinas Kelautan dan Perikanan terkait kontra adanya pembangunan *shrimp estate*?
- d. Sejauh mana keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan *shrimp estate*?
- e. Apakah dari Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan pelatihan untuk pekerja di kawasan *shrimp estate*?
- f. Bagaimana rencana kedepan dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk *shrimp estate*?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sholikhah
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 22 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kaliputih Gunung, RT 02
RW 04, Kecamatan Kutowinangun,
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa
Tengah
No. Telp. : 083840416751

E-mail : sholikhahsmansa@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Kaliputih
2. MTsN Triwarno Kutowinangun
3. SMA Negeri 1 Kebumen
4. S1 UIN Walisongo Semarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik

Pengalaman Organisasi :

1. Dewan Perwira PMR SMA Negeri 1 Kebumen
2. Anggota PMII Rayon Fisip UIN Walisongo
3. Anggota Biro Keperempuanan PMII Rayon Fisip UIN Walisongo
4. Anggota UKM QAI Fisip UIN Walisongo
5. Anggota Departemen BTQ QAI Fisip UIN Walisongo
6. Anggota Departemen Sosial dan Advokasi BMC UIN Walisongo
7. Wakil Ketua Organisasi Daerah IMAKE Rayon UIN Walisongo

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.